

Tantangan

KEDAULATAN PANGAN

Tantangan KEDAULATAN PANGAN

Henry Bernstein
Dianto Bachriadi

ARCBooks



BINA DESA.

Daftar Isi

Tantangan Kedaulatan Pangan Henry Bernstein; Dianto Bachriadi

diterbitkan pertamakali dalam bahasa Indonesia
ARC Books, Oktober 2014
©ARC Books, 2014

Bernstein, Henry,
Food Sovereignty via a Peasant Way: a skeptical view;
alih bahasa: triagung;
penyunting: Hilma Safitri dan Yudi Bachri

Bachriadi, Dianto,
Adakah Jalan untuk Kedaulatan Pangan
dan Pembaruan Agraria di Indonesia?

ARC Books
Jalan Ice Skating No. 33 Arcamanik
Bandung 40293 - Indonesia
telp/fax: 022.7237799
email. arc.Indonesia@gmail.com

Katalog Dalam Terbitan
Henry Bernstein, Dianto Bachriadi
Tantangan Kedaulatan Pangan
Bandung, ARCBooks, 2014
xix+125 hlm;
ISBN: 978-602-71317-0-5

Diterbitkan pertamakali dalam Bahasa Indonesia atas
dukungan dan kerjasama :

**Agrarian Resource Center (ARC);
Bina Desa;
dan CCFD Terre Solidaire**



<i>Daftar Isi</i>	v
<i>Daftar Singkatan</i>	vii
<i>Pengantar Penerbit</i>	ix
<i>Pengantar Buku</i>	
Kedaulatan Pangan sebagai Karya Petani Kecil Perempuan dan Laki-laki untuk Seluruh Rakyat	xi
Bina Desa	
Adakah Jalan untuk Kedaulatan Pangan dan Pembaruan Agraria di Indonesia?	1
Dianto Bachriadi	
Kedaulatan Pangan melalui “Jalan Petani”: Sebuah Pandangan Skeptis	37
Henry Bernstein	
Lampiran	
Dokumen Deklarasi Forum Kedaulatan Pangan, Nyeleni 2007	111
Tren Politik Pangan Global	115
Indeks	119
Tentang Penulis	125

Daftar Singkatan

AGRA	: Aliansi Gerakan Reforma Agraria
API	: Aliansi Petani Indonesia
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BULOG	: Badan Urusan Logistik
CSO	: <i>Civil Society Organisation</i>
CGIAR	: <i>Consultative Group on International Agricultural Research</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FSPI	: Federasi Serikat Petani Indonesia
GMO's	: <i>Genetically Modified Organisms</i>
HKTI	: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
IFAD	: <i>International Fund for Agricultural Development</i>
IFPRI	: <i>International Food Policy Research Institute</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
KP	: Kedaulatan Pangan
KRKP	: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan

Pengantar Penerbit

NGO	: <i>Non Government Organisation</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pokja	: Kelompok Kerja
ROPPA	: <i>Reseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de L'Afrique de L'Ouest</i> /Jaringan Organisasi Petani dan Penghasil Pangan di Afrika Barat
SBY	:Susilo Bambang Yudhoyono
SPI	: Serikat Petani Indonesia
STN	: Serikat Tani Nasional
WFP	: <i>World Food Program</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

Ada sejumlah pertimbangan kami untuk menerjemahkan dan menerbitkan dua tulisan ini menjadi buku kecil. Pertama, kami ingin menambah khazanah wacana dan gagasan mengenai “Kedaulatan Pangan” di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir kata Kedaulatan pangan merupakan salah satu kata yang kerap kali muncul dan disuarakan oleh banyak kalangan di Indonesia, khususnya mereka yang mendalami persoalan pedesaan dan agraria di Indonesia. Namun, secara konsep, kata Kedaulatan Pangan sendiri masih seringkali dipertukarkan, bahkan disalahartikan dengan kata Ketahanan Pangan yang secara gagasan berbeda bahkan bertolak belakang. Untuk tujuan tersebutlah maka kami menganggap perlu untuk menerjemahkan dan menerbitkan kedua tulisan menjadi sebuah buku kecil yang dapat menjadi pegangan mereka yang tertarik untuk mendalami isu dan persoalan mengenai pangan. Buku ini juga mencoba untuk membumikan gagasan kedaulatan pangan serta melihatnya dalam konteks Indonesia.

Alasan kedua tentu saja karena kedua tulisan kami anggap memiliki perspektif dan nilai yang sejalan dengan pandangan dan perspektif ARC sebagai sebuah lembaga

yang mencoba untuk terus mempromosikan gagasan-gagasan kritis mengenai persoalan agraria di Indonesia.

Terakhir, Kami ingin berterima kasih kepada kedua penulis, Henry Bernsetin yang telah mengizinkan kami untuk menerbitkan tulisannya. Kepada Dianto Bachriadi yang bersedia menyempatkan waktunya menyumbang satu tulisan sebagai bagian untuk memahami lebih dalam dinamika dan persoalan kedaulatan pangan di Indonesia. Juga tentu saja kepada editor *Journal of Peasant Studies*, khususnya Saturnino Borras Jr, yang telah mempercayakan kepada kami untuk menerjemahkan dan menerbitkan tulisan Bernstein yang memang ditujukan sebagai salah satu artikel dalam jurnal tersebut. Kami juga berterima kasih kepada CCFD Terre Solidaire, salah satu lembaga sosial di Perancis yang bekerja dan bermitra dengan kami di Indonesia, yang telah memberikan dukungan terhadap penerbitan buku ini.

Tentu saja, kami sadar sepenuhnya bahwa penerjemahan dan penerbitan buku ini masih jauh dari memadai dan sempurna. Kami berharap semoga buku kecil ini dapat memberi sumbangan lebih bagi perkembangan wacana agraria kritis di Indonesia.

Bandung,
Oktober 2014

Pengantar Buku

Kedaulatan Pangan sebagai Karya Petani Kecil Perempuan dan Laki-laki untuk Seluruh Rakyat Dunia

Pada kesempatan pertama membaca pemikiran Henry Bernstein, yang dimuat dalam Jurnal bergengsi, *Peasants Studies*, hati dan pikiran ini tertantang untuk segera memberikan pengalaman konkrit cita-cita kaum tani dan kemenangan-kemenangan kecil rakyat tani di berbagai belahan dunia terkait kedaulatan pangan. Betapa tidak, dari judulnya saja sudah memprovokasi kita-kita yang sejak lama bergelut di pedesaan dengan kerja pokoknya mengenai reforma agraria dan hak atas pangan. Henry Bernstein berpikir melalui tulisannya yang dalam Bahasa Inggrisnya berjudul, *Food Sovereignty "as peasant way": a sceptical view* atau terjemahan bebasnya “Kedaulatan Pangan “*a la* Petani Kecil” : Suatu Pandangan Skeptis”. Sementara menurut kami, kedaulatan pangan adalah suatu pandangan strategis dan jalan kemerdekaan bagi petani untuk keluar dari himpitan neoliberal yang diskriminatif dan bias gender.

Tidak hanya kami di Bina Desa yang hampir 40 tahun berjibaku dalam kemiskinan akut pedesaan Indonesia yang bertemali dengan ketimpangan kelas sosial dan gender plus pengalaman mengunjungi berbagai belahan dunia di selatan maupun utara. Menjadi saksi betapa perempuan,

petani kecil, petani keluarga yang sejak ratusan tahun telah menghidupi dunia, ikut dalam perjalanan peradaban, sekaligus yang pertama kali digilas oleh peradaban itu sendiri. Era 1990-an tepatnya 1996, secara terbuka dan massive gerakan tani dunia mengemukakan jalannya sendiri (*peasant way*) untuk menentukan nasibnya dan keberlangsungan umat manusia.

Dalam upaya mengatasi kelaparan, *World Food Summit* (WFS) 1996 mengeluarkan berbagai pandangan dan rencana kerja yang harus di implementasikan seluruh negara-negara yang menjadi anggotanya. Di antara program tersebut adalah dikeluarkannya resolusi nomor 176 tahun 1996 yang isinya menjadikan hari kelahiran PBB FAO pada tanggal 16 Oktober sebagai HARI PANGAN SEDUNIA, dan dijalankannya suatu konsep Ketahanan Pangan (*Food Security*) sebagai suatu upaya untuk mengatasi bencana kelaparan yang menimpa dunia.

Pada *World Food Summit* yang diselenggarakan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) bulan November 1996 di Roma, para pemimpin negara/pemerintah telah mengikrarkan kemauan politik dan komitmennya untuk mencapai ketahanan pangan serta melanjutkan upaya menghapuskan kelaparan di semua negara anggota dengan mengurangi separuhnya jumlah penderita kekurangan pangan pada tahun 2015. Pada saat itu FAO mencatat terdapat 800 juta dari 5,67 milyar penduduk dunia yang menderita kurang pangan, di antaranya 200 juta balita menderita kurang gizi terutama energi dan protein. Revolusi hijau, revolusi putih, dan revolusi pangan lain ternyata bukan jawaban. Jumlah rakyat lapar di dunia malah meningkat, menembus angka 920 juta rakyat per 2006, bahkan tahun 2009 orang kelaparan dan kurang gizi mencapai 1,02 miliar.

Dalam keadaan demikianlah, gerakan petani kecil dunia *La Via Campesina* tentunya dengan dukungan berbagai gerakan sosial lainnya membawa pesan penting, Kedaulatan Pangan (*food sovereignty*), yang mengungkapkan prinsip-prinsip praproduksi, produksi, distribusi dan konsumsi yang diinginkan rakyat kecil. Hal ini juga berkaitan untuk memberi alternatif dari konsep ketahanan pangan yang selama ini dikooptasi dengan model ekonomi politik neoliberal (*Achmad Yakub, 2009*)

Gegap gempita kedaulatan pangan mengalami dinamika yang sedemikian mendalam. Berbagai praktek dan perumusan di hampir semua benua dikompilasikan. Puncak keduanya adalah pertemuan *World Food Sovereignty Summit* pada tahun 2007 di Desa Nyeleni, Selingue, Mali ¹, saat itu lebih dari 500 orang, perwakilan dari 80 negara dari berbagai organisasi petani, nelayan, masyarakat adat, tuna kisma, pekerja pedesaan, migran, peternak, penggembala, pemuda, perempuan, konsumen, lingkungan dan urban menyatakan tekadnya untuk mewujudkan kedaulatan pangan (*La Via Campesina, 2007*). Pertemuan tersebut juga menyepakati bahwa kedaulatan pangan mengakui kontribusi perempuan dalam produksi pangan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat. Pengakuan ini sekaligus menjadi strategi merubah kondisi perempuan petani di seluruh dunia yang selama ini dibuat tidak terlihat oleh masyarakat patriarkhi.

Kali ini ditantang dengan konsep, paradigmatiknya kedaulatan pangan apakah mungkin dan berdasar. Padangan *skeptic* Henry Bernstein ini muncul sejak awal tulisannya yang simpatik pada satu elemen kunci kedaulatan

¹ Nyeleni sendiri bagi masyarakat di Mali dan sebagian Afrika dikenal sebagai perempuan petani, dewi kesuburan yang bertani dan memberikan makan manusia.

pangan, yakni kritik komprehensif atas korporasi industri pertanian. Namun pada dua elemen berikutnya, begitu skeptis yakni terkait advokasi jalan petani (*peasant way*) sebagai basis bagi keadilan pangan berkelanjutan. Ini disebabkan bahwa kedaulatan pangan meletakkan petani (*peasant*), dengan klaim bahwa petani pemilik lahan sempit (*small producers*) menjalankan pertanian agroekologi yang dipahami sebagai pertanian yang menggunakan input dan tenaga kerja yang rendah- dapat memberikan makan dunia. Hal ini kemudian terkait dengan argumentasi bahwa kedaulatan pangan tidak mampu membangun program yang dapat dijalankan (elemen ketiga), yakni sebagai sebuah program untuk menghubungkan aktivitas pertanian skala kecil dengan kebutuhan pangan bagi kelompok non petani yang jumlahnya terus bertambah, baik secara jumlah dan kontribusinya terhadap proporsi dalam populasi dunia.

Awalnya kami merasa penulis terjebak pada teori Malthus, namun ketika ditelaah lebih dalam komposisinya justru lebih mendalam. Bantahan-bantahan selanjutnya seakan menyayat kerja-kerja dalam ranah kedaulatan pangan selama ini. Pendekatan ilmiahnya sejak dari sejarah pentahapan rezim pangan dunia 1870. Dalam konteks Indonesia, berubahnya formasi kapital yang sebelumnya dikuasai penuh oleh kerajaan Hindia Belanda dengan politik ekonomi liberal, *agrarische wet*. Di dunia, formasi ini mempunyai konsekuensi besar berubahnya tatanan ekonomi dan politik yang lebih liberal. Kemudian berturut-turut dinamis perubahannya dari tahun 1914, 1970-an dengan revolusi hijau, bangkitnya globalisasi neoliberal hingga kini. Bahkan Bernstein mengulik-ngulik berbagai cerita perlawanan petani yang ditulis oleh Erick

Wolf dalam *Peasant Wars of the Twentieth Century* (1969). Serta tulisan yang cukup populer bagi kita di Indonesia yakni perlawanan sehari-hari kaum tani oleh James Scott tahun 1970an. Kami sarankan agar para pembaca tidak terintimidasi oleh kutipan-kutipan dan sumber-sumber ilmiah yang disajikan oleh Bernstein dalam tulisannya, agar kita tetap jernih.

Bahkan penulis melucuti semua, siapa yang dimaksud dengan petani (*peasant*), definisi Borras dan Franco terkait kepentingan kelas buruh tani dan buruh pedesaan juga diungkap. Kita dilucuti juga dengan pertanyaan apakah semua petani sama (melakukan hal yang sama), demikian ini untuk menyangsikan kepeloporan baru dan keberadaan petani yang menurutnya sudah tidak ada lagi (lihat Bernstein 2010a). Argumentasi kita mengenai kelokalan dan petani subsisten dipatahkan dengan istilah penghasil komoditas kecil (*petty commodity producers*). Intinya, ingin menyebutkan bahwa semua sudah masuk dalam lingkaran besar mesin ekonomi politik neoliberal. Dalam hati kami membantah, jangan-jangan penulis tidak atau belum tahu masyarakat baduy atau kasepuhan dan komunitas-komunitas lain di Indonesia yang telah mampu membangun sistem pangannya sendiri. Demikian juga komunitas desa, sebagai basis perjuangan Bina Desa, diluluhlantakkan sebagai pelanggeng harmonisasi benturan antar kelas sosial di pedesaan.

Satu hal penting tetapi belum dilihat secara kritis oleh Bernstein adalah tentang perempuan petani dalam kedaulatan pangan; bagaimana posisi, peran dan kontribusinya dalam penyediaan pangan keluarga petani yang subsisten dan masyarakat serta berbagai inisiatif dan perjuangannya untuk keluar dari pusaran ekonomi politik

neoliberal yang patriarkhis. Petani masih dilihat secara umum, laki-laki. Atau karena belum ada perspektif ini sehingga Bernstein bersikap skeptis dalam memandang kedaulatan pangan?.

Bagi kami, membaca alam pikiran dan kekritisan Henry Bernstein ini terutama membaca judulnya, awalnya memancing kita untuk menyajikan data-data mengenai efektif, produktif dan efisiennya pertanian kecil atau pertanian keluarga dengan studi berbagai Negara². Demikian juga betapa kedaulatan pangan dengan pendekatan hak atas pangan yang telah mengubah cara pandang dunia atas pangan. Namun setidaknya perlu disajikan bahwa dinamika kedaulatan pangan pasca Nyeleni Forum begitu pesat, dengan prinsip-prinsip berikut ini (*Achmad Yakub 2009*);

1. Pangan sebagai Hak Asasi Manusia setiap orang harus memiliki akses terhadap pangan yang aman, bergizi dan layak secara budaya secara cukup baik kuantitas maupun kualitasnya demi menjamin kehidupan yang sehat sebagai manusia yang bermartabat. Setiap bangsa hendaknya mendeklarasikan bahwa akses terhadap pangan merupakan hak konstitusional dan menjamin pengembangan sektor primer untuk menjamin realisasi secara nyata dari hak mendasar ini (*right to food*).
2. Pembaruan Agraria. Reforma Agraria sejati diperlukan untuk menyediakan tanah bagi petani kecil dan buruh tani-khususnya perempuan- menjamin kepemilikan

² FAO, IFAD, ETC Group mencatat bahwa 70% produksi pangan disediakan oleh petani keluarga kecil, petani kecil lebih produktif dan berkelanjutan dalam unit lahan dan penggunaan energy. Hampir 40% penduduk di bumi ini tergantung dari *family farming*, peran perempuan tani oleh UNIFEM mencatat setidaknya 60%-80%.

dan control atas tanah yang mereka garap dan mengembalikan hak teritori masyarakat adat. Hak atas tanah harus bebas dari diskriminasi gender, agama, suku bangsa, kelas sosial atau ideologi, tanah hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang menggarapnya.

1. Melindungi Sumber Alam. Kedaulatan Pangan terkait pula dengan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama tanah, air, benih, dan hewan ternak. Orang-orang yang menggarap tanah harus memiliki hak untuk menjalankan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan melindungi keaneka ragaman hayati dan bebas dari batasan-batasan hak atas kekayaan intelektual. Hal ini hanya bisa dilaksanakan dengan landasan ekonomi yang berkelanjutan dengan jaminan pengolahan lahan, kondisi tanah yang sehat, dan bebas dari bahan-bahan agro-kimiawi.
2. Pengaturan Ulang Perdagangan Pangan. Pangan ialah pertama dan terutama merupakan sumber gizi dan hanya merupakan barang sekunder dalam perdagangan. Kebijakan pertanian nasional harus mengutamakan produksi untuk pemenuhan konsumsi domestik dan swasembada pangan. Impor pangan tidak boleh mengusir produksi lokal ataupun menekan harga pangan.
3. Mengakhiri Kelaparan Dunia. Kedaulatan pangan dihancurkan oleh institusi multinasional dan spekulasi modal. Meningkatnya kontrol perusahaan multinasional terhadap kebijakan pertanian telah difasilitasi oleh kebijakan-kebijakan ekonomi dari organisasi multinasional seperti WTO, Bank Dunia

dan IMF. Regulasi dan pajak terhadap spekulasi modal serta penegakan kode etik yang ketat bagi perusahaan-perusahaan transnasional sangat diperlukan.

4. Perdamaian dan Solidaritas Sosial. Setiap orang berhak untuk bebas dari kekerasan. Pangan tidak boleh digunakan sebagai senjata. Meningkatnya level kemiskinan dan marjinalisasi di pedesaan bersama dengan meningkatnya tekanan terhadap minoritas etnis dan masyarakat adat, memperbesar situasi ketidakadilan dan keputusasaan. Pengusuran yang terus terjadi, urbanisasi yang dipaksakan, penindasan dan meningkatnya insiden-insiden terkait rasisme khususnya terhadap petani kecil merupakan hal yang tidak bisa terus ditoleransi dan dibiarkan.
5. Kontrol Demokratis. Petani kecil harus memiliki akses langsung terhadap perumusan kebijakan pertanian pada semua level. PBB dan organisasi terkait lainnya harus menjalani proses demokratisasi untuk memastikan hal itu terwujud. Setiap orang berhak atas informasi yang jujur dan akurat serta proses pengambilan keputusan yang terbuka dan demokratis. Hak-hak ini menjadi dasar dari transparansi dan akuntabilitas yang baik serta partisipasi yang setara dalam ekonomi, politik dan kehidupan sosial, bebas dari segala bentuk diskriminasi. Perempuan di pedesaan pada khususnya harus diberi kesempatan untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam isu pangan dan pedesaan

Sebagai penutup kata pengantar ini, kami hanya ingin memberi kabar gembira tentang petani Cianjur yang berhimpun dalam Paguyuban Petani Cianjur (PPC), Jawa

Barat, Indonesia. Bahwa cerita kelaparan, kemiskinan dan tuna tanah menjadi kontekstual dengan perjuangan kedaulatan pangan oleh laki-laki dan perempuan. Pendekatan mikro petani ini setidaknya telah melahirkan orang-orang yang tidak lapar lagi, mampu menyekolahkan anak, membayar zakat, bahkan secara berkelanjutan. Jadi intelektual seperti Henry Bernstein pun sudah menyadari diakhir tulisannya-- walau simpati pada pengetahuan empiris seperti di Cianjur-- bahwa resikonya adalah teori besarnya ini tidak begitu mendapat perhatian khusus bagi praktisi, karena mengorbankan pesimisme intelektual. Bagi kami akal pikiran skeptis ini perlu untuk kerja praktek dan membangun harapan global yang lebih besar lagi.

Oktober 2014

**Salam
Bina Desa**

Adakah Jalan untuk Kedaulatan Pangan dan Pembaruan Agraria di Indonesia?

Dianto Bachriadi

Dalam Pemilihan Presiden 2014, kedua pasang kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden sama-sama mengemukakan pentingnya Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik. Bahkan tim pendukung salah satu pasangan menyatakan kandidat yang mereka usung akan memperjuangkan kedaulatan pangan dan *reforma agraria*, meskipun pada saat yang sama anggota tim pakar dari tim sukses tersebut tidak menyatakan secara jelas apakah ‘kedaulatan pangan’ (*food sovereignty*) atau ‘ketahanan pangan’ (*food security*) yang akan diperjuangkan oleh sang kandidat (Gatra 2014).

‘Ketahanan pangan’ (*food security*) atau ‘kedaulatan pangan’ (*food sovereignty*)? Apa bedanya? Mengapa muncul kedua istilah ini? Satu karya Henry Bernstein (2013) yang terjemahannya menjadi tulisan pokok dalam buku ini memang tidak memberikan penjelasan secara mendetail atas perbedaan kedua istilah tersebut.¹ Bernstein dalam

1 Tulisan ini pertama sekali muncul sebagai paper dalam konferensi internasional tentang “dialog kritis tentang kedaulatan pangan” (*Food Security: A Critical Dialogue*) yang diselenggarakan di Universitas Yale, AS tahun 2013. Tulisan ini kemudian diterbitkan kembali secara utuh dengan judul “*Food sovereignty via the ‘peasant way’: a sceptical view*”, *Journal of Peasant Studies* 41(1), 2014, hal. 1-33.

tulisannya itu memang tidak berpretensi untuk membedah perbedaan-perbedaan atau pun persamaan-persamaan dari kedua konsep dan segala implikasi politik maupun ilmiah. Dalam tulisan itu Bernstein hendak menyajikan suatu analisa kritis terhadap konsepsi 'kedaulatan pangan' yang sejak pertengahan tahun 90-an telah menjadi isu baru yang menantang kemapanan gagasan 'ketahanan pangan'. Bernstein menyoroti keajegan konsepsi 'kedaulatan pangan' secara epistemologis dan praksis dari perspektif ekonomi-politik produksi pangan di tengah perkembangan kapitalisme global saat ini.²

Meskipun saat ini telah banyak kajian dan tulisan – baik yang sifatnya ilmiah, semi-ilmiah, maupun lebih berupa propaganda – dihasilkan terkait dengan 'kedaulatan pangan', gagasan ini belum menjadi suatu paradigma pengetahuan ilmiah yang mantap. Wittman (2011: 88), misalnya, lebih melihatnya sebagai suatu "pengetahuan ilmiah yang sedang mentas" ("*emergent science*") yang bersumber dari praktek dan produksi pengetahuan kelompok-kelompok masyarakat akar rumput yang dipromosi, dikampanyekan dan diadvokasi melalui proses politik gerakan sosial.

Sebaliknya, sebagai sebuah konsepsi ilmiah, 'ketahanan pangan' sudah lebih mapan.³ 'Ketahanan pangan' sebagai

2 Satu tulisan yang melanjutkan lebih jauh analisa kritis Bernstein dan melihat upaya-upaya praktis penerapan konsepsi 'kedaulatan pangan' sebagai 'optimisme romantis tentang lika-liku dinamika pengetahuan agro-ekologi yang dipandu oleh pengalaman petani (*farmer-driven agroecological knowledge*) yang kurang mengindahkan ilmu pengetahuan modern disajikan dengan baik oleh Jansen 2014.

3 Beragam kajian ilmiah dari berbagai perspektif dan ilmu pengetahuan telah dilakukan terkait dengan tema 'ketahanan pangan' dapat dengan mudah ditemukan dan diakses, termasuk beberapa jurnal ilmiah yang memiliki fokus pada isu ini, seperti misalnya: *Agriculture & Food Security*, sebuah jurnal

istilah yang pertama kali muncul pada Konferensi Pangan Dunia (*World Food Conference*) tahun 1974, menunjukkan suatu kondisi di mana adanya ketidakmampuan suatu negara untuk mengelola dan memenuhi peningkatan konsumsi pangan serta mengelola fluktuasi harga dan produksi pangan yang seringkali terjadi yang dapat berujung pada munculnya kelaparan di tengah masyarakat. Pada tahun 1996 ketika berlangsung *World Food Summit* di Roma, secara formal pengertian 'ketahanan pangan' dan upaya-upaya untuk menerapkannya diperluas tidak hanya pada tingkat negara-bangsa atau tataran nasional, tetapi hingga pada tataran rumah tangga dan individu.

Ringkasnya dalam *World Food Summit* 1996 tersebut dinyatakan "ketahanan pangan adalah kondisi manakala semua orang, setiap saat, memiliki akses ekonomi dan fisik terhadap pangan dan nutrisi yang memadai dan aman untuk memenuhi kebutuhan fisiknya maupun pilihannya terhadap makanan yang hendak dikonsumsi agar dapat melakukan kehidupan secara aktif dan sehat" (FAO 2008: 1). 'Ketahanan pangan' tidak hanya membicarakan pangan yang menyediakan karbohidrat, lemak dan protein untuk energi saja, termasuk vitamin dan mineral, tetapi juga

elektronik yang terbuka diakses oleh semua pihak (*open access*) yang dikelola oleh BioMed Central; *Food Security*, yang dikelola oleh penerbit Springer; dan *Global Food Security* yang dikelola oleh penerbit Elsevier. Jurnal-jurnal ilmiah tersebut menyajikan beragam tulisan dari berbagai sudut pandang ilmu, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, biologi, pertanian, teknologi pangan, gizi dan kesehatan, maupun kajian-kajian multi disiplin. Sebuah proyek dari Jurusan Ekonomi Pertanian, Universitas Katolik Leuven (*Department of Agricultural Economics, Catholic University of Leuven*) Belgia menerbitkan satu panduan untuk mendiagnosa kondisi ketahanan pangan pada satu masyarakat (lihat Beerlandt dan Serneels 1997). Kajian-kajian, tulisan-tulisan, dan publikasi-publikasi tersebut telah membuat 'konsepsi ketahanan' (*food security*) berulang-ulang diuji secara ilmiah yang membuatnya mantap sebagai sebuah paradigma ilmiah (*scientific paradigm*).

meliputi ketersediaan dan keterjangkauan air minum yang bersih (Leisinger, Schmitt, & Pandya-Lorch 2002: 58).

Satu lembaga PBB yang berurusan dengan pembangunan pertanian – IFAD, International Fund for Agricultural Development – sejak awal tahun '90-an telah menegaskan bahwa 'ketahanan pangan' berkaitan dengan pangan yang dimakan oleh individu dan ketersediaan pangan pada tataran rumah tangga, sub-nasional, dan nasional. "Suatu rumah tangga dinyatakan aman pangan (*food secured household*) apabila memiliki ketersediaan pangan yang menjamin kebutuhan makan minimal untuk setiap anggotanya, yang berkaitan dengan ukuran tubuh dan berat badannya, jenis kelamin, pekerjaannya, dan khususnya untuk perempuan berkaitan dengan status kehamilan dan menyusui" (Alamgir & Arora 1991: 6).

Jadi, dalam pengertian ini, 'ketahanan pangan' adalah kondisi di mana ada akses untuk semua orang atas pangan dan nutrisi yang sehat, yang tentu saja akan sangat berkaitan dengan persoalan produksi, penyimpanan dan penyediaan, serta perdagangannya baik di tingkat lokal, nasional dan global. Ada empat dimensi dalam pengertian 'ketahanan pangan' (*food security*), yakni: ketersediaan, akses, penggunaan pangan, dan stabilitas dari ketiganya (FAO 1996 dan 2008). Untuk membuatnya menjadi konsepsi yang operasional, berbagai lembaga riset, pemerintahan hingga lembaga-lembaga internasional dan multilateral telah mengembangkan beragam perhitungan dan kemudian mekanisme untuk mengukur dan memperhitungkan terpenuhinya 'ketahanan pangan' maupun untuk mengukur dan mencari penyebab terjadinya kondisi 'ketidaktahanan pangan' (*food insecurity*)

dan kemudian kelaparan yang dialami oleh seseorang, rumah tangga tertentu, komunitas hingga pada tataran yang lebih luas lagi (nasional, regional dan global).⁴

Cara pandang terhadap 'ketahanan pangan' tentu berimplikasi pada pembentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertanian dan penyediaan pangan. Dengan cara pandang seperti di atas, kebijakan pertanian pangan kemudian lebih banyak diarahkan pada kegiatan produksi pangan secara massal dan tersedianya akses orang per orang, keluarga per keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan atas produk pangan yang dikembangkan melalui perdagangan (pangan didistribusi melalui mekanisme perdagangan). Mekanisme perdagangan menjadi cara utama untuk dapat mengakses pangan yang layak. Manakala akses terhadap pangan yang layak ini berkurang atau hilang, maka situasi kelaparan atau kurang gizi akan terjadi; dan pilihan jalan keluarnya adalah membuka keran akses lebih besar atau penyediaan pangan tambahan untuk mengatasi kondisi kelaparan dan kekurangan gizi tersebut. Dalam hal ini maka Negara serta lembaga-lembaga bantuan sosial dan kemanusiaan baik nasional maupun internasional berperan penting untuk membuka keran tersebut dengan penyediaan pangan murah dan/atau gratis serta perbaikan infrastruktur didistribusi pangan. Dengan kata lain, tugas Negara untuk menjaga ketahanan pangan adalah mengembangkan fasilitas untuk produksi pangan massal, pengaturan perdagangan pangan, dan pada titik terakhir menjadi lembaga penyumbang pangan yang tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga bantuan sosial dan kemanusiaan.

4 Lihat misalnya Beerlandt dan Serneels 1997 yang merupakan panduan untuk mendiagnosa kondisi ketahanan pangan pada suatu masyarakat.

Para pengkritik 'ketahanan pangan' menganggap konsepsi ini lebih melihat masalah ketidaktersediaan juga ketidakcukupan pangan dan kelaparan serta perdagangan pangan dari sudut pandang akses terhadap pangan, ketimbang melihatnya dari sudut pandang adanya kontrol terhadap sistem produksi dan konsumsi. Upaya-upaya untuk membangun sistem ketahanan pangan yang ajeg dengan cara mengembangkan sistem pangan lokal yang berkelanjutan dan mandiri tidak menjadi perhatian dan konsentrasi penerapan kebijakan ketahanan pangan yang kemudian menjadi sangat terkait dengan mekanisme produksi dan perdagangan pangan dari tingkat lokal hingga global. Masalah pangan direduksi menjadi persoalan distribusi dan perdagangan, bukan diperlakukan sebagai persoalan hak (Wittman 2011: 91). Dalam kerangka penegakan dan pemajuan hak asasi manusia saat ini, disadari bahwa pemenuhan hak atas pangan (*right to food*) dapat terwujud jika ada jaminan tegaknya kedaulatan pangan (Wittman 2011: 91-92).

'Kedaulatan pangan' (*food sovereignty*) sebagai sebuah konsep tandingan juga muncul pada saat berlangsungnya *World Food Summit* 1996 di Roma. Tetapi penggagasnya bukan lah perwakilan-perwakilan dari negara-negara anggota FAO, lembaga-lembaga riset maupun akademisi *mainstream*, melainkan La Via Campesina – sebuah organisasi gerakan tani internasional yang dibentuk sejak tahun 1993.⁵ Konsep tandingan ini dikemukakan oleh La Via Campesina dalam rangka menantang Rezim 'ketahanan pangan' (*food security*) yang selama ini dianut,

5 Mengenai hal ini lihat juga misalnya Paarlberg 2013: 216-218. Mengenai La Via Campesina, selain dapat memeriksa www.viacampesina.org lihat juga misalnya: Borras Jr. 2004 dan Desmarais 2007.

baik oleh pendukung neoliberal maupun *developmentalist*, sebagaimana tercermin dalam pandangan dan operasi sejumlah organisasi seperti misalnya: Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO, *Food and Agriculture Organization*), Program Pangan Dunia PBB (WFP, *World Food Program*), Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO, *World Trade Organization*) dan Dana Keuangan Internasional (IMF, *International Monetary Fund*). Di antara organisasi-organisasi tersebut, lembaga-lembaga PBB – seperti FAO, IFAD, dan WFP – dan Bank Dunia telah memainkan peran langsung dan integral dalam mengembangkan kebijakan ketahanan pangan (Schanbacher 2010: 2).

Penolakan kelompok-kelompok gerakan sosial terhadap konsepsi dan praktek 'ketahanan pangan' tercermin dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI)⁶ selaku anggota Via Campesina dari Indonesia: "ketahanan pangan (*food security*) telah gagal untuk menjadi jalan keluar dari masalah kelaparan di dunia, dan hanya memperkaya perusahaan-perusahaan transnasional serta masyarakat yang hidup di negara maju" (FSPI, 2003, p. 6). Pandangan ini hendak menantang kenyataan bahwa Rezim pangan dunia yang saat ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan penghasil maupun distributor dan perdagangan pangan yang dalam prakteknya justru telah memperparah krisis pangan dunia selain merusak lingkungan secara global dan menciptakan

6 Serikat Petani Indonesia (SPI) yang pada mulanya bernama Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) adalah gabungan kelompok-kelompok gerakan petani dan pro reforma agraria di Indonesia yang terkonsolidasi menjadi satu organisasi pada tahun 1998. Mengenai sejarah pembentukan dan kiripah FSPI/SPI selain dapat dilihat pada www.spi.or.id lihat juga misalnya: Bachriadi 2010: 239-277.

ketidakadilan sosial.⁷ ‘Kedaulatan pangan’ kemudian menjadi konsep sentral gerakan yang secara sistematis menantang Rezim pangan yang dikuasai korporasi dan menyodorkan alternatif Rezim pangan yang berbasis pada hak-hak petani, otonomi masyarakat dan keadilan agraria (lihat Wittman 2011, Schanbacher 2010: 55-120, dan McMichael 2013).

La Via Campesina memberi penekanan bahwa pangan bukan lah komoditas tetapi hak asasi manusia, sehingga masalah produksi dan distribusi pangan adalah persoalan keberlanjutan hidup orang yang menjadi persoalan publik dan kedaulatan nasional. “Kedaulatan berarti adanya akses terhadap pangan bagi semua orang di semua negara, termasuk hak untuk menghasilkannya ... menghasilkan pangannya sendiri” (Stedile & de Carvalho 2011: 23). Lebih lanjut organisasi gerakan ini menegaskan bahwa “jika produksi dan distribusi pangan adalah bagian dari kedaulatan masyarakat, maka hal itu tidak bisa dinegosiasikan dan tidak dapat bergantung kepada kemauan politik atau praktek pemerintahan negara lain” (Stedile & de Carvalho 2011: 23).

Sebagai sebuah konsep yang dibuat oleh kelompok gerakan sosial, prinsip ‘kedaulatan pangan’ berseberangan dengan politik neo-liberal dan sistem pangan berbasis korporasi. Sebagai konsep alternatif, konsep ini menawarkan strategi untuk melawan dan membongkar sistem pangan yang tidak adil dan tidak berkelanjutan yang dampaknya terutama adalah kekurangan gizi kronis dan meningkatnya obesitas dengan pesat (*Forum for Food*

7 Banyak kajian yang telah dilakukan dan diterbitkan di seputar isu Rezim pangan yang dikuasai oleh korporasi dan segala dampaknya pada masyarakat; periksa misalnya: George 1977 dan 1983, Watkins 1995, Charles 2001, Winders 2009, Fritz 2011, dan Paarlberg 2013.

Sovereignty 2007a). Kedaulatan Pangan menekankan pada hak dan otonomi warga untuk mengembangkan sistem pangannya sendiri dan menolak gagasan “pangan dapat berasal dari mana saja” (“*food from somewhere*”) (Wittman 2011: 90). Gagasan ‘kedaulatan pangan’ (*food sovereignty*) menegaskan kembali hak-hak masyarakat atas otonominya dalam memutuskan apa yang hendak mereka produksi dan konsumsi (Meneses 2001: 30); karena itu, produksi pertanian lokal, pemeliharaan hak petani untuk menghasilkan pangan dan jaminan hak-hak masyarakat untuk membuat pilihan terhadap kebijakan pertaniannya sangat diutamakan (Baumüller & Tansey 2008: 176). Termasuk juga hak atas perlindungan dan pengaturan produksi pertanian nasional dan untuk melindungi pasar domestik dari aksi *dumping* akibat kelebihan produk pertanian dan harga produk impor yang rendah dari luar negeri. Gerakan kedaulatan pangan akan merebut dan mengembalikan sistem pangan lokal yang demokratis (Windfuhr & Jonsen 2005).

Gagasan awal ‘kedaulatan pangan’ muncul pada saat Konferensi Internasional ke-2 dari Via Campesina tahun 1996 di Tlaxcala, Meksiko.⁸ Salah satu Kelompok Kerja (pokja) dalam konferensi ini adalah pokja yang merumuskan gagasan ‘kedaulatan pangan’ (*food sovereignty*). Pokja ini menyimpulkan bahwa model ekonomi neoliberal

8 Penulis ikut hadir dalam konferensi ini mewakili Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama dengan 4 orang lainnya, termasuk Henri Saragih yang pada saat itu mewakili Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU) dan (alm.) Abah Afrawi Nuh yang mewakili Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), yang menjadi delegasi dari Indonesia. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai pintu gerbang bergabungnya gerakan tani Indonesia ke dalam Via Campesina, organisasi gerakan petani global yang sangat kritis terhadap globalisasi neo-liberal saat ini. Mengenai hal ini lihat misalnya Bachriadi 2010: 225-276.

telah menyingkirkan petani-petani kecil dan menengah atas kontrol terhadap tanah, air, bibit, dan sumberdaya alam dan menggantinya dengan kontrol oleh korporasi. Untuk itu kemudian pokja ini menyimpulkan bahwa “kedaulatan pangan secara sederhana diartikan sebagai menjamin tanah, air, bibit dan sumberdaya alam dikontrol oleh petani-petani kecil dan menengah; di mana hal ini terkait langsung dengan demokrasi dan keadilan” (La Via Campesina 1996: 21). Selanjutnya dalam konferensi ini ditegaskan juga beberapa prinsip dari kedaulatan pangan; beberapa di antaranya adalah: (1) pangan adalah hak asasi manusia yang mendasar; (2) pangan adalah sumber nutrisi dan hanya untuk tujuan berikutnya menjadi barang perdagangan; (3) perempuan memainkan peran sentral dalam kedaulatan pangan; (4) setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan sebenarnya terkait dengan pangan serta terlibat dalam proses pembentukan kebijakan pangan dan pertanian yang demokratis; (5) menjauhkan kegiatan produksi pertanian dari kecenderungan hanya untuk ekspor; (6) setiap petani memiliki hak untuk menghasilkan pangan secara berkelanjutan yang diawali dengan adanya jaminan tenurial, ketersediaan tanah yang baik, dan pengurangan bahan kimia; (7) kontrol yang demokratis atas sistem pangan adalah hal yang esensial; (8) perdamaian adalah pra kondisi yang diperlukan untuk kedaulatan pangan; (9) pemerintah harus mengalokasi anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan pertanian yang seharusnya menjadi sektor utama (La Via Campesina 1996: 22).

Meskipun sejak tahun 1996 berkembang banyak pengertian dan definisi ‘kedaulatan pangan’, hingga saat ini inti dari definisi tersebut masih sama (Schanbacher

2010: 54, dan McMichael 2014). Arti ‘kedaulatan pangan’ yang sering digunakan saat ini, sebagaimana yang dimaksud oleh kelompok-kelompok gerakan sosial telah dirumuskan kembali pada tahun 2007 dalam Forum Kedaulatan pangan (*Forum for Food Sovereignty*) yang diselenggarakan di tepi Danau Sélingué, Mali di Afrika Utara. Lebih dari 500-an delegasi mewakili kelompok masyarakat pedesaan, kelompok-kelompok gerakan sosial pedesaan dan pro petani, serta organisasi non pemerintah (NGO) dari 98 negara menghadiri forum ini.⁹ Rumusannya adalah sebagai berikut:

Kedaulatan Pangan adalah hak rakyat untuk sehat dan secara budaya mendapatkan pangan yang cocok melalui metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan hak mereka juga untuk menentukan makanan dan sistem pertaniannya. Ini menempatkan siapa saja yang memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi pangan sebagai jantung dari sistem pangan dan kebijakan, ketimbang tuntutan pasar dan korporasi. Termasuk untuk membela kepentingan pergantian generasi selanjutnya. Konsep ini juga menawarkan strategi untuk melawan dan membongkar Rezim korporasi perdagangan dan Rezim pangan saat ini, dan arahnya ke sistem pangan, pertanian, peternakan (pastoral) dan perikanan ditentukan oleh produser lokal. Kedaulatan Pangan memprioritaskan kepentingan ekonomi dan pasar lokal dan nasional serta pemberdayaan petani dan keluarganya yang melakukan kegiatan pertanian, nelayan

9 Di antaranya adalah: Via Campesina, ROPPA (Jaringan Organisasi Petani dan Penghasil Pangan di Afrika Barat), *the World March of Women*, *the World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers*, *the World Forum of Fisher Peoples*, *the International Planning Committee of Food Sovereignty*, *NGO Members of the Food Sovereignty Network*, *Friends of the Earth*, dan Serikat Petani Indonesia.

tradisional, para peternak yang bergantung pada padang rumput. Selain itu Kedaulatan Pangan memprioritaskan produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi. Kedaulatan Pangan mempromosikan perdagangan yang transparan yang menjamin keadilan pendapatan semua orang dan hak konsumen untuk mengontrol makanan dan nutrisi mereka. Juga menjamin bahwa hak untuk menggunakan dan mengelola lahan, wilayah, air, bibit, ternak dan keragaman yang mereka miliki tetap berada di tangan mereka yang memproduksi pangan. Kedaulatan Pangan mengisyaratkan hubungan sosial yang baru yang bebas dari tekanan dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, antar orang, kelompok ras, kelas sosial dan perbedaan generasi (*Forum for Food Sovereignty* 2007b: 9).¹⁰

Ringkasnya, dalam rumusan di atas 'kedaulatan pangan' memiliki enam pilar, yakni: (1) fokus pada pangan untuk rakyat, (2) penghargaan pada produser pangan, (3) pengembangan sistem pangan lokal, (4) menempatkan kontrol produksi pangan di tingkat lokal, (5) membangun pengetahuan dan keahlian, dan (6) bekerja selaras dengan alam (*Forum for Food Sovereignty* 2007b: 76). Forum tersebut mendesak agar keenam pilar tersebut harus dimasukkan dalam kerangka kebijakan atau praktek-praktek yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan pangan (La Via Campesina 2008: 5-6; Baumuller & Tansey 2008: 177-178). Sedangkan menurut Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Indonesia kedaulatan pangan hanya memiliki 4 pilar, yakni: reforma agraria, pertanian berkelanjutan, perdagangan berkeadilan (*fair trade*), dan

10 Untuk perbandingan, lihat juga NGO/CSO Forum for Food Sovereignty 2002, Menezes 2001: 29-30, dan La Via Campesina 2008: 2.

pangan lokal.¹¹ Menurut Wittman, “meskipun sering dianggap ‘anti perdagangan’, gerakan kedaulatan pangan sesungguhnya terlibat jauh dalam berbagai perbincangan tentang bentuk-bentuk hubungan perdagangan yang terbaik yang memenuhi prinsip-prinsip sosial, ekonomi, politik dan lingkungan dari paradifna pangan alternatif” (Wittman 2011: 94).

Dalam konteks Indonesia, menurut Serikat Petani Indonesia (SPI) yang aktif melakukan kampanye kedaulatan pangan, tujuan utama “memajukan gagasan kedaulatan pangan adalah dalam rangka menghasilkan dan menyediakan pangan yang cukup tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk menjawab problem kelaparan di dunia” (FSPI 2003). SPI menolak pendekatan ‘*symptomatic*’ dari lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia maupun global untuk menjawab persoalan kelaparan dan kekurangan pangan, di mana aksi hanya dilakukan ketika persediaan pangan sudah menipis dan kelaparan sudah terjadi; tidak melakukan upaya penguatan kapasitas masyarakat lokal untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. SPI selain sangat peduli dengan persoalan ketidakmampuan Negara mendorong peningkatan produksi pangan, khususnya beras, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga sangat tajam mengkritik pemerintah yang selalu menyediakan fasilitas bagi kegiatan agribisnis skala besar yang mengancam kemampuan masyarakat untuk menghasilkan pangan. Menurut SPI, ‘ketahanan pangan’ tidak dapat tercipta jika masyarakat tidak memiliki ‘kedaulatan pangan’ (FSPI 2003: 5). Meskipun menurut Menezes, “kedaulatan pangan semata, walaupun merupakan elemen vital,

11 Mengenai KRKP lihat www.kedaulatanpangan.or.id

tidak cukup untuk menjamin terciptanya ketahanan pangan (Menezes 2001: 33). Ada hal-hal lain yang juga harus menyertainya, seperti kebijakan keadilan distribusi lahan, perdagangan yang berkeadilan, kebijakan umum pengelolaan sumberdaya alam yang tidak merusak, penghormatan kepada hak-hak budaya masyarakat lokal, termasuk kebijakan hak cipta dan *intellectual property rights*, dan sebagainya.

Gagasan SPI untuk menjadikan Indonesia dapat berswasembada pangan dan sekaligus menjadi penyedia pangan bagi dunia sangat menarik. Pertanyaan kemudian adalah cukupkah jumlah lahan dan produktivitas pertanian rakyat di Indonesia untuk mendukung penyediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia? Dari tahun ke tahun jumlah lahan pertanian yang tersedia untuk pertanian rakyat, khususnya yang digunakan untuk memproduksi pangan, tidak pernah tumbuh sebanding dengan angka pertumbuhan jumlah rumah tangga petani. Selain adanya perbedaan dalam angka pertumbuhan penduduk dan rumah tangga tani dibanding dengan angka pertumbuhan ketersediaan lahan pertanian rakyat, angka pengalihfungsian lahan pertanian aktif untuk tujuan penggunaan lain juga sangat tinggi. Dengan kata lain, jumlah lahan pertanian yang menghasilkan pangan di Indonesia sesungguhnya tidak pernah berhasil menutupi kebutuhan pangan dalam negeri sendiri, apalagi memberi pangan pada dunia.

Lahan-lahan pertanian pangan, termasuk lahan pertanian padi di Indonesia harus berkompetisi dengan pertumbuhan industri perkebunan, manufaktur, pariwisata, perumahan, *real estate* dan pembangunan kota-kota baru serta pembangunan sarana infrastruktur yang

sangat cepat yang juga membutuhkan lahan. Hasilnya dari tahun ke tahun banyak tanah-tanah pertanian, termasuk sawah beririgasi teknis, dialihfungsikan untuk tujuan penggunaan non-pertanian. Dalam bagian Penjelasan (hal. 1) dari Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2002 diperkirakan seluas 110.000 hektar per tahun lahan sawah beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Pada tahun 2005 Departemen Pertanian menyatakan sekitar 187 ribu hektar sawah – terbanyak terjadi di Pulau Jawa – beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahunnya (Departemen Pertanian RI, 2005). Sementara menurut Kepala BPN pada waktu itu, dari total 7,3 juta hektar lahan sawah beririgasi ada sekitar 42,4% atau 3,01 juta hektar yang terancam beralihfungsi ke penggunaan lain (Winoto 2005).

Pengalihan fungsi tanah pertanian, khususnya di Jawa, bagaimanapun juga menyumbang pada penurunan kemampuan penyediaan pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Pada kenyataannya, sejak kemerdekaan, pertanian pangan di Jawa menyediakan lebih dari 50% persediaan beras di Indonesia.¹² Pada kenyataannya sejak tahun '70-an hingga sekarang Indonesia mengandalkan beras impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras dalam negeri. Sebagai gambaran, misalnya, Hessian dengan menggunakan data-data dari BPS dan Deptan memberikan gambaran bahwa sejak tahun 1970 hingga 2006 rata-rata selisih

12 Lihat berbagai data statistik tentang dinamika wilayah panen dan produksi padi di Indonesia dalam Buku Statistik Tahunan Indonesia (*Statistical Year Books of Indonesia*) terbitan BPS.

konsumsi dan produksi beras dalam negeri adalah sekitar 1,1 juta ton (Hessie 2009: 64).

Pemerintah sendiri mengandalkan pangan impor untuk menutupi kekurangan persediaan pangan dalam negeri yang pada kenyataannya semakin terdorong menjadi pasar terbuka di tengah arena perdagangan bebas. Peran berbagai lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan multilateral, juga institusi dalam lingkungan PBB, yang mendukung konsep neoliberal terkait dengan pangan memainkan peranan penting dengan meletakkan berbagai tekanan kepada pemerintah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk melaksanakan kebijakan perdagangan bebas yang merugikan petani (FSPI 2003: 4 dan 2004: 47-48, dan Schanbacher 2010: 1-23).¹³ Kebijakan impor bahan pangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini pada akhirnya menurut SPI telah memaksa petani lokal harus berkompetisi dengan produk pangan impor yang memiliki harga lebih rendah, belum lagi jika barang-barang tersebut adalah hasil kebijakan perdagangan *dumping* (FSPI 2003: 3-4). Lebih jauh dari itu, kebijakan impor pangan, menurut SPI, justru menjadi penghancur dari kemampuan komunitas lokal untuk memproduksi pangan dengan cara

13 Lihat juga Amang and Sawit (2000), Arifin *et al.* (2001), Sawit (2006) dan (2007), dan Bachriadi (2005) untuk diskusi lebih lanjut tentang topic dasar komoditi pangan seperti beras dan gula di Indonesia; sementara Rachbini (2000) menjelaskan dampak LoI IMF terhadap sektor pertanian di Indonesia. La Via Campesina (2006) menguraikan beberapa analisis produksi dan perdagangan beras dari perspektif kedaulatan pangan yang dipikirkan oleh petani di Asia-Pasific. Rossett (2006) menjelaskan analisis kritis yang baik tentang peran yang keliru dari WTO untuk mengatur perdagangan bebas produksi pertanian yang memberikan dampak negatif tidak hanya dalam hal perdagangan pangannya, tetapi juga dalam hal pertanian, ekosistem, penghidupan di pedesaan dan tradisi tradisional mayoritas masyarakat dunia, yaitu masyarakat di pedesaan.

yang berkelanjutan, yang pada gilirannya justru merusak sistem ketahanan pangan itu sendiri (FSPI 2003).

Pada pertengahan tahun 2000-an, gelombang protes terhadap impor beras di Indonesia meningkat, meskipun hal itu hanya berlangsung 1-2 tahun saja. Tahun 2005, misalnya, SPI bersama dengan sejumlah organisasi gerakan sosial lainnya¹⁴ melakukan protes kepada pemerintah yang telah mengizinkan BULOG (Badan Urusan Logistik), mengimpor beras (*Tempo Interaktif* 2005a, *DetikNews* 2005, *Pembaruan Tani* 2005a).¹⁵

Pada aksi massa yang diorganisir oleh ‘Koalisi Rakyat Menggugat’ pada bulan April 2006, ada dua tuntutan peserta aksi yakni stop impor bahan pangan dan pelaksanaan kedaulatan pangan di Indonesia (*Pembaruan Tani* 2006a). Dalam demonstrasi berikutnya yang lebih besar, ribuan peserta aksi juga menuntut penyetopan impor beras dan pelaksanaan reforma agraria.¹⁶ Di antara dua demonstrasi besar tersebut, pada tanggal 7 September 2006, sekitar 20 orang yang diorganisir oleh SPI melakukan protes di depan kantor BULOG di Jakarta. Mereka secara

14 Meraka adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Institute for Global Justice (IGJ), dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI).

15 Untuk tujuan politik yang lebih luas, aksi ini menjadi “aksi pemanasan” yang dilakukan oleh SPI sebagai bagian dari perannya sebagai anggota dan koordinator Via Campesina dalam rangka melakukan protes pada pertemuan WTO di Hong Kong, 13-18 Desember 2005. Sekitar 20 petani dari Indonesia yang dikoordinir oleh SPI bersama-sama dengan aktivis buruh lainnya di Indonesia dan kelompok penentang agenda Neoliberal terlibat dalam aksi global menentang WTO di Hong Kong tahun 2005. Lihat *Pembaruan Tani* 2005b.

16 Aksi yang merupakan bagian dari perayaan Hari Tani Nasional, 24 September, tersebut dilakukan pada 19 September 2006 (*Pembaruan Tani* 2006c: 4-5 dan 10).

simbolis membakar gabah sebagai bentuk protes rencana BULOG untuk mengimpor 200 ribu ton beras pada bulan Oktober 2006. Menurut SPI, rencana BULOG tersebut “hanya membuang-buang dana pemerintah” (*Pembaruan Tani* 2006b: 12). SPI yakin BULOG ‘sebagai lembaga yang mengatur persediaan beras nasional, tidak ingin membeli gabah petani ... [tetapi] lebih memilih mengimpor beras daripada membeli beras dari petani [Indonesia], karena hal ini lebih menguntungkan bagi importir yang mereka semua umumnya adalah partner keja BULOG’ (*Pembaruan Tani* 2006b: 12).¹⁷

SPI tidak sendiri menolak beras impor. Organisasi-organisasi tani lainnya seperti Aliansi Petani Indonesia (API), PETANI MANDIRI, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), dan Serikat Tani Nasional (STN) melakukan hal yang sama karena anggota-anggota mereka mengalami kerugian yang sama (lihat *DetikNews* 2005). Bahkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI),

17 Kontroversi kebijakan penyediaan beras berhenti ketika Menteri Pertanian mengatakan bahwa tidak perlu mengimpor beras, tetapi Deputy Menteri Ekonomi mengatakan bahwa Indonesia perlu melakukan impor, karena itu BULOG, di bawah Kementerian Perdagangan (dan Koordinasi Menteri Ekonomi) meluncurkan rencana untuk membeli sejumlah 200 ton beras. Ini tidak mengherankan di negara di mana banyak kebijakan pemerintah yang bias kepada kepentingan bisnis. Mantan Menteri Koordinator untuk Pangan dan Holtikultura di era pemerintahan Wahid, AM Saefudin pernah menulis “... siapa yang sesungguhnya sangat antusias agar pemerintah melakukan impor beras? Jawabannya jelas: Wakil Presiden, Muhammad Jusuf Kalla (MJK). Siapa lagi? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Aburizal Bakrie. Ini bukan sesuatu yang kebetulan bahwa keduanya memiliki pendapat yang sama, karena mereka berdua adalah pelaku bisnis...[mereka] hanya melihat Indonesia dari kaca mata atau sudut pandang bisnis... Jadi, berdasarkan kepentingan siapa beras itu diimpor?... hanya Tuhan yang mengetahui. Tetapi, jika pejabat terhormat sangat bangga bahwa pelaku bisnis bisa menjadi politisi, tidak tertutup kemungkinan bahwa beras impor yang diprotes oleh petani adalah hasil manipulasi politisi dalam bisnis. *That's the logic of it!*” (Saefudin 2005).

asosiasi petani yang dibentuk oleh pemerintahan Orde Baru,¹⁸ sejak tahun 2002 – empat tahun setelah Soeharto *lengser* – mulai turut berteriak lantang menantang kebijakan impor beras (lihat *Tempo Interaktif* 2002, *Tempo Interaktif* 2005a dan 2005b). Walaupun demikian, HKTI tidak pernah mengorganisir massa untuk melakukan protes sebagaimana dilakukan oleh organisasi gerakan petani lainnya.

Kampanye dan protes menolak impor bahan pangan, peran WTO dalam mengatur perdagangan produk-produk pertanian dan keterlibatan Bank Dunia dan IMF dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, sebagaimana yang dilakukan oleh serikat-serikat petani dan organisasi-organisasi gerakan sosial pedesaan lainnya di Indonesia pada umumnya dilakukan bersamaan dengan kampanye untuk menegakan kedaulatan pangan, hak-hak petani, dan reforma agraria.¹⁹ Kampanye-kampanye tersebut merupakan bagian gerakan yang lebih besar menentang globalisasi, yang juga mengartikulasikan perbedaan makna *reforma agraria*, tidak hanya sebatas penguatan dan atau pengembalian hak atas tanah dan restrukturisasi ketimpangan struktur agraria, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan global.

Selain persoalan perdagangan pangan, salah satu penyebab tidak mampunya pertanian lokal untuk menyediakan pangan di Indonesia adalah akibat sempitnya lahan pertanian yang dapat dikelola oleh petani. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 237 juta jiwa²⁰, luas

18 Untuk penjelasan lebih detail mengenai HKTI lihat misalnya: Soeparto 2011 dan Bachriadi 2010: 63-66).

19 Kajian yang lebih mendalam mengenai hal ini dapat ditemukan misalnya dalam Bachriadi 2010.

20 Menurut BPS, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah

lahan pertanian rakyat di Indonesia saat ini hanya sekitar 23,3 juta hektar,²¹ yang berarti rata-rata penguasaan tanah rumah pertanian saat ini adalah 0,89 hektar.²² Jumlah lahan pertanian rakyat ini sangat lah kecil dibandingkan dengan luas tanah yang dialokasikan maupun yang sudah digunakan untuk kegiatan pertanian skala besar dan industri ekstraktif yang dikuasai oleh korporasi, yang jumlahnya saat ini mencapai lebih kurang 60% dari luas keseluruhan daratan Indonesia (Bachriadi 2014: 7).

Rata-rata penguasaan tanah oleh rumah tangga pertanian ini tidak mengalami perubahan sejak 50 tahun yang lalu, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah. Gambaran ketimpangan penguasaan tanah oleh rumah tangga pertanian juga tampak dari semakin besarnya jumlah rumah tangga petani gurem yang berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 telah mencapai 54,5% dari keseluruhan jumlah rumah tangga pertanian. Dari waktu ke waktu jumlah petani gurem terus bertambah di Indonesia.

Selama masih ada ketimpangan penguasaan tanah, maka tidak pernah akan ada kedaulatan pangan – sebagaimana dinyatakan oleh SPI dan Via Campesina serta para penyokong kedaulatan pangan lainnya. *Reforma agraria* adalah prasyarat penting bagi kedaulatan pangan (SPI 2007 dan 2008; Stedile & de Carvalho 2011: 31; lihat

penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa.

21 Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 yang dikeluarkan oleh BPS melalui situs khusus <http://st2013.bps.go.id/dev/st2013/index.php/site/index>. Sayangnya dari sumber yang ada ini tidak dapat diketahui total luas areal tanaman pangan di seluruh Indonesia.

22 Menurut hasil Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga pertanian (RTP) adalah 26.135.469 rumah tangga. Lihat <http://st2013.bps.go.id/dev/st2013/index.php/site/index>.

juga Wittman 2011: 95). Rosset (2006) menegaskan bahwa *reforma agraria* adalah bagian dari kedaulatan pangan. Sedangkan menurut Borras Jr. dan Franco (2012) hak dan akses yang efektif untuk menggunakan dan menguasai tanah serta kemaslahatan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dari penguasaan dan penggunaan tanah tersebut adalah pilar penting bagi kedaulatan pangan. Dalam suatu forum masyarakat sipil yang diselenggarakan di Kuba pada tahun 2001²³, hal ini mulai ditegaskan: “Kedaulatan pangan mengisyaratkan dijalankannya secara radikal pembaruan agraria yang komprehensif yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal di tiap negara dan wilayah, di mana petani-petani lokal – baik laki-laki maupun perempuan secara setara – memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber produktif, utamanya lahan, air, dan hutan, maupun alat-alat produksi, keuangan, pelatihan, serta pengembangan kapasitas ...” (Rosset 2006: 301).

Di Indonesia, SPI menggunakan gagasan-gagasan baru seperti ‘kedaulatan pangan’ dan hak-hak petani untuk memperluas konsep *reforma agraria* yang mereka maknai sebagai “proses reorganisasi dan membangun kembali struktur sosial, khususnya struktur sosial masyarakat pedesaan, untuk membangun basis yang kuat sektor pertanian dan untuk membangun system kepemilikan tanah yang menjamin kehidupan yang baik untuk rakyat ... inilah cara negara untuk melindungi hak asasi manusia, kewajiban atas hak atas tanah dan sumberdaya alam lainnya” (SPI 2007: 6). Dengan kata lain, jika negara melaksanakan

23 Forum Dunia untuk Kedaulatan Pangan (*World Forum on Food Sovereignty*) yang diselenggarakan di Havana, Kuba pada bulan September 2001 dalam rangka persiapan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk menghadapi *World Food Summit +5*.

reforma agraria melalui perlindungan terhadap hak-hak petani dan juga melaksanakan kedaulatan pangan, maka jalan untuk keadilan sosial telah terbuka. Tetapi untuk meyakinkan pemerintah menjalankan isu tersebut, diperlukan komitmen politik yang kuat para pemegang kekuasaan dan keterlibatan organisasi petani yang kuat. Jika negara dan pemegang kekuasaan tidak memiliki komitmen pada isu tersebut, “petani harus mengambil alih menjadi tanggungjawabnya” (SPI 2007: 7).

Sejumlah negara – seperti Ekuador, Bolivia dan Nepal – telah menjadikan ‘kedaulatan pangan’ sebagai norma hukum dalam konstitusi mereka, sementara di negara lain ‘kedaulatan pangan’ telah menjadi bagian dari kebijakan pertanian di tingkat nasional (Brazil) dan kebijakan di tingkat daerah (Negara Bagian Maine, AS) (Wittman 2011: 97). Di Indonesia, melalui Undang-undang No. 18/2012 tentang Pangan disebutkan ‘Kedaulatan Pangan’, ‘Kemandirian Pangan’ dan ‘Ketahanan Pangan’ sebagai dasar-dasar ‘Penyelenggaraan Pangan’ (lihat khususnya Pasal 3). Tidak terlalu jelas perbedaan antara konsep ‘kedaulatan pangan’ dan ‘ketahanan pangan’ yang dimaksud oleh undang-undang tersebut; dibandingkan dengan perbedaan mendasar dari asal-usul, orientasi dan ideologi kedua konsepsi itu sebagaimana telah diuraikan di atas. ‘Kedaulatan Pangan’, dalam UU No. 18/2012 pasal 1, dimaknai sebagai “hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.” Sedangkan ‘Ketahanan Pangan’ dimaknai sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin

dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan” (pasal 1). Di luar dua konsepsi ini, UU No. 18/2012 juga mengenal istilah ‘Kemandirian Pangan’ dan ‘Keamanan Pangan’. ‘Kemandirian Pangan’ adalah “kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”; sedangkan yang dimaksud dengan ‘Keamanan Pangan’ adalah “kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi” (pasal 1).

Dilihat dari pengertian-pengertian di atas, tampaknya yang dimaksud dengan ‘Kedaulatan Pangan’ oleh UU No. 18/2012 adalah persoalan berdaulatnya negara dan bangsa dalam membentuk kebijakan pangan; sementara pengertian ‘Ketahanan Pangan’ di undang-undang tersebut mengarah pada persoalan kejajegan penyediaan pangan; dan pengertian ‘Kemandirian Pangan’ mengarah pada persoalan kemampuan dalam menghasilkan pangan; sedangkan pengertian ‘Keamanan Pangan’ mengarah pada soal kualitas pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat. Dengan demikian, pengertian-pengertian ‘Kedaulatan

Pangan' dan 'Ketahanan Pangan' dalam undang-undang itu sangat berbeda dengan perdebatan-perdebatan wacana yang berkembang di seputar isu 'kedaulatan pangan' (*food sovereignty*) dan 'ketahanan pangan' (*food security*) seperti telah diuraikan di atas.

Jika dikaitkan lagi dengan wacana mutakhir di seputar hubungan antara hak atas pangan (*right to food*), kedaulatan pangan (*food sovereignty*), dan penataan struktur penguasaan tanah (*agrarian reform*), maka UU No. 18/2012 tidak memiliki pengaturan yang jelas yang mencerminkan pentingnya ketiga hal tersebut diatur secara komprehensif dan terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan. UU No. 18/2012 sesungguhnya hanya suatu aturan mengenai penyelenggaraan pangan (*food management*) dari sisi pengadaan/penyediaan pangan, yang oleh penggagas konsepsi kedaulatan pangan (*food sovereignty*) telah dikritik habis.

Bagaimana dengan pemerintahan baru Indonesia pasca Pemilu 2014? Akan kah kebijakan pangan di Indonesia diperbaiki, sehingga mengarah kepada penerapan konsepsi 'kedaulatan pangan' (*food sovereignty*)? Apakah reforma agraria dan kedaulatan pangan akan dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pertanian dan pangan? Pemerintahan dua periode di bawah kepemimpinan Presiden SBY (2004–2009 dan 2009–2014) telah gagal memenuhi janji politiknya untuk menjalankan *reforma agraria*;²⁴ sebaliknya kecenderungan pencaplokan tanah oleh korporasi (*land grabbing*) justru makin meluas dalam dua periode pemerintahannya (lihat misalnya Suryana

24 Pada masa kampanye di tahun 2004, SBY menjanjikan akan menjalankan reforma agraria jika menjadi pemimpin negeri, yang kemudian tidak pernah dijalanannya sungguh-sungguh. Kritik kepada SBY atas janji-janjinya ini dapat dilihat, misalnya, dalam Bachriadi 2012.

dan Bachriadi 2012, Bachriadi 2012, Bachriadi 2014 *segera terbit*, Savitri 2013, dan Jiwan 2013). Akan kah pemerintahan baru pasca Pemilu 2014 juga memiliki watak yang sama dengan pemerintahan sebelumnya, sehingga jalan bagi terciptanya kedaulatan pangan di Indonesia semakin tidak jelas? Sulit mengelak dari kenyataan bahwa pemerintahan di Indonesia khususnya pasca reformasi 1998 adalah pemerintahan yang semakin memperkuat pembentukan Negara neoliberal, meskipun kali ini pemerintahan baru pasca pemilu 2014 disebut-sebut berpotensi menjadi pemerintahan yang populis.

Selain persoalan politik di atas, secara teoritik, sebagaimana dibahas dengan baik oleh Henry Bernstein (2013), konsepsi kedaulatan pangan sebagai "jalan petani" untuk menjawab krisis pangan masih menyimpan problema logika dialektika di dalam bangunan tesis-anti tesisnya, baik secara epistemologis maupun praksis. Dengan demikian, selain perjuangan politik untuk mewujudkan *reforma agraria* sebagai jalan menuju kedaulatan pangan, para pemikir gerakan *reforma agraria* dan kedaulatan pangan di Indonesia masih perlu merumuskan secara jelas, baik secara teoritik maupun praksis, bagaimana kedaulatan pangan dapat dijalankan di tengah-tengah gelombang besar kapitalisme global saat ini. Sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pangan yang sehat dari tingkat lokal hingga nasional bisa terpenuhi secara berkelanjutan, di satu sisi, dan di sisi lainnya kedaulatan petani dan bangsa pun terjaga. []

Rujukan

- Alamgir, M., & Arora, P. (1991). *Providing Food Security for All*, IFAD Studies in Rural Poverty No. 1. New York: New York University Press.
- Amang, B., & Sawit, H. (2000). *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional Pelajaran dari Orde Baru dan Era Reformasi*. Bogor: IPB Press.
- Arifin, B., Munir, A., Hartati, E. S., & Rachbini, D. J. (2001). *Food Security and Markets in Indonesia: State-Private Interaction in Rice Trade*. Kuala Lumpur: Southeast Asia Council for Food Security and Fair Trade.
- Bachriadi, D. (2010). *Between Discourse and Action: Agrarian Reform and Rural Social Movements Post '1965*, PhD Dissertation di Flinders University, Australia.
- Bachriadi, D. (2005). *Hantaman Neoliberalisme terhadap Industri Gula di Indonesia*. Jakarta: Institute for Global Justice.
- Bachriadi, D. (2012). "Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY", dalam *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan*,

Gambaran Rumah Tangga Pertanian di Indonesia, 1963-2013

Tahun Sensus Pertanian	1963	1973	1983	1993	2003	2013
Total jumlah Rumah tangga petani (juta)	NA	21,6	23,8	30,2	37,3	26,2 ^{*)}
'Absolute-landless' (juta rumah tangga)	NA	7,1 [33%]	5,0 [21%]	9,1 [30%]	13,4 [36%]	NA
Rumah tangga petani pengguna lahan (juta rumah tangga)	12,2 [NA]	14,5 [67%]	18,8 [79%]	21,1 [70%]	24,3 [64%]	25,8 [98%]
Total penggunaan tanah oleh petani pengguna lahan (juta ha)	12,9	14,2	16,8	17,1	21,5	23,3
Rata-rata Penggunaan tanah oleh petani (ha)	1,05	0,99	0,89	0,81	0,89	0,89
Persentase rumah tangga petani gurem	44%	46%	45%	49%	51%	55%
Rasio Gini Penggunaan Tanah	NA	0,70	0,64	0,67	0,72	NA

Sumber: Bachriadi dan Wiradi (2011) (untuk Sensus Pertanian 1963-2003) dan <http://st2013.bps.go.id/dev/st2013/index.php/site/index> (untuk Sensus Pertanian 2013)

Catatan: *) Jumlah rumah tangga petani tahun sensus 2013 belum memasukkan jumlah rumah tangga buruh tani yang datarnya dari hasil Sensus Pertanian 2013 belum dapat diakses. Sementara jumlah rumah tangga dari hasil-hasil Sensus Pertanian sebelumnya telah memasukkan rumah tangga buruh tani ke dalam perhitungan/pejumlahan.

- M. Shohibuddin dan M. N. Salim (ed.), hal. 860–881. Yogyakarta: STPN Press.
- Bachriadi, D. (2014). *Masalah Agraria dan Penegakan/ Pemajuan HAM di Indonesia*, Kertas Posisi Agraria No. 01/2014 Komnas HAM. Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia RI.
- Bachriadi, D. (ed.) (2014, segera terbit) *Infrastruktur, Ladang Minyak dan Wisata Hijau: Pencaplokan Tanah di Jawa Pasca Reformasi*, manuskrip buku untuk diterbitkan oleh JKPP (Bogor) dan ARC (Bandung).
- Bachriadi, D., & Wiradi, G. (2011). *Six Decades of Inequality: Land Tenure Problem in Indonesia*. Bandung: ARC, KPA, Yayasan Bina Desa.
- Baumuller, H., & Tansey, G. (2008). “Responding to Change”, dalam *The Future Control of Food: A Guide to International Negotiations and Rules on Intellectual Property, Biodiversity and Food Security*, G. Tansey dan T. Rajotte (ed.), hal 171–196. London: Earthscan.
- Berlandt, H. & Serneels, J. (1997). *Manual for Food Security Diagnosis*, Working Paper 1996/43, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.
- Bernstein, H. (2013). *Food Sovereignty: A Skeptical View*, Conference Paper #1, International Conference on “Food Sovereignty: A Critical Dialogue”, diorganisir oleh Program in Agrarian Studies Yale University of the US, the Journal of Peasant Studies, Yale Sustainable Food Project, Institute for Food and Development Policy, Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS) of the International Institute of Social Studies, dan Transnational Institute (TNI), Yale, 14–15 September

- 2013.
- Borras Jr, S. M. (2004). *La Via Campesina: An Evolving Transnational Social Movement*, Briefing Series Transnational Institute. Amsterdam: Transnational Institute.
- Borras Jr, S., & Franco, J. C. (2012). *A ‘Land Sovereignty’ Alternative? Towards a Peoples’ Counter-Enclosure*, discussion paper program Agrarian Justice Transnational Institute. Amsterdam: Transnational Institute.
- Charles, D. (2001). *Lords of the Harvest: Biotech, Big Money, and the Future of Food*. Cambridge: Perseus Publishing.
- Departemen Pertanian, Direktorat Pengelolaan Lahan Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air (2005). *Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Lahan*. Jakarta: Departemen Pertanian RI.
- Desmarais, A. A. (2007). *La Via Campesina: Globalization and the Power of Peasants*. Halifax and London: Fernwood Publishing dan Pluto Press.
- DetikNews (2005). “Merasa Dijajah Pejabat, Ratusan Petani Tolak Impor Beras”, *DetikNews*, 17 November 2005, <http://news.detik.com/read/2005/11/17/124726/480164/10/ratusan-petani-tolak-impor-beras?nd771104bcj>, diunduh 22 Maret 2009.
- FAO (2008). *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security, Food Security Information for Action: Practical Guides*. Rome: EC-FAO Food Security Programme.
- FAO (1996). *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action*. Rome: FAO.
- Forum for Food Sovereignty, International Steering

- Committee (2007a). *Synthesis Report*, Forum for Food Sovereignty, Sélingué, Mali, 23–27 Februari 2007, dapat diunduh di <http://nyeleni.org/spip.php?article334>.
- Forum for Food Sovereignty, International Steering Committee (2007b). *Nyeléni 2007: Forum for Food Sovereignty, Sélingué, Mali February 23 - 27, 2007*. http://nyeleni.org/DOWNLOADS/Nyelni_EN.pdf
- Fritz, T. (2011). *Globalising Hunger: Food Security and the EU's Common Agriculture Policy (CAP)*. Berlin: FDCL-Verlag Berlin.
- FSPI (2003) *Pandangan dan Sikap SPI tentang Kedaulatan Pangan*. <http://www.spi.or.id/?p=329>, diunduh 16 Juli 2014.
- FSPI (2004). *Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)*. Jakarta: FSPI.
- Gatra (2014). “Daulat Pangan, Daulat Pemerintahan”, *Gatra* 32/XX, 12–18 Juni 2014, hal. 12–13.
- George, S. (1983). *Feeding the Few: Corporate Control of Food*. Washington DC: The Institute for Policy Studies.
- George, S. (1977). *How The Other Half Dies: The Real Reason for World Hunger*. New Jersey: Rowman & Allanheld Publishers.
- Hessie, R. (2009). *Analisis Produksi dan Konsumsi Beras Dalam Negeri Serta Implikasinya Swasembada Beras di Indonesia*, Skripsi Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB, Bogor.
- Jansen, K. (2014). *Food Sovereignty: Re-peasantization/Dispossession/Agro-ecology versus Expanded Reproduction*, Conference Paper #92, International Colloquium on “Food Sovereignty: A Critical Dialogue”, diorganisir oleh Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS), Agrarian, Food & Environmental Studies (AFES) International Institute of Social Studies (ISS), Food First/Institute for Food and Development Policy, Land Deal Politics Initiative (LDPI), Transnational Institute (TNI) dan Journal of Peasant Studies, di ISS the Hague, 24 Januari 2014.
- Jiwan, N. (2013) “The Political Ecology of the Indonesian Palm Oil Industry”, dalam *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia: A Transnational Perspective*, O. Pye & J. Bhattacharya (ed.), hal. 48–75. Singapore: ISEAS.
- La Via Campesina* (1996). *Proceedings from the II International Conference of the Via Campesina*, Tlaxcala Mexico, 18–21 April 1996. Brussels: NCOS Publications.
- La Via Campesina* (2006). *Asia Pasific Peoples Conference on Rice and Food Sovereignty*, 14–18 Mei 2006, <http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/food-sovereignty-and-trade-mainmenu-38/116-jakarta-Indonesia-14-18-may-2006>, diunduh 7 Juli 2009.
- La Via Campesina* (2008). “Food Sovereignty for Africa: A Challenge at Fingertips”, dalam *Compilation of the Documents produced in Nyeleni Forum (23-27 Feb 2007) and the Outcomes of Several Conference held at the same place in Nov-Dec 2007*. Maputo: Via Campesina Africa - UNAC.
- Leisinger, K. M., Schmitt, K. M., & Pandya-Lorch, R. (2002). *Six Billion and Counting: Population and Food*

- Security in the 21st Century*. Washington DC: The International Food Policy Research Institute.
- Meneses, F. (2001). "Food Sovereignty: A Vital Requirement for Food Security in the Context of Globalization", *Development* 44(4), hal. 29-33.
- McMichael, P. (2013). *Historicizing Food Sovereignty: a Food Regime Perspective*, Conference Paper #13, International Conference on "Food Sovereignty: A Critical Dialogue", diorganisir oleh Program in Agrarian Studies Yale University of the US, the Journal of Peasant Studies, Yale Sustainable Food Project, Institute for Food and Development Policy, Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS) of the International Institute of Social Studies, dan Transnational Institute (TNI), Yale, 14-15 September 2013.
- NGO/CSO Forum for Food Sovereignty (2002). *Food Sovereignty: A Right For All Political Statement of the NGO/CSO Forum for Food Sovereignty*, NGO/CSO Forum for food sovereignty, Rome, 8-13 Juni 2002, dapat ditemukan di <http://nyeleni.org/spip.php?article125>.
- Paarlberg, R. (2013). *Food Politics: What Everyone Needs to Know*. Oxford: Oxford University Press.
- Pembaruan Tani* (2005a). "Impor Beras Menikam dari Belakang", "Impor Beras: Ketidakbijakan Pemerintah" dan "Sudah Jatuh Tertimpa Beras Impor Pula", *Pembaruan Tani* 22, Nov-Des 2005, hal. 4-8. Jakarta: FSPI.
- Pembaruan Tani* (2005b). "Perlawanan Petani pada Pertemuan WTO Hong Kong", Suplemen *Pembaruan*

- Tani* 22, November-Desember 2005, hal. I-VIII.
- Pembaruan Tani* (2006a). "Ribuan Petani Turun ke Jalan", "FSPI Menuntut Pembaruan Agraria", dan "Perwakilan Petani Diterima Istana", *Pembaruan Tani* 28, Juni 2006, hal. 4-5.
- Pembaruan Tani* (2006b). "FSPI: Impor Beras Hamburkan Uang Negara" dan "Massa FSPI Tuntut Bulog Hentikan Impor Beras", *Pembaruan Tani* 31, September 2006, hal. 12.
- Pembaruan Tani* (2006c). "Peringatan Hari Tani Nasional: Tolak Impor Beras, Laksanakan Reforma Agraria", *Pembaruan Tani* 32, Oktober 2006, hal. 4-5.
- Rachbini, D. J. (2000). *Dampak LoI pada Pembangunan Pertanian - Beberapa Catatan Pokok*, makalah dipresentasikan pada Lokakarya tentang 'Impact of Trade Liberalization on Food and Agriculture Sector in Indonesia', Jakarta, 24-25 Juli 2000, diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan IUF - Asia Pasific.
- Rosset, P. (2006). "Moving Forward: Agrarian Reform as a Part of Food Sovereignty", dalam *Promised Land: Competing Vision of Agrarian Reform*, P. Rosset, R. Pathel, & M. Courville (ed.), hal. 301-332. Oakland: Food First Books.
- Saefudin, A. (2005). "Kabinet Indonesia Berseteru", *Republika*, 25 November 2005.
- Savitri, L.A. (2013). *Korporasi dan Politik Perampasan Tanah*. Yogyakarta: Insist Press.
- Sawit, M. H. (2006). Indonesia dalam Tatanan Perubahan Perdagangan Beras Dunia. *Majalah Pangan*, edisi tahun 2006, hal. 1-7.

- Sawit, M. H. (2007). Usulan Kebijakan Beras dari Bank Dunia: Resep yang Keliru. *Analisa Kebijakan Pertanian* 5(3), hal. 193-212.
- Schanbacher, W. D. (2010). *The Politics of Food: the Global Conflict Between Food Security and Food Sovereignty*. Santa Barbara: Praeger.
- Soeparto, H. (2011). *Petani Indonesia dan Sejarah Perkembangannya*. Bekasi: Miron and Associates.
- SPI (2008). *Indonesia Tidak Laksanakan Pembaruan Agraria: Indonesia Terus Menderita Konflik Agraria dan Rawan Pangan*. www.spi.or.id, diunduh 22 Maret 2009.
- SPI (2007). *Tentang Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan*, Resolusi Kongres FSPI/SPI ke-3, 2007. www.spi.or.id, diunduh 22 Maret 2009.
- Stedile, J. P., & de Carvalho, H. M. (2011). "People Need Food Sovereignty", dalam *Food Movement Unite!*, E. Holt-Gimenez (ed.), hal. 21-34. Oakland CA: Food First Book.
- Suryana, E. & Bachriadi, D. (2012) *Land Grabbing and Speculation for Energy Business: A Case Study of ExxonMobile Oil Business Expansion in Bojonegoro of East Java, Indonesia*, makalah yang dipresentasi pada "the Global Land Grabbing II – an International Conference on Large-Scale Land Deals, Cornell University 2012, tersedia di www.cornell-landproject.org/papers/
- Tempo Interaktif* (2002). "Ketua HKTI: Hentikan Impor Beras!", *Tempo Interaktif* 26 Agustus 2002, http://www.tempo.co/read/news/2002/08/26/05527723/Ketua-HKTI-Hentikan-Import-Beras, diunduh 22 Maret 2009.

- Tempo Interaktif* (2005a). "Petani Protes Impor Beras", *Tempo Interaktif* 17 Nov 2005, http://tempo.co.id/hg/ekbis/2005/11/17/brk,20051117-69317,id.html, diunduh 22 Maret 2009.
- TempoInteraktif* (2005b). "HKTI Tuding Menteri Perdagangan Berbohong Soal Impor Beras", *Tempo Interaktif* 17 November 2005, http://www.tempo.co/read/news/2005/11/17/05669319/HKTI-Tuding-Menteri-Perdagangan-Berbohong-Soal-Import-Beras, diunduh 22 Maret 2009.
- Watkins, K. (1995). *Agricultural Trade and Food Security*. Quezon City: Oxfam UK and Ireland (Philippines).
- Winders, B. (2009). *The Politics of Food Supply: US Agricultural Policy un the World Economy*. New Haven: Yale University Press.
- Windfuhr, M., & Jonsen, J. (2005). *Food Sovereignty: Toward Democracy in Localized Food System*, Working Paper Intermediate Technology Development Group (ITDG). Rugby: ITDG Pub.
- Winoto, J. (2005). *Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*, makalah (keynote Speech) pada Seminar Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi, Jakarta, 13 Desember 2005, diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3-LPPM) IPB.
- Wittman, H. (2011). "Food Sovereignty: A New Rights Framework for Food and Nature?", *Environment and Society: Advances in Research* 2(1), hal. 87-105.

Kedaulatan Pangan melalui “Jalan Petani”: Sebuah Pandangan Skeptis

Henry Bernstein

Tulisan ini mencoba mengidentifikasi dan menilai sejumlah elemen kunci yang menjadi “kerangka” konsepsi Kedaulatan Pangan (KP), yaitu: (1) kritik komprehensif atas korporasi industri pertanian (agriculture) dan konsekuensi ekologisnya di era globalisasi, (ii) advokasi ‘jalan petani (peasant way)’ sebagai basis bagi keadilan pangan yang berkelanjutan; serta (iii) sebuah program untuk mewujudkan tujuan sejarah dunia. Meski bersimpati pada elemen pertama, penulis lebih skeptis pada elemen kedua karena melihat bagaimana Kedaulatan Pangan meletakkan “petani (Peasant)”, dengan klaim bahwa petani pemilik lahan kecil (small producers) menjalankan pertanian agro-ekologi – yang dipahami sebagai pertanian yang menggunakan input dan tenaga kerja yang rendah—dapat memberi makan bagi dunia. Hal ini terkait dengan argumentasi bahwa Kedaulatan Pangan tidak mampu membangun program yang dapat dijalankan (elemen ketiga), yang menghubungkan aktivitas pertanian skala kecil dengan kebutuhan pangan bagi kelompok non petani yang jumlahnya terus bertambah, baik secara jumlah dan kontribusinya terhadap proporsi dalam populasi dunia.

Kata kunci: kedaulatan pangan, usaha pertanian (agriculture) kapitalistik, petani, relasi kelas

‘Kedaulatan Pangan’ (selanjutnya disebut KP) dipahami sebagai ‘hak bangsa dan rakyat untuk mengontrol sistem pangan mereka sendiri, termasuk pasar, sistem produksi, sistem pangan dan lingkungan...”sebagai alternatif untuk mengkritik model neoliberal yang dominan dalam usaha pertanian (*agriculture*) dan perdagangan” (Wittman dkk 2010,2). Konsepsi ini sangat erat direkatkan dengan La Via Campesina dan para pendukungnya, dan digunakan terus-menerus sebagai slogan, manifesto dan proyek politik, serta cita-cita untuk mengubah sejarah dunia. Peningkatan kualitas dan berkembangnya jumlah literatur mengenai KP secara pesat telah menghadirkan tantangan untuk menempatkan berbagai analisis, klaim, harapan dan resep yang dihasilkan.¹ Tulisan ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menilai beberapa elemen kunci yang menjadi kerangka bagi konsep KP:

1. Sebagai serangan yang komprehensif terhadap korporasi usaha pertanian (*agriculture*) yang melakukan

1 Tulisan ini dipersiapkan untuk Konferensi *The Food Sovereignty: A Critical Dialogue*, pada 14–15 September 2013, di Yale University, Amerika Serikat. Makalah ini juga sudah diterbitkan dalam *Journal of Peasant Studies* (JPS). Versi akhir dapat dilihat dalam JPS, 41(1-2), Januari 2014.

Saya tidak menyatakan (mengklaim) cukup menguasai literatur yang dihasilkan oleh Kedaulatan Pangan, yang begitu banyak dan luas dan diperbanyak melalui situs internet oleh banyak organisasi yang berkomitmen pada Kedaulatan Pangan. Dalam membuat tulisan ini, saya mengandalkan koleksi esai populer yang diedit oleh Hannah Wittman, Annette Aurélie Desmarais and Nettie Wiebe (2010) yang dinilai baik mewakili pandangan Kedaulatan Pangan di Amerika Utara. Dari tulisan-tulisan tersebut, saya mendapatkan banyak “contoh problematik” mengenai argumentasi dan resep-resep yang digunakan oleh Kedaulatan Pangan. Penjelasan dalam tulisan ini terkait, atau bertabrakan, dengan serangkaian persoalan pokok, perdebatan dan sejumlah literatur yang relevan – antara lain: tentang akumulasi primitif, teori dasar sejarah kapitalisme, ekologi politik, petani (*peasant*) dan komunitas pedesaan – yang sebagian besar hanya dapat saya acu dan tidak berurusan langsung secara layak.

- kerusakan, baik lingkungan maupun sosial;
2. Sebagai uraian baru dan luas atas retorika dasar populisme agraria dalam kondisi globalisasi kontemporer: keunggulan moral dan sosial petani (atau pemilik lahan kecil), serta keunggulan ekologis yang dimasukkan di dalam konsepsi KP;
 3. Sebagai program untuk membangun sistem pangan dunia yang baru, berkelanjutan dan berkeadilan sosial, ‘menghubungkan kembali pangan, alam dan komunitas’ (Wittman dkk (ed), 2010)

Dengan demikian, elemen-elemen tersebut akan menjadi tesis dan antitesis yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Namun, apakah elemen-elemen tersebut sudah memenuhi syarat untuk proses transformasi merupakan persoalan yang lain lagi. Pada elemen-elemen tersebut terekam adanya pengaruh perspektif ekologi politik (*political ecology*) pada cara pandang ekonomi politik (*political economy*) dalam dekade terakhir, sementara pertanyaan klasik (para aktivis) sosiologi politik – apa yang sudah dilakukan, untuk siapa dan bagaimana dilakukannya? (*what is to be done, by whom and how?*)—menambah kompleksitas persoalan untuk memajukan program KP.

Kedaulatan Pangan: Kapan dan Mengapa?

Fokus sejarah terpenting dalam analisis dan resep utama KP adalah turun naiknya (*conjuncture*) ‘globalisasi’ sejak tahun 1970–an. Pada masa itu, terdapat sejumlah bukti kuat yang menunjukkan kemunculan fase baru kapitalisme global dengan bentuk akumulasi modal yang baru, yang antara lain (terlambat) mengubah konsepsi warisan “*agrarian question*” yang lebih memusatkan perhatian pada

jalan “nasional” pembangunan kapitalisme di pedesaan dan kontribusinya bagi industrialisasi (Bernstein 1996/7). Sejumlah tema-tema kunci dalam diskusi mengglobalisasi dan dampaknya bagi kegiatan pertanian (*agriculture*), terdiri dari (digambarkan dalam Bernstein 2010a, 82-4):

1. Liberalisasi perdagangan, pergeseran pola perdagangan global komoditas pertanian, yang dikaitkan dengan pertarungan di dalam dan di seputar WTO;
2. Efek harga pasar dunia pada bursa berjangka komoditas pertanian, yaitu spekulasi yang didorong oleh ‘finansialisasi’;
3. Penghapusan subsidi dan bentuk dukungan kepada petani kecil lainnya di wilayah selatan sebagai bentuk “perampangan” dengan ukuran yang ditentukan oleh neoliberalisme, termasuk pengurangan bantuan keuangan pemerintah untuk (kebanyakan di) sektor pertanian bersamaan dengan promosi “platform ekspor”, khususnya pada pakan ternak dan komoditas unggulan lainnya (hortikulutra perikanan);
4. Meningkatnya konsentrasi korporasi global, baik di industri input pertanian, maupun industri pertanian pangan (menurut Weis 2007), yang ditandai dengan merger dan akuisisi, serta besarnya kekuatan ekonomi sejumlah kecil korporasi dalam menentukan pasar saham dalam skala besar;
5. Digunakannya teknologi organisasi baru yang dijalankan oleh sejumlah korporasi sepanjang rantai komoditas, mulai dari kegiatan pertanian, pengolahan dan proses produksi hingga ke distribusi. Contohnya, “revolusi supermarket” yang menguasai sumber makanan global dan pembagian pasar penjualan makanan, dan masuknya jaringan supermarket besar

- ke China, India dan sejumlah Negara di Selatan baru-baru ini;
6. Bagaimana teknologi-teknologi tersebut digabungkan dengan kekuatan ekonomi korporasi besar membentuk dan membatasi perilaku (dan pilihan) para petani dan konsumen;
 7. Desakan korporasi untuk mematenkan hak kekayaan intelektual atas genetika tanaman di bawah ketentuan WTO mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan aspek perdagangan dan persoalan pencurian material genetika (*biopiracy*);
 8. Teknik-teknik baru rekayasa genetika tanaman dan hewan (GMO atau *genetically modified organisms*) bersamaan spesialisasi monokultur, yang telah memberi sumbangan besar pada hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*);
 9. Adanya keuntungan baru produksi *agrofuel*, yang didominasi oleh korporasi agribisnis yang didukung subsidi publik di Amerika dan Eropa, serta efeknya bagi ketersediaan pasokan bahan pangan dunia untuk konsumsi manusia;
 10. Konsekuensi-konsekuensi kesehatan, termasuk meningkatnya level bahan kimia beracun dalam industri perawatan dan pengolahan bahan makanan; kurangnya nutrisi dalam komposisi makanan “*junk food*”, makanan cepat saji dan makanan olahan; meningkatnya obesitas dan penyakit akibat obesitas; serta terus berlanjut dan bertambahnya, kelaparan dan kekurangan gizi;
 11. Biaya dan dampak lingkungan dari semua yang disebutkan di atas, termasuk penggunaan energi bahan bakar fosil dan emisi karbon yang ditimbulkan

industrialisasi pertanian, pengolahan dan penjualan pangan. Sebagai contoh, besarnya jarak pengiriman bahan makanan dari produsen ke konsumen dan tingginya penggunaan pendingin bagi komoditas hortikultura yang bernilai tinggi;

12. Persoalan “keberlanjutan” atau sistem pangan global saat ini yang menghadapi “percepatan kontradiksi biofisik”-nya (Weis 2010): perkembangannya yang terus berlanjut atau reproduksinya yang semakin luas sejalan dengan trajektori yang telah ditetapkan.

Saat ini, setiap tema yang luas tersebut diperbincangkan dengan cukup baik dan telah membentuk suatu arena pertarungan antara perspektif yang berbeda di mana penilaian terhadap bukti-bukti yang relevan menjadi keharusan. Tantangan tersebut tidak dapat diuraikan di sini karena keterbatasan ruang (dan kompetensi penulis).²

2 Saya memasukkan satu contoh untuk menjelaskan tentang keberlanjutan, peluang untuk tumbuh, kelaparan dan malnutrisi (poin 10 dalam daftar tema kunci). Hal ini seringkali, dan dengan tepat, menunjukkan dinamika ketimpangan dan kemiskinan: siapa yang menderita kelaparan dan mengapa hal itu merupakan persoalan krisis reproduksi dalam ‘kelas-kelas buruh’ (bawah)—jutaan orang yang tidak mampu membeli atau menghasilkan makanan yang cukup (Oxfam 2010, 2, penekanan ditambahkan), yang dahulunya umumnya berasal dari kelompok-kelompok miskin di pedesaan dan perkotaan. Lebih lanjut, dalam konteks (ketidak)mampuan untuk membeli makanan, juga seringkali dinyatakan sebagai akibat relasi distribusi (siapa mendapat apa) dalam kapitalisme mutakhir, bukan karena kurangnya jumlah produksi pangan dunia (lihat Altieri dan Rosset 1999). Seringkali memang perbedaan antara membeli makanan dan menghasilkannya (*producing*) untuk kebutuhan sendiri dihilangkan (Kedaulatan Pangan adalah pilihan utama bagi yang menghasilkan makanan). Salah satu contoh aktual di sini adalah penilaian kritis atas publikasi FAO terbaru *State of Food Security* (2012) yang secara kolektif dikerjakan oleh Small Planet (2013). Small Planet menyebut tujuh negara sebagai contoh keberhasilan mengurangi kelaparan secara signifikan, kelompok beragam yang mencakup Ghana, Thailand, Vietnam, Indonesia, Brazil, China dan Bangladesh. Mengutip Oxfam (2010) sebagai salah satu sumbernya, keberhasilan negara-negara

Singkatnya, tema-tema tersebut sangat penting dalam penolakan KP secara utuh terhadap “korporasi industri usaha pertanian (*agriculture*)” yang roda penggeraknya, modalnya dan efeknya semakin meluas, yang merekam “berubahnya relasi pangan akibat industrialisasi produksi (usaha pertanian) dan globalisasi perdagangan hasil pertanian (*agriculture*)” (Wittman dkk 2010, 5), yang berakibat pada “kerawanan pangan, ketergantungan bahan bakar fosil dan pemanasan global” (McMichael 2010, 172).

Di satu sisi, poin-poin kritik tersebut mengindikasikan atau memperjelas sejumlah bukti mengenai menguatnya kegiatan pertanian kapitalistik, termasuk langkah perubahan pada teknis pertanian – khususnya penggunaan bahan kimia – dan perubahan industri di hulu dan hilir yang digerakkan oleh korporasi input pertanian serta industri pangan melalui strategi akumulasi (serta kekuatan lobi kelompok korporasi dalam pembentukan kebijakan publik); serta dampak yang berbeda bagi pertanian dan konsumsi pangan di negara maju dan berkembang, yang disebabkan oleh pembagian tenaga kerja dan perdagangan

tersebut dihubungkan dengan kebijakan progresif dalam pertanian dan/ atau perlindungan sosial. Kutipan dari laporan Oxfam (2010, 25-6) mengenai Vietnam: ‘untuk tinggal landas dimulai dengan landreform disektor pertanian, yang dilanjutkan dengan pembangunan pabrik-pabrik padat buruh dan, paling akhir, mempromosikan sektor elektronik dan teknologi tinggi (*high-tech*) dengan tujuan menjadi negara industri pada tahun 2020. Integrasi dengan pasar global mempermudah kenaikan ekspor dan investasi asing. Jika sebelumnya merupakan pengimpor beras, maka saat ini Vietnam merupakan pengeksport beras terbesar kedua di dunia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dukungan publik untuk pertanian skala kecil menjadi faktor yang penting. De-kolektivisasi (*de-collectivization*) atas properti, dan membuka impor pupuk (yang digunakan tiga kali lipat karena harga yang murah) membuat produksi pangan meningkat berlipat ganda. Semua bagian penekanan yang saya buat merupakan perspektif Kedaulatan Pangan yang akan dijelaskan kemudian.

komoditas pertanian secara internasional.

Di sisi lain, analisis KP (dan konsepsi-konsepsi terkait lainnya yang terinspirasi oleh persoalan ‘hijau’ atau masalah ekologi) menyoroti gambaran terbaru tentang sistem globalisasi mutakhir. Mungkin saat ini perubahan kuantitatif telah menjadi perubahan kualitatif, khususnya menyangkut aspek teknologi, misalnya meningkatnya kontrol dan privatisasi korporasi atas benih³ bersamaan dengan dilakukannya rekayasa genetika dan konsekuensi-konsekuensinya (lihat kembali daftar tema-tema kunci no. 4-8 di atas), munculnya konsep ‘kedaulatan benih/bibit’ sebagai komponen utama dalam KP (lihat Kloppenburg 2010a, 2010b); dan ‘*agrofuels boom*’ (tema kunci nomor 9) yang oleh Holt-Gimenez dan Shattuck (2010, 80, 86 dan *passim*) dikategorikan sebagai bentuk baru transisi agraria, akibat ‘kelebihan produksi kapitalis klasik’, dan menurunnya tingkat keuntungan di sektor agribisnis, serta jatuhnya (di tahap awal) ‘rantai industri pangan dan bahan bakar’ (lihat juga Weis 2010; McMichael dan Scoones 2010).

Dengan argumentasi ekologi-politik yang tajam, KP juga menekankan dampak sosial dari globalisasi neoliberal, seperti konsekuensi bagi asupan makanan dan kesehatan akibat industrialisasi makanan (tema kunci no 11, lihat juga Lang dan Heasman 2004); meluasnya kelaparan dan kekurangan gizi, baik ketika ketersediaan pangan cukup memadai maupun saat kekurangan, akibat peralihan tanaman pangan menjadi pakan ternak dan *agrofuel* (tema kunci no 10; lihat Bello dan Baviera 2010); serta menguat

3 Yang dimulai sejak tahun 1930an di Amerika Serikat melalui pengembangan benih jagung hibrida untuk mengantisipasi revolusi hijau, yang digambarkan dengan rinci dalam penelitian luar biasa yang dilakukan oleh Kloppenburg (2004).

dan masih berjalannya penggusuran petani dan pertanian skala kecil: jutaan keluarga petani kehilangan tanah dan komunitas pertaniannya (Wittman et.al 2010, 9); serbuan besar atas bentuk kehidupan petani yang tersisa di seluruh dunia (Friedmann 2006, 462); korporasi rezim pangan yang mencaplok lahan pertanian sebagai prasyarat bagi terciptanya konsolidasi korporasi untuk kegiatan pertanian (McMichael 2006, 476); dan pelenyapan dan penggusuran petani secara total melalui gelombang ‘penggusuran global’ (*global enclosure*) yang sering terjadi belakangan ini (Araghi 2009, 133-4).

Yang terakhir adalah tema paling penting dalam tulisan-tulisan mengenai KP, yang menekankan seruan kepada pertanian skala kecil sebagai alternatif bagi kegiatan pertanian kapitalistik dengan terus bertambahnya jumlah korporasi, industri dan pertanian global. Penggusuran pertanian skala kecil saat ini terjadi sebagai konsekuensi dari adanya tekanan terhadap reproduksi sosial mereka karena hilangnya dukungan publik (tema kunci no 3; Desmarais 2007; Bello dan Baviera 2010) dan juga liberalisasi perdagangan (tema kunci no 1; lihat Bello 2009), keduanya merupakan komponen dasar agenda kebijakan neoliberal, meski sebenarnya kebijakan ‘*dumping*’ melalui subsidi ekspor pangan yang dilakukan negara-negara maju juga memiliki sejarah yang panjang. Lebih jauh lagi, penggusuran juga merupakan dampak langsung dari ‘pencaplokan tanah’ (*land grabbing*): gelombang baru dari apa yang disebut sebagai ‘*global enclosure*’ (menurut istilah Araghi) yang dilakukan oleh perusahaan agribisnis transnasional, lembaga yang menguasai dana kesejahteraan publik (*Sovereign Wealth Funds*) dan perusahaan jasa keuangan, yang berkolusi dengan pemerintah di negara-

negara berkembang (dan negara-negara lain) untuk membangun perusahaan pertanian skala besar yang ditujukan untuk ekspor produksi pangan dan bahan bakar nabati (*agrofuels*) (Borras et.al 2011).

Singkatnya, mengingat bahwa saat ini kegiatan pertanian dunia membutuhkan lebih banyak agen/aktor dibandingkan dengan jumlah orang yang terlibat dalam perdebatan mengenai asal-usul dan perkembangan awal kapitalisme pertanian sebagai proses internal di pedesaan: kelas pemilik tanah, buruh (baik buruh tani maupun buruh upahan), dan kebangkitan kapital agraria. Di satu sisi, pertanian dunia sekarang ini mencakup, beragam jenis aktivitas pertanian dan petani dalam hubungan antar kelas sosial (kapitalis, produsen komoditas skala kecil, petani 'subsisten' atau petani yang melakukan kegiatan pertanian hanya untuk bertahan hidup (*survivalist*), dengan kekhasan dan keragaman masing-masing), dan berbagai kelas buruh (pedesaan). Di sisi lain, seperti yang diindikasikan, juga mencakup berbagai jenis (dan skala) modal yang berbeda dalam beragam situasi dari keseluruhan putaran kapital dan perluasan reproduksinya—sektor keuangan, sektor produktif, sektor perdagangan—begitu pula negara dan lembaga supra-negara (WTO, Bank Dunia).

Tentu saja, uraian tema-tema kontemporer penting (dan kadang saling bersaing) yang telah dibahas tersebut terkait dengan sejarah panjang kapitalisme dan kegiatan pertanian. Ini merupakan aspek yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Kapitalisme versus Petani

Awal mula istilah “kapitalisme versus petani (*capitalism versus the peasant*)” (Bello dan Baviera 2010, 69) adalah uraian terkenal Marx tentang ‘akumulasi primitif’ sebagai

‘...proses yang memisahkan produsen dari kepemilikan atas buruh-buruhnya sendiri (1976, 874 dan Ch 27 *passim*).⁴ Bello dan Baviera (2010, 73) merujuknya sebagai ‘proses berabad-abad penggusuran petani oleh kegiatan pertanian kapitalistik’, dan Handy dan Fehr (2010) melihatnya sebagai proses penggusuran di Inggris di abad ke-enam belas (sebelum revolusi industri pertama) dan khususnya di abad ke-delapan belas dan pertengahan abad ke-sembilan belas, ketika (kapitalis) ‘usaha pertanian bernilai tinggi’ mulai muncul (berdampingan dengan industrialisasi). Mereka juga menantang pandangan yang melihat bahwa corak pertanian kapitalistik memiliki keunggulan dibandingkan petani skala kecil pada periode masa panen, pada saat itu kemudian menjadi masa dengan ideologi bahwa (pertanian skala) *besar itu indah*, serta

4 Marx menilai penghilangan masyarakat petani sebagai sesuatu yang diperlukan, tetapi bukan kondisi yang memadai bagi pengembangan pertanian kapitalistik: ‘satu-satunya kelas yang tercipta dari penghilangan masyarakat pertanian adalah pemilik lahan skala besar’ (*passim* 905), karenanya sesuatu yang lebih jauh diperlukan untuk transisi kapitalisme. Bagi beberapa akademisi (seperti Byres 2006, Heller 2011) hal itu dapat terjadi, melalui ‘akumulasi primitif dari bawah (*primitive accumulation from below*). Konsep akumulasi primitif, yang merupakan konsep penting sepanjang sejarah kapitalisme, kembali dikenal melalui gagasan David Harvey tentang akumulasi dengan perampasan (*accumulation by dispossession*)’ dalam krisis *over-accumulation* kapitalisme global sejak tahun 1970-an (Harvey 2003). ‘Apakah ada konsep yang lebih ramai digunakan saat ini dibandingkan dengan konsep akumulasi primitif (termasuk analogi dan perluasannya)? Artinya, ramai karena definisinya yang luwes, dalam penerapannya yang meluas dan klaim yang dibuatnya. Untuk memahami berkembangnya klaim atas akumulasi primitif dan perdebatan tentang konsep ini, akan berguna untuk membedakan berbagai cara konsep tersebut diletakkan/bekerja: kombinasi dari substansi yang dimasukkan ke dalam konsep, bagaimana konsep tersebut disebarkan, dan bukti yang digunakan untuk menggambarkan atau mendukung beragam penggunaan’ (Bernstein 2013b, penelitian awal yang hendak saya kembangkan). Artikel paling tajam yang pernah saya baca mengenai hal tersebut adalah artikel yang ditulis oleh Derek Hall (2012).

menunjukkan pentingnya proses penggusuran/*enclosure* bagi perkembangan dan perluasan corak pertanian kapitalistik di masa selanjutnya.

Di luar perdebatan yang terus berlanjut tentang asal usul corak pertanian kapitalistik, dipicu oleh karya Robert Brenner (1976; lihat juga Ashton dan Philpin 1985), beberapa bagian atau bentuk lain akumulasi primitif diterapkan secara luas dalam analisa-analisa mengenai penataan kembali relasi sosial atas tanah dan tenaga kerja, poros penggerakannya, modalitas dan dampak-dampaknya (baik yang di sengaja maupun tidak sengaja) di ‘tiga benua’ wilayah kolonial yang luas (Amerika Latin, Asia, dan Afrika) yang beragam pada periode sejarah pembentukan ekonomi kapitalistik dunia yang berbeda-beda pula.⁵

Industrialisasi Sistem Pangan

Wittman dkk. (2010, 5) menyebut ‘dua ratus tahun industrialisasi sistem pangan’, yaitu beberapa abad setelah kemunculan awal kapitalisme agraria dan sekitar setengah abad sebelum periodisasi yang akan dijelaskan di bawah ini.⁶ Holt-Giménez dan Shattuck (2010, 85-6) mengemukakan bahwa globalisasi neoliberal mutakhir, khususnya ‘*agrofuels boom*’, merupakan bab sejarah

5 Lihat Bernstein 2010a (Chapter 3) dan referensi di dalamnya. Dalam penjelasannya mengenai sejarah panjang tentang *class-based agrarian civilisations*, Raj Patel (2010, 191) menyebutkan bahwa ‘situasi politik tidak pernah menguntungkan bagi yang memproduksi pangan; konteksnya yang kini global hanya meliputi *disenfranchisement* yang sudah berusia satu milenium’, meskipun makna dan ruang lingkup *disenfranchisement* saat ini sangat berbeda dari, katakanlah dengan, India abad pertengahan atau Eropa atau Mesir pada akhir masa akhir masa Antik (Banaji 2001).

6 Wittman (2010, 92) juga menyebut ‘pergantian abad ke-duapuluh’ sebagai momen penting yang ditandai dengan ‘penemuan mesin pembakaran internal dan inovasi penggunaan tenaga gas yang terjangkau untuk alat pertanian...’

penutup dari hubungan antara kegiatan pertanian dan industri yang sudah berlangsung sejak revolusi industri—dua bagian dalam satu bab. Bagian pertama, ‘petani dan kegiatan pertanian secara efektif menunjang industri dengan menyediakan makanan murah dan buruh murah’. Sementara, bagian keduanya, ‘penggunaan pupuk berbahan dasar minyak dan gas murah yang membuka kegiatan pertanian menjadi modal industri. Mekanisasi meningkatkan produksi, menjaga harga tetap murah dan membuat industri berkembang pesat. Setengah dari populasi dunia kemudian didesak keluar dari wilayah pedesaan dan masuk ke perkotaan’. Holt-Giménez dan Shattuck menyebut “pangan murah” sebagai pikiran utama yang bekerja dalam ekonomi politik kapitalisme dan kegiatan pertanian yang membawa dampak bagi KP, sebagaimana kita bahas berikut ini.

Rezim Pangan Internasional (International Food Regimes/ IFR)

Kerangka kerja KP biasanya menjelaskan gagasan kapitalisme sebagai ‘*sistem dunia*’ yang digunakan dalam spektrum yang luas, mulai dari agitasi-propaganda hingga analisis yang lebih dalam. Kapitalisme—atau dalam fase globalisasi saat ini—dikenal sebagai induk dari industrialisasi korporasi kegiatan pertanian, dengan penekanan yang berbeda untuk setiap aspek dan momentum dalam sejarah perkembangan kapitalisme, seperti yang sudah digambarkan sebelumnya. Bahkan, kapitalisme terkadang disederhanakan sebagai industrialisasi usaha pertanian, atau dipertukarkan dengan ideologi-ideologi modernitas (proyek modernisasi)—yang didasarkan pada sejumlah konsep tertentu seperti rasionalitas, efisiensi dan penaklukan alam— yang dipertahankan untuk

membangun sistem pangan dunia (*thesis*) yang dilawan oleh konsep KP (*antithesis*).⁷

Kerangka analitik paling kuat yang digunakan KP adalah analisis ekonomi politik Rezim Pangan Internasional dari tahun 1870-an, yang dikembangkan oleh Harriet Friedmann dan Philip McMichael (dan kemudian terus dipopulerkan oleh Weis 2007, dan Fairbairn 2010, serta lainnya). Saat ini, McMichael telah melengkapi konsep tersebut dengan genealoginya. Dalam genealogi tersebut, McMichael menelaah mengenai konsep awalnya, yaitu konsep “struktur primer” (2009, 144) yang dipengaruhi oleh pendekatan teori sistem dan regulasi dunia; perkembangan dan perluasannya (misalnya gerakan sosial, ekologi dan ilmu tentang gizi yang berkaitan, *passim* 140); dan kritik-kritiknya yang diambil dari pendekatan relasi-nilai-nya Marxis yang digunakan oleh Araghi (2003; lihat McMichael 2009, 154-6); serta penjelasan konsep rezim pangan yang terus berkembang (*passim* 156-161, banyak didiskusikan Dixon dan Campbell 2009). Rezim Pangan Internasional menawarkan konsep yang kuat, dengan menggunakan lensa sejarah yang komprehensif untuk melihat hubungan politik dan ekologi dengan kapitalisme

7 Penyempitan secara implisit makna kapitalisme menjadi konsepsi tertentu dari modernitas adalah sindrom Foucauldian umum, di mana bentuk ‘governmentality’ dihasilkan oleh pengalaman sejarah kapitalisme yang berbeda yang dianggap bagian otonom, seperti juga kepercayaan dan praktek birokrat dan perencana yang mencoba menerapkan ‘peraturan para ahli (*the rule of experts*)’ (Mitchell 2002). Poin lainnya yang relevan bagi diskusi ini adalah penolakan “kemajuan baik versi sosialis ataupun kapitalis” (Holt-Giménez 2006, xii, sebagaimana dikutip oleh McMichael 2010, 172) ketika keduanya memiliki visi yang hampir sama dalam melihat industri pertanian skala besar. Sesuatu yang dikenal sebagai kolektivisasi Stalinis di Uni Soviet, dan tampaknya juga dalam Partai Komunis di China mengenai hak milik pribadi dilahan pertanian yang merupakan perdebatan lama dan belum terselesaikan.

modern yang luas (*passim* 142).

Pada tulisan ini, saya mencoba membuat pengamatan singkat. Pertama, menarik untuk melihat bahwa studi awal Friedmann dan McMichael adalah penelitian sejarah kegiatan pertanian di dua lokasi yang menjadi ‘pemukim di wilayah kolonial (*settler-colonial*)’ pertama Rezim Pangan Internasional pada tahun 1870 – 1914, yaitu Amerika Serikat (Friedmann 1978a, 1978b) dan Australia (McMichael 1984), yang berbeda dengan zona ‘agraria besar di tiga benua’ di mana ‘persoalan petani’ (*peasant question*) terbentuk makin tajam pada masa kolonial dan masa selanjutnya. Oleh karenanya, masyarakat petani tidak ada dalam penjelasan Friedmann dan McMichael pada abad pertama pertumbuhan Rezim Pangan Internasional, hal ini karena pola perdagangan yang dibangun pada saat itu.⁸ Menurut McMichael, ‘pemukim Negara (*settler states*)’ merupakan gambaran awal dari bentuk ideal-industrialisasi usaha pertanian nasional (*national agro-industrialisation*) di abad ke-duapuluh (2009, 145, 141). Semua itu menjadi makin tajam akibat tidak adanya masyarakat petani di Negara-negara tersebut, merujuk pada kebutuhan untuk ‘mengurangi petani’ (*peasant elimination*), seperti yang dikemukakan oleh Kitching (2001, 148 dan Bab 10 *passim*).⁹

8 Seperti telah disebutkan di atas, bukan hanya ekspor gandum ‘murah’ pada masa Rezim Pangan Internasional kedua (yang menjadi perhatian utama mereka) dan masa setelahnya.

9 Semua itu tidak berarti bahwa negara pemukim tersebut tidak terlibat dalam kekerasan mengusir masyarakat adat; untuk kasus Amerika Serikat lihat Byres (1996, Bab 5) dan lihat Posting (2003, 2011) untuk kasus perbudakan, meskipun dalam pandangannya ‘non-kapitalis’ tetapi sangat penting dalam perkembangan kapitalisme di Amerika Serikat. Pandangan Rosa Luxemburg tentang akumulasi primitif di Amerika Utara dan Afrika Selatan sebagai ‘perjuangan melawan ekonomi petani’ menandai

Yang kedua, Rezim Pangan Internasional pertama hadir bersamaan dengan (i) transisi revolusi industri pertama menuju revolusi industri kedua, perubahan dari basis ekonomi yang menggunakan besi, batubara dan mesin uap menjadi ekonomi berbasis baja, kimia, listrik dan minyak bumi, yang dipercepat dengan pembangunan kekuatan produktif di pertanian,¹⁰ seperti juga pengolahan makanan, pergudangan dan transportasi: situasi pada periode Rezim Pangan Internasional pertama; (ii) bergesernya lokasi pembangunan kegiatan pertanian kapitalistik yang modern atau juga disebut agribisnis (untuk membedakan dengan aktivitas pertanian) dari Eropa Barat menjadi Amerika Serikat di awal transisi agraria (lihat Cronon 1991; Post 1995); dan (iii) hadirnya tiga serangkai baru pembagian kerja internasional (*international division of labour*) atas produksi dan perdagangan pertanian, dengan pusatnya Amerika Serikat dan Negara pemukim kolonial (*colonial settler*) lainnya (Kanada, Argentina dan Australia), Eropa beserta (sebagian besar) Negara Kolonial di wilayah tropis (Friedmann and McMichael 1989).¹¹

penghancuran sebagian besar bentuk subsistensi (pemukim) pertanian (1951, Bab 29)

10 Penemuan pupuk kimia dan bahan kimia pertanian lainnya, dan dampaknya terhadap produktivitas lahan (hasil panen), pengembangan tanaman ilmiah dan pengembangbiakan hewan (difasilitasi oleh pengetahuan baru genetika dan aplikasinya), yang juga berdampak pada hasil; penemuan dari mesin pembakaran internal dan penggunaannya dalam traktor dan mesin pertanian lainnya, telah mengubah produktivitas kerja.

11 Tentu saja, hal itu berhubungan dengan periodisasi Imperialisme menurut Lenin (1964). Menggunakan penjelasan yang berbeda, Jairus Banaji (2010, 333) menunjuk akhir abad kesembilan belas sebagai 'arus deras kapitalisme agraria (*the watershed of agrarian capitalist*)' yang ditandai dengan 'evolusi yang cepat' dari 'pengakuan atas modernitas' perusahaan pertanian kapitalis dan rezim tenaga kerja; medan 'gravitasi' yang menarik dan mengubah kerja industri Eropa dan Amerika jauh di wilayah pedesaan yang mereka bidik melalui jalan akumulasi dan penggusuran'. (*passim* 360)

Ketiga, terdapat perbedaan antara Friedmann dan McMichael terkait dengan apa yang menggantikan Rezim Pangan Internasional kedua –'industri perdagangan dalam Rezim pangan' (*'mercantile-industrial food regime'*) (menurut istilah Friedmann) di bawah hegemoni AS sejak tahun 1940an hingga awal tahun 1970an. Perbedaan tersebut dibahas oleh McMichael (2009, 151–4) yang berpendapat bahwa 'korporasi' Rezim Pangan Internasional ketiga telah mulai terkonsolidasi, sedangkan Friedmann (2005) menyebutnya sebagai kebangkitan 'korporasi sektor lingkungan dalam Rezim pangan' (*'corporate environmental food regime'*).¹²

Jadi, ada dua kesimpulan singkat. Pertama, runtuhnya Rezim Pangan Internasional kedua pada awal tahun 1970-an (Friedmann 1993) bersamaan dengan kebangkitan 'globalisasi neoliberal'. Yang kedua adalah analisis McMichael tentang rezim pangan, dan khususnya rezim korporasi mutakhir, untuk memperkuat advokasi KP yang menghubungkannya dengan banyak peristiwa 'perlawanan'.¹³

'Perlawanan'

Begitu banyak perdebatan yang kompleks terkait

12 'Dituntun' oleh para pengusaha retail makanan, perusahaan industri pertanian pangan secara selektif memenuhi tuntutan kelompok gerakan sosial atas lingkungan, makanan yang aman, kesejahteraan satwa, perdagangan yang adil, yang muncul di sela-sela rezim pangan kedua. Jika hal itu berhasil terkonsolidasi, rezim pangan yang baru tersebut berjanji akan mengubah keseimbangan sejarah antara regulasi publik dan swasta, dan memperluas kesenjangan antara konsumen utama dan mereka yang miskin, seperti juga memperdalam komodifikasi dan memarjinalkan petani yang ada. (Friedmann 2005, 227–8).

13 Akibatnya, upaya 'menghijaukan (*greening*)' analisis rezim pangan dilakukan melalui 'penemuan' masyarakat petani dan kebaikannya, khususnya seperti yang dikumandangkan oleh La Via Campesina sebagai gerakan perlawanan berbasis "jalan petani".

‘kegigihan masyarakat petani’ (*persistence of the peasantry*) di periode besar kapital, termasuk fase globalisasi saat ini, ketika ‘perlawanan’ petani tergambar dalam berbagai catatan dan skala:

...terwujud dalam perjuangan atas tanah, sewa, pajak, hutang, tanam paksa, kerja wajib/pengerahan buruh, dan beragam bentuk kontrol oleh Negara kolonial dan Negara merdeka yang dilihat sebagai pemaksaan pada petani kecil atas nama kemajuan —apakah sebagai misi kolonialisme untuk membuat masyarakat asli menjadi ‘beradab’, atau melakukan upaya ‘modernisasi’ kegiatan pertanian sebagai elemen strategis dari pembangunan ekonomi (Bernstein 2010a, 96, dan 95-7 *passim*).

Gambaran besar dan heroik tentang perlawanan petani telah ditulis oleh Eric Wolf dalam *Peasant wars of the twentieth century* (1969), dengan studi kasus Meksiko, Rusia, China, Vietnam, Aljazair dan Kuba pada tahun 1900-1960an. Gambaran lain yang lebih khusus dan kurang mendalam juga ditulis oleh James C. Scott dalam *Weapon of the Weak* (1985), sebuah studi di pedesaan Malaysia pada akhir tahun 1970-an. Scott menulis dengan provokatif bahwa dampak kumulatif dan terus berlangsungnya ‘perlawanan sehari-hari kaum tani’ (*everyday forms of peasant resistance*) di tengah diferensiasi sosial lokal pedesaan telah memberikan sumbangan lebih pada perbaikan kondisi bagi petani pemilik lahan dibandingkan episode pemberontakan dan konflik terbuka, yang dikenal luas, tetapi sesekali terjadi.

Wacana perlawanan dimasukkan dalam KP untuk menyuarakan dua hal berikut; pada skala yang lebih kecil di mana komitmen petani untuk melanjutkan aktivitas pertanian dengan cara yang khas, dijelaskan sebagai kearifan agroekologi dan nilai-nilai otonomi, komunitas

dan keadilan sosial, yang berhadapan dengan dampak negatif dari ekspansi kapital dan program ‘modernisasi’ suatu negara. Ketika terjadi kerusakan parah karena dijalankannya agenda neoliberal saat ini yang diperparah dengan penyingkiran/penggusuran (*enclosure/dispossession*), maka perlawanan petani —atas pangan impor murah, pencaplokan tanah (*land grabbing*), dan kecenderungan atas monopoli dan pemaksaan bentuk pertanian agribisnis— akan meluas, terhubung dan terorganisir, mengarah pada skala yang lebih luas yaitu ‘perlawanan petani tingkat global’ (McMichael 2006), dan La Via Campesina sebagai pelopor ‘gerakan agraria transnasional’ (*transnational agrarian movement*) (Borras, Edelman and Kay 2008a), begitu dihargai karena menciptakan slogan baru KP.

Apakah (ada) pencapaian kegiatan pertanian yang kapitalistik?

Pada tahun 1750 (pada awal periode revolusi industri pertama) jumlah penduduk dunia berkisar 750 juta orang (kurang lebih setengahnya adalah orang China). Pada tahun 1950, jumlah penduduk dunia menjadi 2,5 miliar. Jumlah tersebut terus berkembang hingga 6 miliar dalam 50 tahun berikutnya, dan diperkirakan bertambah sekitar sembilan miliar pada pertengahan abad ini. Angka pertambahan tersebut tidak mungkin dicapai tanpa perkembangan pesat produktivitas pertanian kapitalistik. Seperti yang dikatakan Robert Brenner (2001, 171-2), hanya kapitalisme yang mampu menghasilkan ‘proses pembangunan ekonomi mandiri yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan pertanian’ yang berhasil mengatasi dua hambatan besar dalam sejarah dunia: kecenderungan panjang populasi yang tumbuh lebih cepat dari pasokan pangan dan

ketidakmampuan masyarakat perkotaan, dan buruh non-pertanian untuk tumbuh lebih tinggi dari proporsi total populasi, sebagai dampak dari siklus Malthusian dari A ke B.¹⁴ Ini tidak berarti bahwa perkembangan usaha pertanian kapitalistik menjadi satu-satunya penjelasan bahwa pertumbuhan penduduk dunia lebih penting dari elemen lainnya dalam ‘gambaran besar’ ini, misalnya kontribusi ilmu kedokteran (pengobatan) yang dihasilkan oleh kapitalisme modern. Namun demikian, keduanya menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam era kapital, dan berlipat ganda serta saling terkaitnya inovasi sosial yang memungkinkan terjadinya perluasan skala eksistensi manusia, saya menyebutnya sebagai kekayaan (*richness*).

Tentu saja, semua itu bukan merupakan hasil dari proyek kapital dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Kekuatan penggeraknya, yang sejak kemunculannya hingga sekarang, adalah profit (keuntungan), atau dalam istilah Marx kebutuhan untuk meningkatkan pertambahan nilai. Yang bekerja melalui banyak kontradiksi di dalamnya untuk (dan menghubungkan) dinamika dasar kapital (persaingan antar kapital, kecenderungan ke arah krisis), antara kapital dan mereka yang mengeksploitasinya (konflik kelas) dengan ketertindasan (perjuangan demokrasi), serta antara kapitalisme dan alam (O’Connor 1998; Foster 2000;

14 Wittman (2010, 92) mengakui bahwa melalui industrialisasi pertanian, setidaknya sejak awal abad kedua puluh (lihat poin 5 di atas) ‘kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak makanan, lebih cepat dan dengan tenaga kerja yang lebih sedikit, menjadi kenyataan’. Waktunya tepat dalam periode Rezim Pangan Internasional pertama, yang diawali oleh ‘sejarah yang belum pernah terjadi dari kelas’ keluarga petani komersial di negara-negara pemukim kolonial (‘diaspora’) di Amerika dan di tempat lain (Friedmann 2005, 295-6).

Moore 2010, 2011). Setiap pandangan dialektika sejarah tentang kapital, baik kerusakan maupun pembentukannya (Berman 1983) memberikan perspektif yang berbeda bagi yang memandang kapitalisme hanya sebagai perusak.

Dan Apa yang dirusak? Untuk itu perlu diajukan pertanyaan yang lain, dan lebih khusus lagi, yaitu: Sejak kapan kebusukan kegiatan pertanian kapitalistik dimulai? ‘Apakah sudah termasuk di dalam (i) (semua) pengalaman kegiatan pertanian kapitalistik sejak awal?’¹⁵ (ii) termasuk dalam kapitalisme secara umum? (iii) Apakah itu ‘hanya’ menjadi persoalan di dalam industrialisasi dan/atau korporatisasi dan/atau globalisasi dari aktivitas pertanian (tergantung bagaimana tiga dimensi kegiatan pertanian kapitalistik diperiodisasi, secara terpisah atau digabung bersama)? Argumentasi KP, seperti telah disebutkan, biasanya difokuskan pada periode paling mutakhir, sementara elaborasi yang paling komprehensifnya – dinyatakan sebagai pengetahuan alternatif dan rasionalisasi hubungan (atau dasar bersama) antara masyarakat dan alam –merujuk pada kesepakatan jawaban atas dua versi pertanyaan pertama, kemudian mengarah ke pertanyaan lain: kapan ‘kebusukan’ kegiatan pertanian kapitalistik tersebut dimulai, apakah pada bentuk masyarakat pra kapitalis? Apakah periode-periode selanjutnya selalu dan pasti ‘lebih unggul’ bagi kapitalisme, secara sosial, moral dan/atau ekologis? Pada gilirannya ini mengarah ke pertanyaan berikutnya yang paling penting: siapa atau apa yang dimaksud dengan bentuk lain kapital (*capital’s other*) dalam fase sejarah dunia saat ini?

15 Diambil dari pendapat Duncan yang berbeda dan tidak biasa (Duncan 1996)

Bentuk lain Kapital (*capital's other*)

Dalam wacana KP, bentuk lain kapital 'diwujudkan/dipersonifikasikan dalam/menjadi 'petani', petani 'miskin', petani kecil, kadang 'petani menengah-kecil', 'petani, pemilik tani, buruh tani dan masyarakat adat (McMichael 2010, 168), dan (umumnya untuk) masyarakat penetap (*people of the land*)' (Desmarais 2002). Mereka dinilai sebagai 'bentuk lain kapital' karena keseluruhan kualitas terbaiknya, termasuk prinsip-prinsip dan praktek pertanian berkelanjutan, termasuk kemampuan untuk memelihara lingkungan tempat tinggal mereka (Wittman 2010,94); kesederhanaan masyarakat petani (McMichael 2010,176), dan 'visi mereka tentang otonomi, keragaman dan kerjasama' *versus* ketergantungan, standarisasi dan persaingan yang dipaksakan dalam pertanian oleh 'kekuatan modal dan pasar' (Bello dan Bavieri 2010, 74). Mereka adalah para pengusung 'teknologi lokal' yang 'seringkali mencerminkan pandangan dan pemahaman tentang hubungan dengan alam yang lebih realistis dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan warisan Eropa Barat' (Altieri 2010, 125), dan menyediakan dasar untuk 'mengubah nilai budaya-ekologi pedesaan sebagai produk global' (McMichael 2006, 472). Sementara 'keaslian' tampaknya identik dengan istilah 'tradisi' dalam perspektif agroekologi-nya Altieri (2008, 2010), McMichael (2010, 175-7) lebih menekankan kapasitas petani untuk beradaptasi dengan sejumlah perubahan (ia mencontohkan kecerdikan mereka bertahan dalam iklim dan lingkungan yang kering). Semua itu dan sejumlah kualitas lainnya dikombinasikan untuk menggambarkan, atau mengungkapkan, pemahaman radikal yang berbeda dengan pemahaman yang terpusat pada hubungan dan

dinamika pasar, sebuah 'modernitas alternatif' bagi kegiatan pertanian kapitalistik yang berbasis kearifan ekologis dan keadilan sosial yang rasional (McMichael 2009).

Tentu saja gambaran berikut adalah gambaran lama yang seringkali saling dipertentangkan, tentang 'petani' (*peasant*) dan (atau) 'jalan petani' (*peasant way*) yang diusung oleh populisme agraria, yang dinyatakan sebagai pembelaan 'keluarga' petani kecil melawan tekanan dilakukan oleh kelas-kelas ...kapitalisme – pedagang, bank, kapitalis pemilik tanah (*property*) skala besar, kapital agraria—dan tentu saja, melalui proyek 'pembangunan nasional' Negara, baik dalam varian kapitalis, nasionalis dan sosialis, di mana kolektivisasi usaha pertanian Soviet menjadi penanda utamanya (Bernstein 2009, 68).

Pada saat yang sama, KP menghasilkan banyak uraian baru mengenai topik 'keberpihakan pada petani' (Williams 1976), yang saat ini lebih banyak dibahas oleh pemikir-pemikir ekologi politik radikal, dalam periode baru globalisasi kegiatan pertanian yang kapitalistik. Seperti halnya antara (dua) konsepsi entitas kapital dan 'bentuk lain kapital', yang tidak selalu jelas yang mana yang memulai; di mana selalu ada pertanyaan menarik mengenai asal usul ide dan metodenya, sementara aspek yang lainnya sudah tampak jelas. Dalam kasus ini, menurut saya keseluruhan sisi positif rumusan 'bentuk lain kapital' tersebut menyatu dalam abstraksi tentang 'ekonomi petani' (atau 'moda produksi petani') yang dikombinasikan dengan apa yang disebut sebagai 'contoh simbolis' (*emblematic instances*) dari praktik-praktik 'posisi dan kedudukan' petani (McMichael 2010, 168), baik

di dalam atau di luar gerakan KP'.¹⁶ Di sini saya akan membatasi diri dengan sejumlah isu-isu terkait siapa itu 'petani'/petani kecil/pemilik lahan, sebelum melanjutkan untuk melihat jenis-jenis tindakan yang dibayangkan akan mengubah KP untuk terus menjadi gerakan transformasi 'sistem pangan dunia'.

Siapakah Petani itu?

Persoalan pertama adalah (a) apakah penyebutan istilah 'petani' (*peasant*), 'petani miskin/petani kecil', juga seringkali disebut petani-pemilik lahan menengah dan kecil atau juga untuk menyebut petani-pemilik lahan, buruh tani, komunitas adat, 'masyarakat penggarap' (*people of the land*) dapat disamakan,¹⁷ (b) jika demikian, apakah persamaan tersebut cukup memadai untuk kategori sosial yang dapat kita kenali dan digunakan untuk menilainya, dan (c) apakah kategori sosial yang diindikasikan, atau disiratkan, dalam penamaan tersebut cukup koheren

16 Penggunaan teori 'ekonomi politik' yang paling penting adalah karya A. V. Chayanov (1966), yang pertama kali dipublikasikan pada 1924-1925. Pada saat yang sama, Chayanov juga mengembangkan gagasan pembangunan pertanian petani kecil (*peasant farming*) melalui teknologi dan bentuk organisasi sosial yang baru (modern).

17 Jack Kloppenburg (2010, 370) tidak biasa dalam menghadapi, dan mencoba untuk menangani masalah ini (dan juga yang lainnya): "Apa pun perbedaan mereka, semua produsen tanaman hortikultura dan agronomi menanam benih di tanah. Di Nikaragua, para petani mungkin menanam kedelai dengan tangan di atas lahan setengah hektar, sedangkan para petani Iowa dapat menggunakan mesin *John Deere DB60* yang secara simultan menabur 36 baris kedelai di atas lahan seluas 2.500 hektar. Namun keduanya bisa jadi menanam bibit yang dibeli dari Monsanto -atau diselamatkan dari panen sebelumnya. Mereka berada dalam posisi struktural yang sama dalam kaitannya dengan Monsanto dan Syngenta dan DuPont...". Pernyataan tersebut juga mencakup semua petani, dari sangat kecil hingga sangat besar, gambaran tanaman komoditi itu sendiri mungkin menjadi bagian dari persoalan bagi banyak pendukung KP, dan tentu saja ketika itu tanaman monokultur di atas lahan 2.500 hektar.

dan berguna.¹⁸ Misalnya, apakah ada perbedaan antara 'petani' dan 'petani kecil'?¹⁹ Siapa 'petani miskin', dan apakah penambahan kata 'miskin' cukup jelas untuk membedakan dengan mereka yang digambarkan 'tidak miskin'? Jika demikian, apa pokok perbedaan itu? Di sisi lain dari 'rentang' kategori tersebut, apakah ada perbedaan sosial antara petani kecil dan menengah? Atau apakah mereka dikumpulkan menjadi satu yang kemudian hanya berfungsi untuk membangun bentuk umum 'lain' untuk pertanian skala besar?²⁰ Dan apa yang disebut dengan buruh pertanian? Borras dan Franco (2010, 116) mencatat bahwa buruh pertanian 'memiliki kepentingan kelas yang berbeda dari buruh pedesaan', dan Patel (2010, 190)

18 Patel (2010, 186) mencatat 'Ketegangan antara penduduk wilayah geografis yang berbeda... tidak hanya antara produsen dan konsumen tetapi di antara kelompok 'petani kecil' itu sendiri, di mana sumbu kekuasaan yang berkisar dari patriarki hingga feodalisme', meskipun ia tidak mempelajarinya lebih jauh atau mempertimbangkan dinamika dan efek komodifikasi dan diferensiasi (lihat penjelasan berikut).

19 Apa yang disebut 'petani kecil' adalah benar-benar persoalan sosial, dan juga relasional. Jika hanya menggunakan ukuran luas lahan -katakanlah, dua hektar (Altieri 2008, juga dikutip oleh McMichael 2010) -di berbagai macam kondisi sosial dan ekologi pertanian tentu saja tidak berguna. Luas lahan 'terkecil dari yang kecil' dibandingkan luas lahan rata-rata yang ada terletak di China di mana 50 persen petani bercocok tanam di atas 0,03-0,11 ha dari lahan yang terseedia, dan kurang dari 3 persen mengolah lebih dari 0,67 ha, menurut Li (2012, 15, lihat juga Li et., al. 2012). Apakah pertanian skala kecil menawarkan dukungan bagi 'jalan petani' adalah persoalan yang lain. Hasil panen yang sangat tinggi di pertanian skala kecil di China diperoleh melalui irigasi, perluasan penggunaan benih hibrida (dan meningkatnya penggunaan rekayasa genetik?), penggunaan yang berlebihan pupuk kimia, dan tenaga kerja yang sangat intensif. Ini berarti bahwa kesenjangan antara hasil panen di China dan Afrika sub-Sahara, sebagai contoh, jauh lebih besar daripada kesenjangan dalam produktivitas tenaga kerja (Bernstein 2012c, dan perhitungan dari Li 2012). Sebuah versi revisi dari Bernstein (2012c) akan segera dipublikasikan dalam volume yang diedit oleh Mahmood Mamdani dan Giuliano Martiniello.

20 Dalam kepentingan membangun koalisi? terutama di wilayah pertanian di Utara di mana La Via Campesina telah hadir atau ingin hadir?

menyebutnya sebagai pemusatan kapitalisme agraria akan menghasilkan kepentingan yang berbeda antara ‘pemilik pertanian dan buruh pertanian’ (‘pemilik pertanian’ di sini bisa jadi mencakup juga sebagian besar, jika tidak semua, petani kecil dan menengah).

Apakah semua petani sama (melakukan hal yang sama)?

#1

Apakah semua petani/petani kecil menunjukkan kualitas ‘bentuk lain’ yang telah dibahas sebelumnya? Jika tidak, maka mereka yang memiliki kualitas tersebut mungkin dapat dianggap sebagai pelopor ‘jalan petani (*peasant way*)’. Sudah ada banyak bahasan mengenai persoalan ini. Misalnya, Miguel Altieri, seorang agroekolog terkemuka dalam KP, melihat bahwa ‘proporsi antara petani skala kecil dan menengah adalah konvensional’ (2010, 122).²¹

21 Sebuah proporsi yang besar untuk banyak kasus. Selain itu, penulis (Bernstein 2010a, 97) mencatat bahwa ‘sejumlah petani kolonial sendiri memulai jalur baru yang produksi komoditas tertentu’. Dalam studinya, Polly Hill (1963)... menyediakan contoh yang baik dari transformasi yang dilakukan sendiri dari petani ‘subsisten’ menjadi produsen komoditas. Lebih jauh, Hill secara jelas melihat sepanjang waktu mereka yang paling berhasil (petani kakao)... akan berubah menjadi petani kapitalis. Secara umum, dapat dikatakan, daripada sekedar menjadi korban yang pasif atau secara aktif menolak tekanan kolonial, banyak petani berusaha untuk bernegosiasi pergeseran produksi komoditas (komodifikasi subsisten) yang mereka hadapi, dalam situasi yang lebih atau kurang menguntungkan, dengan memobilisasi sumber daya yang lebih besar atau lebih kecil dari tanah dan tenaga kerja, dan berharap sukses yang lebih besar atau lebih kecil. Respon yang hampir sama juga berlaku atas pemaksaan “pembangunan nasional” setelah kemerdekaan dari pemerintah kolonial. Saran utama pada bagian ini dapat diperluas, yaitu bahwa tidak semua petani kecil adalah korban pasif atau secara aktif melawan globalisasi neoliberal (atau fase yang berbeda dari kapitalisme sebelumnya). Situasi menempatkan sebagai korban/pejuang akan runtuh pada saat, seperti yang sering terjadi, para pemimpinnya dan gerakan ‘perlawanan’ berasal dari kelompok petani kaya dan menengah atau produsen komoditas yang lebih sukses, contohnya, peran sentral ‘petani menengah’ dalam sosiologi politik Wolf dalam “*Peasant Wars of The Twentieth Century*” (1969), dan untuk contoh yang lebih

Dia kemudian memberikan contoh (‘simbolis’) petani yang mengembangkan polikultur di dataran tinggi Amerika Tengah, berhadapan dengan situasi iklim yang buruk untuk menghindari ‘kerugian ekonomi yang jauh lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya yang mengembangkan monokultur’ (*passim* 124–5, dengan penekanan tambahan). Menarik untuk memahami lebih jauh tentang mereka yang mempraktekkan diversifikasi pertanian dan mereka (dan wilayah sekitarnya) yang mempraktekkan ‘pertanian konvensional’: apakah keduanya berbeda dalam terminologi sosial ekonomi. Jika tidak, dapat disimpulkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan itu sebagai hasil atas pilihan, pilihan ‘baik’ dan pilihan ‘buruk’.²²

Lebih jauh, perlu dipertanyakan kembali apakah fakta bahwa beberapa petani/petani kecil (pelopor) menunjukkan kebaikan ‘otonomi, keragaman dan kerjasama’ (secara terpisah atau bersama-sama) dalam praktek pertanian mereka, dan sementara sebagian lainnya tidak, ini merupakan hasil atas ‘pilihan’ atau ketiadaan pilihan. Keduanya tentu saja memungkinkan,

baru, kasus ‘*New Farmers’ Movements*’ di India pada tahun 1980 (Brass, 1994) yang berkampanye untuk memperoleh harga produsen yang lebih baik dan input pertanian yang lebih besar serta subsidi lainnya, mirip dengan lobi-lobi pertanian di Utara.

22 Tampaknya hal itu didorong oleh Jan Douwe van der Ploeg tentang ‘new peasantries’ di bagian Selatan dan Utara (2008, lihat khususnya Bab 2 dan 10), dan perbedaan yang kontras antara ‘prinsip-prinsip petani (*the peasant principle*)’ yang bertujuan setidaknya relatif otonom dari pasar, dengan ‘bentuk kewirausahaan’ (*the entrepreneurial mode*) pertanian yang mendukung produksi komoditi. Keduanya adalah persoalan ‘pilihan’ (nilai dll) - ‘baik’ dan ‘buruk’ - dengan bahasan utamanya pada kondisi dan dampak atas pilihan tersebut dalam beragam jenis pertanian. Karyanya memiliki nilai jangka panjang yang menunjukkan kombinasi langka pengetahuan atas praktek pertanian –apa yang petani - di berbagai belahan dunia, berasal dari sumber pertama, dan secara serius mengamati (beragam) pola komodifikasi

tetapi untuk memahami kapan, di mana dan mengapa itu muncul (dan mungkin berubah), memerlukan investigasi yang lebih cermat mengenai kondisi yang menghambat dan kesempatan yang dihadapi oleh berbagai kategori petani kecil tersebut. Sehingga, diperlukan pertimbangan kondisi ekologi dan pasar, serta pertimbangan diferensiasi kelas petani kecil (dan menengah).

Apakah semua petani sama (melakukan hal yang sama)?

#2

Posisi dasar saya dalam hal ini, adalah bahwa sudah tidak ada lagi yang disebut sebagai ‘petani’ (*peasant*) dalam kapitalisme global kontemporer saat ini. Argumentasi itu cukup dalam dibahas dalam tulisan lain (lihat Bernstein 2010a), dan tidak akan dibahas kembali dalam tulisan ini. Sangat penting untuk memasukkan proses ‘komodifikasi subsistensi’ dalam kapitalisme; transformasi petani (*peasant*) menjadi penghasil komoditas kecil (*petty commodity producers*); konsekuensi dari internalisasi relasi komoditas dalam reproduksi rumah tangga pertanian; kecenderungan yang melekat pada persoalan diferensiasi kelas produksi komoditas kecil (*petty commodity production*), baik pertanian sebagai basis tunggal/utama reproduksi rumah tangga ataupun dikombinasikan dengan aktivitas lainnya – dengan cabang aktivitas produksi komoditas kecil lainnya (termasuk jasa dan kerajinan) dan/atau yang paling penting adalah menjual tenaganya; Dinamika yang terkait erat lainnya, yang juga terjadi di mana-mana, adalah pemasukan dari aktivitas di luar pertanian (*off farm*) yang didapat semua kelas petani (meskipun biasanya berasal dari sumber yang berbeda, dan untuk tujuan yang berbeda, sesuai dengan kelasnya), dan ketergantungan aktivitas pertanian para ‘petani’ kepada pasar tenaga kerja

pedesaan.

Semua proses tersebut menghasilkan bekerjanya ‘*mikro-kapitalisme tanpa henti*’ produksi komoditas kecil (*petty commodity production*) di pedesaan (istilah yang digunakan Mike Davis 2006, 181, untuk ‘ekonomi informal’ di perkotaan), yang mendahului ‘makro-kapitalisme’ korporasi usaha pertanian/agribisnis yang saat ini saling terkait satu sama lain. Tentu saja proses tersebut, yang diuraikan secara sistematis, bekerja dengan cara yang sangat beragam, baik di antara ataupun di dalam kelompok petani dan wilayah yang berbeda sepanjang waktu. Menurut penulis (Mike Davis), hasil penelitian konkret mereka menunjukkan bagian penting dalam memahami siapa itu petani, dalam kondisi apa, dengan cara bagaimana – seperti yang dinyatakan sebelumnya – dan itu membawa dampak pada seberapa besar produksi yang digunakan untuk konsumsi dan seberapa banyak surplus yang mereka butuhkan, sehingga dapat menyuplai kelompok non-petani, yang selalu lebih rendah.

Satu kesimpulan penting yang dihasilkan dari perspektif ekonomi politik adalah sangat sedikitnya jumlah penghasil komoditas skala kecil di dunia ini yang mampu melakukan reproduksi, apalagi secara eksklusif, di atas lahan pertaniannya sendiri jika dibandingkan dengan besarnya jumlah ‘petani (*peasant*)’ yang diklaim oleh pendukung KP. Angka tersebut biasanya memasukkan semua yang terlibat dalam aktivitas pertanian, meskipun marjinal, sebagai bagian reproduksi mereka (misalnya, diperkirakan lebih dari 60 persen ‘petani’ di India), seringkali semuanya dimasukkan dalam populasi ‘pedesaan’ (*rural*) dalam sensus dan survey, yang juga memasukkan mereka yang tidak memiliki akses terhadap tanah, mereka yang tidak terlibat

(tidak memiliki sendiri) lahan pertanian, dan mereka yang sangat bergantung pada ‘buruh lepas’ (*footloose labour*) untuk kegiatan reproduksi mereka (Bremen 1996). Hal itu juga bermakna bahwa bagian terbesar dari masyarakat pedesaan di Negara berkembang, mungkin juga mayoritas di banyak tempat lainnya, lebih bisa dipahami sebagai bagian dari ‘kelas buruh’ daripada ‘kelas petani’ dalam pengertian yang lebih pasti.²³

Dengan alasan itulah, maka saya merasa skeptis melihat perkiraan angka dan proporsi populasi (terutama non-petani) yang makanan pokoknya dipasok dari pertanian skala kecil, serta klaim yang mengikutinya karena ada begitu banyak jumlah petani/petani kecil yang bahkan kontribusinya kecil dalam output produksi pertanian mereka akan berpengaruh pada jumlah pasokan makanan (lihat Altieri 2008, 2010). Apakah terdapat bukti kuat bagi kondisi penting tersebut? Untuk pertanyaan tersebut saya akan secara jelas menunjukkan bahwa pandangan skeptis itu tidak melebar pada apa yang saya sebut, bahwa mereka masuk ke dalam kategori dinamika kelas produsen komoditas kecil (dan tidak begitu kecil). Seperti yang

23 Tidak ada perhitungan yang tepat mengenai jumlah tenaga kerja migran di kedua negara yang memiliki populasi ‘petani’ terbesar di dunia, China dan India. Di China statistik resmi menghitung petani sebagai ‘mereka yang secara resmi didaftar oleh pemerintah sebagai penduduk pedesaan’, termasuk sekitar ‘150 juta orang yang terdaftar sebagai petani yang bekerja jauh dari rumah dalam industri dan jasa... dan 150 juta lainnya yang bekerja di luar wilayah pertanian disekitar tempat tinggal’ (Huang et. Al., 2012, 142). Dalam kasus ini, ‘tenaga kerja pedesaan di luar pertanian’, dalam istilah penulis, mungkin sekitar 300 juta tenaga kerja secara resmi ditetapkan sebagai ‘petani’! Untuk kelas buruh di pedesaan di India, lihat Lerche (2010, 2013), juga Harriss-White (2012) yang ‘mengambil bagian sebagai produsen komoditas kecil’, baik di pedesaan maupun perkotaan, yang juga berpendapat kelas masyarakat petani di di India telah menghilang meskipun diferensiasi kelas di pedesaan menurut ukuran akumulasi agraria kurang lebih tetap.

dinyatakan oleh seorang ekonom pertanian Sub-Sahara Afrika:

...jika akses ke pasar (seperti yang dipromosikan sebagai ‘refomasi’ neoliberal, namun sesungguhnya sudah lama dilakukan, HB) seperti yang diceritakan, maka seharusnya setiap petani di semua tempat sudah menerima keuntungannya. Tapi apakah memang demikian? Diferensiasi sosial dalam masyarakat petani tampaknya tidak lagi menjadi menarik untuk diteliti, akibatnya studi kasus yang dipublikasi dalam dekade terakhir cenderung tidak melihat diferensiasi tersebut. Apa yang dituliskan mengkonfirmasi ketakutan terbesar kita bahwa diferensiasi adalah penting. Kapan dan di mana ekonomi pertanian berkembang tampaknya yang terjadi adalah **bagian terbesar surplus yang dipasarkan berasal dari sekelompok kecil dalam kelompok petani...**(Wiggins 2000:638, penekanan ditambahkan).

Dan ‘Komunitas’ Petani?

Komunitas petani merupakan (bagian) wacana yang lain dan penting serta potensial dalam populisme agraria yang dibawa oleh KP. Prinsip-prinsip yang melekat di dalamnya juga memasukkan kerja sama (seperti diuraikan di atas), hubungan timbal balik, kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai identitas lokal.²⁴ Itu merupakan ‘contoh (simbolis)’

24 Di antara banyak pengertian tentang fungsi dan asal usul ‘komunitas’ yaitu yang berasal dari berkah (*grace*), yang integritasnya hanya dapat dilanggar oleh kedengkian ‘dari luar’. Ini adalah kiasan yang umum dalam ‘doktrin pembangunan’ (Cowen dan Shenton 1996) yang diterapkan di wilayah kolonial Afrika untuk membatasi pembentukan kelas dan menjaga tatanan sosial, berbasis otoritas adat yang palsu (‘pemerintahan tidak langsung’, lihat juga Cowen dan Shenton tahun 1991, juga perhatikan catatan 25 di bawah). Lebih dari sekedar gema dalam sejumlah pandangan populis ini mengenai subversi komunitas petani oleh kekuatan ‘eksternal’ pasar dan negara. Lebih jauh, penyebutan ‘komunitas’ (dan lokal) sering tampak menyerupai pandangan Marx muda terhadap agama yang disebutnya sebagai ‘*the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions*’ (Marx 1843/2009) – dan

yang sering dimunculkan ketika membahas persoalan pangan, misalnya pada saat berbagi dan bertukar benih (Isakson 2009; Altieri 2010; Bezner Kerr 2010), mengumpulkan tenaga kerja untuk aktivitas menanam, dan redistribusi bahan makanan dari rumah tangga yang memiliki surplus kepada mereka yang kekurangan, serta bentuk solidaritas (politik) lainnya. Pada saat yang sama, komunitas biasanya juga dijadikan sebagai contoh ‘esensialisme strategis/*strategic essentialism*’ (Mollinga 2010) dalam wacana KP, yang dalam wacana populis yang lebih luas, konsep tersebut dianggap mengaburkan kontradiksi dalam ‘komunitas’ itu sendiri.²⁵

Singkatnya, masih belum ada teori yang cukup kuat (seperti begitu banyak hal lain); apakah diferensiasi kelas digunakan atau tidak, ‘komunitas’ dan reproduksinya selalu melibatkan ketegangan relasi gender dan juga relasi antar generasi. Yang pertama, relasi gender, yang sudah secara luas diakui, sedangkan relasi antar generasi masih belum diakui secara luas.²⁶ Dalam narasi perbandingan yang cukup bagus, yaitu ‘ketegangan antar generasi dihasilkan dari dua perbedaan yang dibentuk oleh krisis reproduksi sosial’ (*‘intergenerational tensions resulting from two differently*

menjadi opium bagi sejumlah intelektual?

25 Meskipun penyatuan tenaga kerja, yang awalnya merupakan praktik timbal balik adat, dapat bermakna eksploitasi ‘terselubung’ antara rumah tangga yang berbeda akibat komodifikasi, seperti yang ditunjukkan Mamdani (1987).

26 Untuk literatur KP lihat, misalnya, Bezner Kerr (2010) dan aktivis MST Itelvina Masioli (Masioli dan Nicholson 2010, 41) yang menekankan ‘semua nilai-nilai patriarki yang begitu kuat dalam masyarakat pedesaan kita’. Penggunaan teori relasi gender, tentu saja, melibatkan jauh lebih banyak dari yang mereka akui sebagai fokus utama mereka; untuk contoh yang lebih baik dari konfrontasi cara yang rumit di mana dinamika gender bersinggungan dengan kelas dalam konteks sosial tertentu, lihat O’Laughlin (2009).

configured crises of social reproduction’), di Pantai Gading (*Côte d’Ivoire*) dan Sierra Leone, Chauveau dan Richards (2008, 546,) menyimpulkan bahwa:

Dalam satu kasus (stratifikasi kelas komunitas agraria di dataran tinggi hutan Guinea/*Upper Guinea Forest* (UGF)), kegagalan mendasar untuk menyatukan kelas bawah (*underclass*) mengakibatkan terjadinya kekerasan yang terarah pada institusi adat di pedesaan....Di kasus yang lain—komunitas egaliter di wilayah tengah UGF—ruang untuk melakukan ekspansi dalam batas hutan yang cukup luas memberikan keleluasan kepada kepala adat untuk menyesuaikan kebiasaan mereka (adat) dengan memasukkan persyaratan pembiayaan untuk mereproduksi generasi yang lebih muda. Kegagalan ekonomi di perkotaan memaksa generasi muda tersebut kembali ke rumah mereka, yang pada akhirnya menghasilkan krisis kembali... Perbedaan yang mencolok antara kekerasan etnis yang dikaitkan dengan perang di *Côte d’Ivoire* dan kekerasan berbasis kelas menentang keluarga kepala suku di Sierra Leone, intinya adalah perselisihan antara dua kelompok anak muda yang miskin dan memiliki mobilitas tinggi.

Tentu saja, intinya adalah untuk tidak menerapkannya dengan cara dan ukuran yang sama di semua komunitas pedesaan. Selain itu, Chauveau dan Richards menggunakan teori dan membuat perbedaan, yang cukup dalam, dua contoh khusus dari kontradiksi dalam komunitas pedesaan yang mungkin terlihat ‘ekstrem’, namun sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru, untuk menerapkan formulasi Mahmmod Mamdani (1987). Pandangan yang hampir sama juga di ungkapkan Saturnino Borrás dan Jennifer Franco (2010, 115) ketika menyinggung bahwa di banyak tempat ‘kaum miskin di pedesaan tidak memiliki akses untuk dan/atau kontrol atas sumber lahan, yang biasanya

dikuasai oleh kelas pemilik tanah, negara atau komunitas', dan terakhir mengacu pada 'elit lokal' yang terbentuk dalam, atau melalui, ketimpangan sosial di komunitas²⁷

Bentuk lain (agroekologi) Kapital dan 'contoh simbolis'

Terdapat sejumlah perkembangan penting dalam agroekologi pada beberapa dekade terakhir yang meruntuhkan warisan konsep keseimbangan dalam proses lingkungan, yang banyak terjadi di wilayah tropis semi-kelembaban (*the semi-arid tropics*), yang menyumbang pemahaman yang lebih baik bagi aktivitas pertanian untuk mereka yang menetap di sana. Untuk wilayah sub sahara Afrika, satu karya penting dalam hal ini adalah kajian sejarah yang ditulis oleh Fairhead dan Leach (1996) tentang '*mosaik hutan savana*' di wilayah sub sahara, meskipun studi tersebut terbatas karena mengabaikan ekonomi politik, seperti kebanyakan kajian sebelumnya, mereka terinspirasi untuk menantang 'kearifan yang diterima di lingkungan Afrika' (Leach dan Mearns 1996; lihat juga Bernstein dan Woodhouse 2001). Menariknya, sejumlah ciri 'contoh simbolis' dari kearifan pertanian

27 Ini adalah topik hangat di Afrika Selatan dan tempat lain di sub - Sahara Afrika, karena meningkatkan klaim yang dibuat para kepala adat atas tanah 'komunitas' dan sumber daya lain - untuk kasus Afrika Selatan lihat Claassens (2013), dan Ghana Grischow (2008) yang menunjukkan kekhawatiran terulangnya ideologi pemerintahan colonial tidak langsung (*indirect rule colonial*) pada masa 1920 dan 1930-an dalam wacana pembangunan saat ini mengenai 'komunitas' dan 'modal sosial'-nya. Dalam esainya tentang Malawi, Rachel Bezner Kerr (2010, 134, 147) menunjukkan bahwa 'dinamika sosial di sekitar isu benih merupakan elemen penting dalam perjuangan untuk kedaulatan pangan antara pria dan wanita, generasi yang berbeda, (dan) komunitas' serta 'negara, ilmuwan dan perusahaan swasta', dan bahwa sementara 'komunitas dan jaringan kerabat tetap menjadi sumber benih yang layak dan penting bagi banyak petani skala kecil... jaringan ini penuh dengan kontestasi yang menyingkirkan petani tak bertanah, perempuan muda dan keluarga yang terkena dampak AIDS dengan akses dan kontrol yang kurang atas benih.'

skala kecil terpusat di wilayah-wilayah padat penduduk, seperti sepanjang pinggiran Sahara, Nigeria, Niger, Senegal, Burkina Faso dan Kenya (Lim 2008), dan dataran tinggi tengah di Burkina Faso dan Niger bagian selatan (Reij 2006; kedua penulis dikutip oleh McMichael 2010).

Semua penelitian tersebut menyumbang perdebatan panjang di antara mereka yang melihat Afrika, baik sebagai wilayah 'kelebihan penduduk' dan 'kekurangan penduduk'. Yang pertama berhubungan dengan 'narasi krisis' Malthusian tentang kerusakan lingkungan (di wilayah yang sangat luas untuk wilayah penggembalaan ('*over-grazing*'), proses terjadinya gurun (*desertification*), dan kerusakan hutan ('*deforestation*') karena meluasnya wilayah pertanian). Sedangkan yang kedua terkait dengan sejumlah pandangan kontra-Malthus. Salah satunya, Boserup (1965), yang membahas sistem pertanian kelompok perempuan Afrika di wilayah berpenduduk sedikit, sehingga mengakibatkan tidak adanya tekanan penduduk di atas lahan pertanian intensif dengan inovasi teknologi, sementara studi Tiffen, Mortimore dan Gichuli (1994) di distrik Machakos menunjukkan pertumbuhan penduduk hingga enam kali lipat selama enam dekade yang diikuti meningkatnya produktivitas lahan dan tumbuhnya pendapatan, seperti yang ditegaskan dalam bukunya berjudul *More people, less erosion*.²⁸

28 Perlu juga dicatat Clark dan Haswell (1964), salah satu dari sedikit orang yang kontra - Malthus, dan pendukung natalist, teks yang dibuat oleh pendeta Katolik Roma, seorang ahli statistik ekonomi perintis dan ekonomi pembangunan, dalam hal ini juga menulis bersama seorang ekonom pertanian di Afrika Barat. Situasi 'kekurangan penduduk' telah berubah oleh angka laju pertumbuhan demografis di sub Sahara Afrika, wilayah yang memiliki angka pertumbuhan dan angka urbanisasi tertinggi di antara wilayah lainnya (Severino dan Ray 2011). Pauline Peters (2004) menyediakan hasil survei yang berharga dan analisis kelas serta

Penelitian tersebut digunakan sebagai ‘contoh simbolis’ oleh Lim (2008), meskipun ia tidak mengutipnya (dan anehnya menempatkan distrik Machakos dalam wilayah pinggiran Sahara). Sebagaimana meyakinkannya Tiffen dkk. memberikan contoh mengenai ‘bentuk lain kapital (*capital others*)’ sebagai hal yang berbeda. Pertama, menurut tesis mereka bahwa hasil yang mengembirakan tersebut – ‘mendebat pandangan Malthus’ (Tiffen dan Mortimore 1994) – tidak didorong oleh agroekologi ataupun nilai-nilai dalam ‘komunitas’, namun merupakan hasil dari upaya petani merebut peluang pasar dan investasi dalam konservasi untuk meningkatkan produktivitas lahan secara intensif dan mendapatkan keuntungan dari panen, yang didukung oleh penyediaan kebutuhan publik seperti pendidikan yang tidak ‘mendistorsi’ sinyal pasar. Singkatnya, mereka tidak melihat petani di Machakos sebagai ‘bentuk lain kapital’ melainkan sebagai contoh ‘*homo economicus*’. Kedua, studi yang menggugurkan penafsiran ini, adalah studi lanjutan yang dilakukan oleh Andrew Murton (1999), yang memperlihatkan tiga kualifikasi strategis sebagai bukti tesis Tiffen. Pertama, ia melihat distribusi pendapatan non-pertanian, investasi dalam konservasi dan produktivitas pertanian, dan tanah di Machakos, di mana aspek diferensiasi sosial yang ada tidak dilihat (atau diabaikan) oleh Tiffen dan kawan-kawan.²⁹ Kedua, dana dari pekerjaan perkotaan menyediakan sumber strategis untuk investasi di bidang pertanian dan konservasi. Ketiga, ini memiliki aspek sejarah/generasi yang penting (mudah dan sering diabaikan), yaitu bahwa

dinamika sosial lainnya yang mengakibatkan meningkatnya konflik atas tanah di sub Sahara Afrika.

29 Lihat juga komentar kritis Dianne Rocheleau (1995).

para pionir investasi tersebut berada dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk mereproduksi dan memperluas usaha pertaniannya dibandingkan dengan mereka yang miskin dari generasi ke generasi. Murton menyajikan gambaran Machakos menggunakan dua teori Boserup-bentuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas oleh petani kaya (kisah sukses yang disorot oleh Tiffen)–dan tekanan reproduksi atas kaum miskin yang mengalami siklus kerugian dan kemunduran akibat menurunnya hasil panen, berkurangnya kesuburan tanah dan menyusutnya tenaga kerja yang merupakan fase awal konservasi dan capaian produktivitas yang kemudian diikuti dengan pertumbuhan penduduk’ (Murton 1999: 34). Contoh tersebut menggambarkan bahwa isu-isu ekonomi politik masih perlu diselidiki lebih lanjut sebagai ‘contoh simbolis’ (lain) dari rasionalitas (‘kisah keberhasilan’) ‘petani’/petani kecil (yang tidak terdiferensiasi) sebagaimana yang diklaim oleh para pendukung KP.³⁰

Ini berlaku pula untuk kasus lain di dataran Afrika, terkait rehabilitasi lahan dan konservasi air di Sahel setelah terjadi kekeringan pada tahun 1970an, yang diuraikan oleh McMichael di atas (dikutip dalam pembahasan tentang Reij 2006) sebagai contoh simbolis dari adaptasi petani untuk mengatasi kondisi ekologi. Dalam studi utuhnya, yang dipublikasi IFPRI (salah satu institusi CGIAR), Reij dkk. (2009) menganalisa

30 Dalam hal ini, secara kontras, misalnya studi yang dilakukan Fairhead dan Leach (1996), dikutip sebelumnya, bersama Moore dan Vaughan (1994). Isu-isu yang diangkat di sini adalah contoh generasi baru teori dan pelaksanaan empiris ekonomi politik agraria, misalnya, seri penting artikel tentang Senegal oleh Carlos Oya (2001, 2004, 2007), lihat juga Mueller (2011), lebih jauh Oya secara umum melakukan survei pertanian di sub-Sahara Afrika (2010, 2012), dan survei yang cukup baik mengenai Asia Tenggara dilakukan oleh Balai et al (2011)

‘dua kisah keberhasilan *agro-environmental* di Sahel Afrika Barat’: ‘kisah yang dengan baik mendokumentasikan pengelolaan lahan dan konservasi air oleh petani... di wilayah padat penduduk dataran tinggi Burkina Faso’, dan ‘masih menjadi cerita yang belum selesai mengenai bagaimana petani mengelola pemulihan hutan taman nasional di wilayah padat penduduk Nigeria sejak tahun 1980an. Mereka menunjukkan keberhasilan koalisi sejajar (*‘win-win coalition’*) antara ‘para pemimpin karismatik, baik yang berasal dari petani maupun aparat pemerintah, yang memainkan peran penting dalam menyebarkan inovasi’, dengan dukungan kebijakan pemerintah dan investasi publik, peran NGO, pendanaan proyek oleh pemerintah Jerman, Belanda dan Bank Dunia; Singkatnya, sebuah koalisi besar yang melibatkan banyak aktor, tidak hanya para petani seperti yang di soroti McMichael (2010, 175-6) – dan sebuah koalisi yang melanggar ketentuan-ketentuan KP?

Bagaimanapun keberhasilan rehabilitasi lahan di Sahel, hasil tenaga kerja yang intensif dan jumlah rata-rata yang dilaporkan Reij dkk. (2009) di wilayah yang penduduknya terus tumbuh, dan padat penduduk, tidak menggambarkan jumlah surplus yang tersedia untuk memenuhi kelompok non petani. Penjelasan yang terakhir juga berlaku untuk contoh lain, dalam konteks yang berbeda, yang disajikan oleh Ryan Isakson’s (2009) mengenai *milpa*—*maize, legumes, squash dan herb polyculture*—di dataran tinggi Guatemala. Menurutnya, penanaman *milpa* memberi sumbangan penting bagi KP (global) melalui “konservasi agrodiversity”. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa ini adalah bentuk ‘orientasi subsisten’ (*subsistence-oriented*) dan ‘kemandirian’ (*self-sufficient*), dan

kombinasinya yang dilakukan oleh mereka yang menjual tenaga kerjanya, yang terus meningkat karena migrasi buruh jarak jauh, dan produksi komoditi kecil di sektor pertanian dan produksi barang kerajinan (termasuk pula keterlibatan aktif dalam pasar tanah, baik di lokal maupun daerah lainnya di Guatemala). Implikasinya, tanaman *milpa* hanya dimungkinkan melalui bentuk keterlibatan dalam rantai komoditas tersebut. Sejauh mana para praktisinya mampu bernegosiasi di dalam rantai tersebut yang memungkinkan terbatasnya “pilihan-pilihan” yang tersedia, termasuk penolakan terhadap “komodifikasi pangan” dan ketergantungan terhadap pasar yang tidak pasti untuk memperoleh makanan (*passim*, 755). Namun demikian, di sisi lain *milpa* tidak memiliki peran bagi KP dalam hal memproduksi surplus pangan bagi mereka yang memiliki tujuan “swasembada (*self-provisioning*)”.

Pendeknya, apa yang sudah dijelaskan di atas mengenai gambaran dan konsep tunggal ‘petani’ benar-benar menjadi wacana KP melalui praktek-praktek pertanian yang dijadikan kisah sukses ‘bentuk lain kapital’ (*capital others*): ‘contoh simbolis’ dari bekerjanya prinsip-prinsip agroekologi. Sebagian besar dari contoh atau gambaran tersebut terkait dengan apa yang Robert Chambers (1983) sebut sebagai “sumberdaya petani miskin”, yang dalam konsepnya biasanya menempati wilayah pedesaan yang sulit (dan terasing), dan karenanya makin terpinggirkan melalui proses diferensiasi.³¹ Contoh simbolis yang

31 Tentu saja ‘lambang (kedua) dari reklamasi lahan di Sahel di atas sangat sesuai dengan program-program dan fokus perhatian ‘arus utama’ pembangunan untuk menjangkau dan memberi dukungan ‘sumberdaya petani miskin’ dan memperbaiki/menghilangkan kemiskinan di pedesaan, khususnya yang dilakukan melalui metode penelitian ‘partisipatoris’, inovasi dan mobilisasi komunitas, yang menurut Chambers (1983; Chambers et.al

disebarluaskan oleh KP, sangat sedikit menjelaskan detail aspek sosio-ekonomi (kecuali Isakson), menurut mereka (a) keunggulan pertanian umumnya dikerjakan oleh kelompok petani paling miskin yang harus berhadapan langsung dengan hambatan ekologi dan sosial, bukan oleh mereka yang ‘memilih’ pertanian sebagai pekerjaan dan ‘memilih’ untuk tetap miskin, serta mengejar keinginan dalam ‘keterbatasan’,³² (b) apa yang mereka kerjakan umumnya rendah input (eksternal) dan padat tenaga kerja- pertanian ‘subsisten’ yang intensif- tepat seperti yang dimaksud oleh KP, dan tentu saja membutuhkan pengetahuan yang besar, kecerdikan dan keahlian;³³ serta (c) kondisi utama dari kemungkinan pertanian semacam ini adalah aktivitas di dalam, dan pendapatan dari bentuk lain yang terkait di dalam relasi komoditas, dan khususnya migrasi buruh (yang sering tidak disebutkan atau dipertimbangkan).

Buat Kedaulatan Pangan, petani adalah pelopor, sementara dalam narasi konvensional tentang modernitas menganggap petani adalah barisan paling akhir, dalam standar ‘keterbelakangan’; dalam temuan Robert Chambers disebut sebagai “*putting the last first*” (1983). Ketika bentuk lain kapital (agroekologi) ditunjukkan

1989) sudah lama mengarahkan bentuk advokasi.

32 Tentu saja, ‘memilih’ untuk meninggalkan wilayah pedesaan atau keluar dari pertanian bukan hal yang sama, seperti yang ditunjukkan dengan baik dalam etnografi Murphy di wilayah pedesaan Wanzai, propinsi Jiangxi, China (Murphy 2002). Untuk pandangan yang berbeda mengenai migrasi keluar desa sebagai persoalan reproduksi generasi pertanian, lihat Rigg (2006) dan White (2011).

33 Seperti halnya istilah ‘*drudgery*’ dalam term Chayanov’s. Kitching (2001, 147) memperlihatkan bahwa petani ‘dalam khasanah sejarah demografis klasik merupakan contoh dominan dari kelompok masyarakat yang miskin karena mereka bekerja dengan keras.’

melalui praktek subsistensi, kemandirian (*‘self sufficient’*) dan swasembada (*‘self provisioning’*) versus surplus produksi, inilah yang menjadi persoalan fundamental bagi KP. Sekarang, saya melanjutkan dengan persoalan fundamental kedua.

Transformasi sistem pangan dunia?

KP bertujuan untuk ‘ekologi berbasis kewargaan/*ecological basis of citizenship*’, sebuah ‘masyarakat agraria’ yang merespon bekerjanya ‘spesialisasi dengan diversifikasi, efisiensi dan kecukupan (*sufficiency*) dan komoditisasi dengan kedaulatan’ (Wittman 2010, 91,95) dan sebuah seruan radikal ‘demokratisasi sistem pangan untuk menolong kaum miskin dan kelompok tak terjangkau’ (Holt-Gimenez and Shattuck, 2010, 76; juga McMichael 2010, 174), yang di dalamnya termasuk mengembalikan pasar dan pengaturannya ke tingkat lokal (Fairbairn 2010, 27). Bagaimana hal itu dapat dicapai, termasuk tantangan dalam pengaturan agribisnis transnasional dan perdagangan internasional dalam rangka ‘melindungi’ ‘produksi pangan domestik’ dan petani kecil sebagai ‘pengawal rakyat’ (McMichael 2010, 170-2) dan tantangan bagi ‘masyarakat agraria’ untuk membangun ‘hubungan horizontal di dalam dan di antara komunitas (modal sosial) dan ekologi lokal (modal ekologi) serta secara vertikal terhubung dengan komunitas yang lebih luas yang meliputi ‘kemanusiaan’ dan ‘lingkungan’ (Wittman 2010, 103).³⁴ Istilah umum untuk merealisasikan jalan dari lokal ke nasional dan menaikannya ke tingkat global

34 Dalam term ‘*social capital*’ and ‘*ecological capital*’ karakter sistem pertanian lokal memiliki tujuan yang berbeda sendiri - (melihat) terlihat seperti kapital? (McMichael 2009, 162).

adalah *'scaling up'*.

Bertani dan Usaha Pertanian

Akan sangat berguna apabila kita mulai dengan membedakan istilah 'aktivitas-pertanian (*farming*)' dengan 'usaha pertanian' (*agriculture*) yang sering disebut namun sedikit dibahas. 'Farming' adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh para petani -dengan beragam bentuk kesejarahan produksi pertaniannya, kondisi sosial ekologis dan praktek-prakteknya, proses tenaga kerja dan lain-lain, sedangkan 'usaha pertanian' atau 'sektor usaha pertanian' muncul bersamaan pada masa kapitalisme industri tahun 1870, yang kemudian terwujud dalam Rezim Pangan Internasional periode pertama. Yang saya maksud sebagai 'usaha pertanian' adalah 'kegiatan pertanian' dengan segala kepentingan ekonominya, dengan kekhususan institusi dan aktivitasnya, baik di sektor pertanian 'hulu' dan 'hilir' yang mempengaruhi aktivitas dan reproduksi para petani. Usaha di 'hulu' mengacu pada bagaimana mengamankan kondisi produksi sebelum aktivitas pertanian dimulai. Hal itu termasuk pasokan peralatan tenaga kerja atau 'input' (peralatan pertanian, benih, pupuk) serta pasar untuk tanah, tenaga kerja dan kredit -dan tentu saja yang paling penting adalah mobilisasi tenaga kerja. Usaha di 'hilir' mengacu pada apa yang terjadi dengan tanaman dan ternak setelah panen - pemasaran, pengolahan dan distribusi dan bagaimana aktivitas tersebut berdampak pada pendapatan petani yang dibutuhkan bagi reproduksi. Kekuatan agen di usaha hulu dan hilir usaha pertanian kapitalistik saat ini diperluas dengan kekuatan kapital untuk input-pertanian dan kapital dalam pertanian pangan skala luas. (Bernstein 2010a, 65 dan Chapter 4 *passim*).

Analisa tersebut menunjukkan perbedaan mendasar, dan

secara konsisten saya menggunakannya dalam tulisan ini, dengan istilah umum yang biasanya menyamakan antara istilah 'kegiatan pertanian/*farming*' dan 'usaha pertanian/*agriculture*'.

Perbedaan tersebut menjadi relevan bagi setiap program KP, dan juga menunjukkan persoalan fundamental kedua yang telah disinggung sebelumnya. Pertama, bentuk lain kapital dalam wacana KP terpusat pada semua bentuk aktivitas untuk memperbaharui aktivitas pertanian (*farming*), yang terkadang terlihat eksklusif, melawan usaha pertanian (*agriculture*) dalam proses pembangunan mutakhir: korporasi, industri dan global. Dengan begitu apa yang menjadi tawaran programatiknya?

'Scaling up' #1

Jawaban akan langsung merujuk ke usaha di 'hulu' ketika model yang tepat untuk aktivitas pertanian intensif dikaitkan dengan pengetahuan (asli/lokal) dan tenaga kerja, dan menggunakan 'sumberdaya lokal dan organik' serta bebas dari 'input eksternal', khususnya pupuk kimia (*agro-chemical*) (Altieri 2010, 120). Karenanya hanya sedikit dari kebutuhan usaha di hulu yang terpenuhi oleh sumberdaya lokal, yang dipenuhi melalui proses *'scaling up'* jaringan 'petani-ke-petani' untuk berbagi dan menyebarkan pengetahuan praktek-praktek agroekologi yang baik, termasuk berbagi benih.³⁵ Pada saat yang bersamaan, seringkali secara eksplisit dikatakan bahwa tujuan dari bentuk aktivitas pertanian semacam ini adalah

35 Seringkali pasokan tenaga kerja mungkin menjadi kendala di 'hulu' yang diabaikan, contohnya, di Brasil 'Ketika komunitas (MST)... berhasil memperoleh akses atas tanah, hal yang paling sulit adalah memiliki tenaga kerja yang cukup' (Masioli dan Nicholson 2010, 36)

kemandirian rumah tangga petani dan komunitas lokal, di mana KP memberi jaminan atas pasokan pangan (dan reproduksi sosial).

'Scaling up' #2

Karena itu, masih ada dua pertanyaan penting selanjutnya. Yang pertama yang sudah disinggung, apakah surplus untuk kebutuhan pangan mereka sendiri itu dan berapa banyak, input (eksternal) yang rendah, pemilik tenaga kerja, ditujukan untuk 'kemandirian' (dan otonomi), dapat tersedia bagi mereka yang non-petani, mayoritas populasi dunia saat ini, untuk memenuhi ketahanan pangan mereka. Bahkan jika kecukupan surplus tersebut memungkinkan, pertanyaan keduanya adalah ada di bagian hilir: bagaimana surplus tersebut menjangkau kelompok non-petani dan dengan cara apa? Akibatnya, pilihan besar untuk melakukan 'perluasan skala' (*scaling up*) dari produksi pertanian lokal skala kecil menjadi pemenuhan pangan bagi 'masyarakat yang lebih luas', seperti juga persoalan 'kemanusiaan' (Wittman, dikutip di atas) dalam 'persoalan pasar/*market question*' yang oleh kapitalisme dicatat sebagai pencapaian pertama dalam sejarah manusia, menjawab Tahap B dari siklus Malthus (yang sudah diuraikan di atas), seperti biasa, melalui cara yang sangat kontradiktif dan timpang. Hal ini juga merujuk pada hubungan berdampingan/bertentangan antara pedesaan dan perkotaan, dan antara pertanian dan industri, di mana hingga kini KP memiliki sedikit penjelasan, selain sedikit menyingung karakter merusaknya kehidupan perkotaan di pedesaan, dan berharap 'perlindungan' lebih atas tenaga kerja yang intensif (dan mungkin lebih menguntungkan) dalam aktivitas pertanian skala kecil akan mampu mencegah migrasi keluar pedesaan

(dan justru mendorong '*re-peasantisation*'). Beberapa pendukung KP mengakui pentingnya sektor hilir, misalnya, 'konsep KP dirancang tidak hanya untuk petani, tetapi juga untuk banyak orang... (terdapat) kebutuhan memperkuat dialog perkotaan-pedesaan' (Wittman dkk 2010, 7, mengutip La Via Campesina), dan KP melakukan advokasi 'berbagai alternatif teknis dan substansi yang sesuai dengan kebutuhan dari produsen skala kecil dan konsumen berpendapatan rendah', seperti dikemukakan oleh Altieri (2010, 129).

Namun, KP tidak memiliki jawaban atas persoalan di sektor hilir, selain formulasi pasar (yang 'dimiliki' secara sosial atau nasional?) yang lebih 'adil': 'hak bangsa dan rakyat untuk mengontrol... pasar mereka masing-masing' (dikutip di awal tulisan ini), 'pemasaran dan pengolahan kegiatan' yang beroperasi melalui 'peluang pasar yang lebih adil': '*fair trade*, komersialisasi dan skema distribusi lokal, harga yang adil dan mekanisme lain yang menghubungkan langsung petani dan konsumen dalam aksi solidaritas' (Altieri 2010, 130), dan sebagainya. Semuanya adalah harapan yang berlalu begitu saja, tanpa ada konfrontasi, tentang semua kontradiksi yang terkandung di dalam hubungan komoditas dan pasar, yang memperlihatkan adanya persoalan yang lebih besar bagi KP sebelum masuk dalam isu utama, seperti dijelaskan dengan baik oleh Woodhouse (2010). Hal itu menyangkut hubungan antara (i) produktivitas tenaga kerja dalam aktivitas pertanian, (ii) pendapatan pertanian, dan (iii) harga pangan bagi mereka yang harus membeli makanan (termasuk di dalamnya banyak masyarakat pedesaan) --yang (kurang-lebih) bisa disebut sebagai persoalan produksi, kemiskinan di pedesaan, dan distribusi pangan.

Pertama, produktivitas tenaga kerja, menjadi penting karena memfokuskan perhatian pada berapa banyak orang dalam setiap aktivitas pertanian (atau rumah tangga petani, masyarakat dll) dapat memberi makan melampaui ketahanan pangan mereka sendiri.³⁶ Memang tidak perlu memasukkan 'produktivitas berlebih (*hyper-productivity*)' dari industri usaha pertanian (Weis 2010), namun hal ini diperlukan untuk menghindari pengurangan atas hubungan terbalik antara luas lahan dengan hasil pertanian (lihat oleh Altieri 2010, 122, lihat Woodhouse 2010 dan referensi di dalamnya, catatan kaki 21). Kedua- pendapatan pertanian- merupakan, atau seharusnya, program yang cukup penting bagi KP (Altieri 2010, 126, 130, bagi kelompok 'paling miskin', juga menekankan penciptaan lapangan kerja di pedesaan), yang terbantu oleh adanya 'nilai' berhemat dan kecukupan; memang, seperti telah disebutkan, memperlihatkan perhatian yang panjang dalam wacana 'dasar' pembangunan yaitu untuk memperbaiki/mengakhiri kemiskinan di pedesaan (diperkenalkan oleh Lipton 1977 dan perdebatan tentang 'bias urban', baru-baru ini oleh IFAD 2011). Elemen ketiga terpusat pada bagaimana pasar dapat bekerja, dan bentuk reformasi pasar seperti apa yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan para petani kecil dan konsumen

36 Secara implisit diakui oleh Altieri (2010, 126-8) yang menunjukkan perbedaan kasus (dalam pandangan penulis membatasi kasus) dari budidaya jagung di lahan basah (saat ini sudah jarang Chinampa di Meksiko di mana 'setiap petani mampu mendukung dua belas hingga lima belas orang', dengan budidaya pertanian terasering di dataran tinggi selatan Peru yang 'membutuhkan sekitar 350-500 pekerja per harinya untuk setiap hektar dalam setahun'. Umumnya budidaya oleh petani miskin di Selatan, seperti jumlah besar di daerah tropis kering dan semi-kering, lebih mendekati contoh kedua yang diberikan Altieri mengenai tenaga kerja intensif (dan produktivitas) dibandingkan dengan contoh pertama.

pangan, khususnya konsumen berpenghasilan rendah (Altieri yang sudah dikutip di atas). Jika modal memiliki sejarah panjang mengorbankan ekologi untuk membuat makanan 'murah' (dengan mengurangi biaya reproduksi tenaga kerja, dalam hal ini upah), maka saat ini sangat besar jumlah konsumen miskin, baik di perkotaan maupun pedesaan, yang memerlukan makanan terjangkau juga kecukupan pasokan makanan (sehat). Cara yang paling jelas untuk mencoba mengakhiri kemiskinan petani kecil adalah dengan memberi subsidi atas kegiatan produksi mereka, ada berbagai contoh sejarah tentang hal ini, dan sangat dianjurkan oleh Julio Boltvinik (2012) dalam situasi saat ini.³⁷ Hal lain yang dianggap setara, yang mungkin akan menaikkan harga makanan (diakui oleh Boltvinik), adalah perlunya mensubsidi kebutuhan pangan untuk sejumlah besar konsumen miskin tersebut (terdapat juga sejumlah pengalaman untuk ini). Bagi KP, hal ini sangat mengganggu, dan lebih memilih untuk menghindarinya. Dan tentu mensyaratkan peran sentral Negara yang penulis jelaskan selanjutnya.

Teknologi tradisional dan modern

Altieri (2010) menggunakan istilah 'tradisional' secara

37 Tulisan Boltvinik akan dipublikasikan di dalam terbitan baru Zed Book, yang diedit sendiri olehnya, Farshad Arighi dan Susan Archer Mann, yang juga berisi versi revisi karya Bersnstein (2012b) yang terkait dengan argumen Boltvinik tentang 'kegigihan petani dan kemiskinan'. Secara umum menunjukkan petani pada keanehan rezim subsidi dan dan fluktuasi harga yang tampaknya telah dianggap lebih konkret bagi dinamika pasar di Utara, contohnya, Nicholson (Masioli dan Nicholson 2009, 40) pada produksi susu di negara Basque di mana 'berita buruknya adalah kita kehilangan banyak petani saat ini'. Dan tidak hanya keluarga petani kecil, namun petani skala besar juga tidak mampu bersaing'. Ia juga menunjukkan persoalan negara-negara Eropa seperti Austria dan Perancis yang memiliki (beberapa) kebijakan yang ternyata konfusif untuk keberlanjutan tetapi juga mendorong agro - industri dan pertanian ekspor yang kompetitif.

komprehensif untuk menjelaskan karakter dan kebijakan ‘petani’/pertanian skala kecil, serta kearifan agroekologi yang terakumulasi dalam pengetahuan dan praktek. Produktivitasnya ‘mungkin rendah, namun lebih disebabkan oleh masalah sosial, bukan masalah teknis’ (*passim* 126), meskipun tidak jelas apa yang dimaksud. Selain meningkatkan kapasitas petani kecil yang berbasis ‘tradisional’ melalui ‘perluasan skala’ (*scaling up*) dari petani ke petani, ia juga mengacu pada ‘jutaan petani miskin yang belum tersentuh oleh teknologi pertanian modern’ (*passim* 131) meskipun di sini juga tidak jelas apakah ini hal yang baik atau buruk. Jika yang terakhir, lalu ‘teknologi pertanian modern’ seperti apa yang memberi manfaat bagi petani miskin, dan bagaimana mereka menjangkaunya?

Mungkin fokus perhatian paling potensial saat ini mengenai perdebatan kebaikan dan keburukan dari teknologi ‘tradisional’ dan ‘modern’ adalah rekayasa genetika benih. Transgenik hampir secara universal dikutuk oleh KP, tetapi pandangan yang sedikit berbeda dapat dilihat dalam karya inovatif dan detail dari Jack Kloppenburg. Dalam mengeksplorasi konsep ‘kedaulatan benih’ sebagai perencanaan yang membuka peluang bagi sesuatu yang ‘dilindungi’ *versus* sesuatu yang bisa diakses ‘terbuka’ (*open access*), ia menunjuk potensi konstituen yang lebih luas daripada petani, yaitu ahli tumbuhan yang progresif (salah satu inspirasi gagasan tentang inovasi benih ‘*open source*’, pertukaran dan multiplikasi). Dia juga menyarankan pemikiran ulang ‘posisi mereka yang menolak teknik dan produk bioteknologi...Kegagalan untuk membedakan antara bioteknologi dan perusahaan bioteknologi ‘seringkali memiskinkan perdebatan’ yang

hanya mengarah hanya pada sebatas utopia dan dystopias (Kloppenbunrg 2010a, 381). Pendekatan Kloppenburg menganjurkan perspektif tentang pertanian teknologi yang melampaui perbedaan ‘tradisional’ dan ‘modern’, yang diwarisi dari banyak kritik atas paradigma ‘modernisasi’.³⁸

Dan Negara....

Ini merupakan ‘isu yang belum disentuh’ dalam agenda yang diinginkan oleh konsep KP, dan satu persoalan kecil yang melampaui keinginan meminta negara untuk ikut campur dalam menyelesaikan ‘ketegangan antara pembangunan berkeadilan sosial dan konservasi ekologi’ (Altieri 2010, 131). Ini mencakup berbagai kebijakan dan praktek yang efektif untuk mengatur perdagangan komoditas pangan internasional (dan domestik), melindungi dan mempromosikan pertanian skala kecil, ‘memperluas skala’ dari lokal ke nasional dan kebijakan subsidi, baik pendapatan petani (kecil) maupun harga makanan yang berasal dari petani kecil (di atas)? Singkatnya, masih banyak daftar tuntutan yang tidak pernah dipenuhi oleh negara modern.

Pemintaan atas dijalankannya aksi komprehensif dan progresif negara, dalam konteks sejarah pengalaman banyak negara menjadi begitu dalam terlibat dalam upaya mendorong laju kapitalisme (dan negara sosialisme) ‘berhadapan dengan petani’ (*against the peasant*), seperti yang telah ditegaskan dalam beberapa analisa tentang KP. Memang, seperti yang ditunjukkan sebelumnya dalam sejarah, sebagian besar dari target utama populisme agraria

38 Jika sekarang berdiri di atas kepalanya: dari kebaikan modern/keburukan tradisional menjadi kebaikan tradisional/keburukan modern. Ini adalah dampak yang umum bagaimana kerja *binary* dalam konstruksi ideologi.

–baik gerakan maupun ideologi– bukanlah tugas Rezim kapitalisme melainkan tugas negara. Mungkin itulah sebabnya McMichael (2010, 171, penekanan ditambahkan) menjelaskan ‘masyarakat agraria’ merupakan ‘taktik’ untuk menarik otoritas negara dalam melindungi petani’, sekalipun taktik tersebut harus berhadapan dengan kekosongan mendasar strategi dalam setiap kemungkinan program politik.³⁹

Terdapat beberapa contoh klaim pemerintah dalam mengadopsi KP, Wittman dkk. (2010, 9) memberi gambaran ringkas tentang kasus di Ekuador, di mana pada tahun 2009, kelahiran peraturan tentang Rezim KP dibatalkan sebagian oleh presiden (melalui hak veto), yang melihat terdapat ada kekhawatiran untuk melarang rekayasa genetik benih, serta konsekuensi akibat perubahan struktur kepemilikan tanah dan masalah yang berkaitan dengan produksi bahan bakar nabati (*agrofuel*). Terlebih-lebih, satu bulan sebelum peraturan tentang KP tersebut disahkan, Majelis Nasional meloloskan peraturan tentang Pertambangan yang baru ‘untuk memacu ekstraksi di wilayah baru oleh perusahaan nasional dan internasional’. Mungkin Venezuela adalah kasus yang lebih tepat, dengan penilaian yang berbeda dari pengalamannya mengejar KP (nasional) sejak akhir tahun 1990-an oleh Schiavoni dan Camacaro (2009) dan Kappeler (dalam edisi khusus).

Dan Sejumlah hambatan

KP menjaga jarak dengan perspektif lain tentang

39 Dia melanjutkan bahwa masyarakat agraria (*agrarian citizenship*) adalah strategi intervensi dalam politik pembangunan seperti juga advokasi bagi hak-hak petani untuk memulai reproduksi sosial yang menjadi dasar ekonomi dan ekologi dalam masyarakat, formulasi yang baik menunjukkan terkait pencapaian modalitas yang diartikulasikan sebagai tujuan (program) tersebut.

aktivitas pertanian, usaha pertanian dan pangan, untuk memperkuat kekhasan dan radikalismenya– dengan kata lain untuk menjaga ‘batasannya’. Sehingga menfokuskan pada dua hal, yaitu: ‘petani’ dengan usaha pertanian agroekologi *versus* industrialisasi usaha pertanian oleh korporasi, capital lokal (pedesaan) *versus* kapital global, keberlanjutan dibandingkan dengan ketidak-berlanjutan, dan sebagainya. Salah satu contoh penting dari hal ini adalah oposisi terhadap ‘ketahanan pangan’ (*food security*) yang di kumandangkan oleh ‘arus utama’ organisasi internasional (lihat misalnya dalam Fairbairn 2010; McMichael 2010). Bahaya lainnya adalah di-‘hijau’-kannya agribisnis dan beberapa bagian dalam sistem pangan untuk meredakan tuntutan gerakan lingkungan dan untuk mempertahankan/ memperluas pangsa pasar dan keuntungan (Fairbairn 2010, 18, mengutip Friedmann 2005). Contoh yang lebih spesifik termasuk peringatan terhadap bujukan untuk mempromosikan bentuk produksi yang baik di wilayah Selatan bagi pasar konsumen yang lebih besar di wilayah Utara (Altieri 2010, 130-1); pencaplokan tanah yang ramah lingkungan (*green land grabbing*) yang menggusur petani (dan penggembala), dan menggiring mereka ke dalam ‘pengungsian’ (Wittman 2010, 102, lihat juga Brockington 2009, yang cukup informatif, menghibur dan mengingatkan, serta kontribusinya dalam tema-tema yang dibahas dalam *Journal of Peasant Studies* 39, 2, 2012), metode ‘ramah lingkungan’ (*climate proofing*) yang didukung oleh ‘pengembangan industri... sebagai batasan baru tentang profit’ (McMichael 2010, 174), dan persoalan hak kepemilikan material biologis yang seolah-olah lebih inklusif (lebih pribadi) (Kloppenburg 2012b).

Namun, proyek radikal KP tidak dapat dibayangkan

dengan memadai, apalagi dikejar pelaksanaannya, jika mengabaikan atau memotong begitu banyak sejarah agraria modern, selain hanya untuk membingkai melalui beberapa aspek tertentu dari usaha pertanian dalam globalisasi neoliberal kontemporer, dan kadang-kadang dalam sejarah panjang 'kapitalisme melawan petani'. Beberapa contoh yang relevan mencatat sikap pendukung KP yang meremehkan berbagai perspektif dan kebijakan yang luas mengenai aktivitas pertanian dan usaha pertanian dalam sejarah modern, dan pengalaman yang kaya dan kompleks dari praktek yang mereka lakukan. Misalnya, dalam mendukung kepentingan petani (kecil)/produsen komoditas kecil dan/atau konsumen makanan, atau yang menjadi penentang mereka, atau -seperti umumnya, atau di mana-mana -kontradiksi konsepsi, permodalan, dan efeknya.

Sebagai proyek politik, KP mempromosikan 'contoh simbolis' dari 'perlawanan' politik (yang terorganisir) (antara lain, Desmarais 2002; McMichael 2006; Wittman 2010 pada kampanye melawan 'green desert') dan menghadapi masalah klasik dalam politik radikal: bagaimana posisi gerakan KP terkait hubungannya dengan kekuatan negara dan badan internasional (PBB, FAO, IFAD, CGIAR, Bank Dunia) dalam rangka untuk mencoba mendorong mereka ke arah yang diinginkan, dengan semua bahaya kooptasi dan kompromi, serta kaburnya batas, yang mungkin mengikutinya.⁴⁰

40 Dalam kasus khusus tentang perjuangan melawan *agrofuel*, Holt-Giménez dan Shattuck (2010, 87) mencoba untuk memahami kesulitan tersebut dengan (mungkin) saran bahwa terdapat 'sekutu potensial' dari sektor-sektor di industri makanan dan energi tersebut (misalnya, beberapa perusahaan-perusahaan minyak, industri daging dan jaringan supermarket) yang menentang *agrofuel* meskipun mereka juga 'berusaha memusatkan

Dari proyek menjadi program?

Persoalan 'Hilir' seperti yang dijelaskan oleh Altieri (2010, 128-9, penekanan ditambahkan):

Pembangunan usaha pertanian berkelanjutan membutuhkan perubahan struktural yang penting sebagai tambahan inovasi teknologi dan solidaritas petani-untuk-petani. Hal itu tidaklah mungkin tanpa gerakan sosial yang menciptakan keinginan politik di antara pembuat kebijakan untuk membongkar dan mengubah institusi dan kebijakan yang saat ini menghambat usaha pertanian berkelanjutan... perubahan ekologi dalam usaha pertanian tidak dapat maju tanpa perubahan di arena ekonomi, sosial, politik dan budaya yang sesuai (*sic*) menentukan usaha pertanian.⁴¹

Di sini penulis hanya mencatat kompleksitas yang melekat dalam sosiologi gerakan tersebut, dan bebannya dalam politik untuk mengolah dan mengejar program yang layak. Beberapa agenda analitis tersebut telah didefinisikan dengan baik oleh beberapa pendukung KP, atau setidaknya simpatisan, terkait gerakan di tingkat lokal dan nasional (misalnya, kesimpulan yang dibuat Edelman 2002) maupun gerakan transnasional (misalnya Borras dkk., 2008b). Salah satu aspek dari kompleksitas tersebut adalah gambaran kelas yang rumit dari 'petani' di pedesaan, bagaimana mereka bersinggungan dengan ketidaksetaraan gender, generasi, dan etnis (misalnya, masyarakat asli dan 'pendatang' di banyak wilayah pedesaan di Afrika sub-Sahara), dan dampak dari gerakan sosial multi-kelas. Aspek

kekuatan/kekuasaan mereka atas sistem pangan'

41 Dan Patel (2010, 194): 'prasyarat (bagi Kedaulatan Pangan)...adalah masyarakat di mana ada kesetaraan -dampak distorsi (*sic*) seksisme, patriarki, rasisme, dan kekuasaan kelas telah dihancurkan

lain dari kompleksitas adalah beragam isu dan kadang-kadang tujuan yang bertentangan –lebih dan kurang spesifik, besar dan kecil, bergantung pada kepentingan sosial yang berbeda –yang disatukan dalam ungkapan ‘jalan petani’.

Permasalahan berbeda dalam membangun gerakan sosial (global) yang fokus pada program bersama adalah kepemimpinan internasional, organisasi dan arah, khususnya ketika berhadapan dengan konsentrasi kekuatan massif yang diletakkan atau terlibat dalam sistem pangan global, serta dampak global dari “percepatan kontradiksi biofisiknya”. Ini tentu saja menyerang salah satu dari karakteristik utama dari La Via Campesina dengan prinsip tidak adanya sekretariat pembuat kebijakan... sebuah otoritas mandiri/berdaulat yang menentukan apa yang dapat dilakukan oleh setiap anggota organisasi (Patel 2010, 193). Mungkin terdapat beberapa alasan yang kuat untuk ini, secara filosofis dan praktis, tetapi juga memiliki konsekuensi, seperti yang ditunjukkan oleh Joan Martinez-Alier. Satu dasar utama dari konstruksi Ekonomi-Ekologisnya adalah nilai yang tidak terukur, karenanya bertentangan dengan ‘penetapan harga’ (atau harga bayangan) berbasis pasar dari “barang-barang” lingkungan dan dampaknya bagi Ekonomi Lingkungan Konvensional (*Conventional Environmental Economic*). Meskipun demikian dalam *The Environmentalism of The Poor* (2002, 271, penekanan ditambahkan) ia menyimpulkan dengan ‘kekuatan prosedural, yang meski berhadapan dengan kompleksitas tertentu tetap mampu memaksakan bahasa ‘nilai’ yang menentukan dan menjadi batas dasar dalam konflik distribusi ekologi’, dan kemudian mempertanyakan, ‘Siapa yang kemudian

memiliki kekuasaan untuk menentukan prosedur...? Siapa yang memiliki kekuatan untuk menyederhanakan kompleksitas, mengatur/menyeleksi beberapa bahasa nilai yang tidak diperlukan?’. Mungkinkah rumusan KP yang baru ‘yang dibuat secara internasional’ atau ‘perlawanan agraria global’ membutuhkan sebuah polit biro?

Kesimpulan

Tulisan ini menyimpulkan, untuk tujuan lebih baik atau lebih buruk, dengan skeptisisme yang lebih kuat terhadap KP dibandingkan sebelum mulai menulisnya, meskipun dengan perhatian yang lebih dalam, dan simpati pada pengetahuan empiris para *agroecologists* tentang apa yang dilakukan petani dan aktivitas mereka sebagai praktisi, ketimbang aspirasi mereka terhadap ‘teori besar’ dan keberpihakan, yang mengorbankan pesimisme intelektual untuk optimisme kehendak.⁴² Penulis percaya, bahwa dasar bagi skeptisisme tersebut sangat jelas. Hal itu termasuk setiap kritik terhadap ‘jalan petani’, juga keyakinan akan ‘praktek-praktek petani dengan input rendah dan tenaga kerja yang instensif yang dapat memberi makan populasi dunia saat ini’, serta kegagalan KP menjawab persoalan di sektor hilir untuk bergerak maju dari perspektif yang membatasinya, tesis dan antithesis, ke arah sintesis yang menghasilkan sebuah rencana ‘transformasi’. Lebih jauh, penulis berpendapat bahwa kegagalan ini berasal dari dalam rumusan gerakan KP itu sendiri, mengingat KP menghilangkan elemen penting dalam ekonomi politik agraria, secara lebih luas ekonomi politik kapitalisme,

42 Seperti terlihat, dengan konteks yang berbeda, sebuah refleksi tajam dari Michael Burawoy (2010, 2011), seperti juga yang saya jelaskan dalam Bernstein (2013a).

serta sejarah dunia, dalam upayanya membangun tesis dan antithesis utamanya: bentuk lain capital (*capital other*). Penulis menilai kegagalan tersebut cukup mengejutkan, dan mengkhawatirkan, dalam kaitannya dengan pembangunan teori dan investigasi sejarah mengenai kondisi reproduksi masyarakat petani (petani kecil/*petty commodity producers*), termasuk kurangnya analisa sosial-ekonomi yang mereka klaim sebagai keunggulan konsep agroekologi.⁴³ Hal ini disebabkan salah satunya karena dampak dari fokus ‘kerangka’ analisa KP yang dimaksudkan untuk melakukan analisis rezim pangan, yang dimulai dengan melihat apa yang sesungguhnya terjadi dibalik pembentukan pasar pangan dunia melalui pembangunan pertanian ekspor di ‘wilayah negara-negara jajahan’ yang tidak memiliki masyarakat petani (seperti dijelaskan sebelumnya).⁴⁴

Namun demikian pandangan skeptis ini bukan merupakan penolakan atas arah advokasi KP secara keseluruhan. Pertama, KP hanya satu contoh, meskipun bisa dikatakan yang paling potensial, dalam menantang ekonomi politik (agraria) materialis yang melihat secara serius tentang perubahan lingkungan, dan kemudian meninggalkan konsepsi mekanistik pertanian yang diwariskan sendiri (lihat Bernstein 2010b). Kedua, seperti sudah dicatat, begitu banyak isu dan contoh perlawanan terhadap KP, di mana seseorang dapat

43 Dengan sejumlah kecil pengecualian, catatan tentang van der Ploeg – catatan kaki 22 di atas.

44 Hal ini bisa dilihat sebagai hal yang ‘etnosentris’, seperti yang dinyatakan oleh Peter Mollinga kepada saya (komunikasi personal). Koloni yang dimaksud adalah pemukiman orang Eropa, dan pertanian di Asia dan Afrika yang secara umum diabaikan (mungkin pula lebih dari Amerika Latin yang karena kedekatannya dengan wilayah utara Amerika yang menjadi pusat IFR pertama dan kedua)

mengambil sikap yang berbeda, atau simpatik, tanpa harus menerima keseluruhan ambisi yang diinginkan oleh KP untuk mengubah sistem pangan dunia melalui bentuk lain capital (*capital other*). Sejumlah contoh sebagai bentuk sikap oposisi terhadap kesenjangan perdagangan internasional dalam makanan dan komoditas pertanian lainnya (dan ‘liberalisasi’ yang sangat selektif) hingga agribisnis internasional, mendukung perlawanan terhadap pencaplokan tanah untuk pertanian pangan, *agrofuel*, dan pertambangan. Perlawanan seperti itu biasanya bersifat heterogen secara sosial, yang melibatkan gerakan multi-kelas, yang penilaiannya selalu memerlukan ‘analisa yang nyata dari situasi yang konkret’ (para ‘*verificationist*’) daripada menunjukkan proses akumulasi dan memberikan ‘contoh simbolis’. Yang penting di sini, seperti seharusnya, adalah dalam upaya mencoba untuk memahami dinamika sosial dan kontradiksi yang ada yang menghasilkan gerakan tersebut dan menyerap mereka. Ketiga, skeptisisme tentang KP tidak menghalangi dukungan untuk beberapa kasus redistribusi land reform, atau mereka yang berada dalam kelas buruh (di pedesaan) yang bertani, meski marjinal, yang seringkali penting untuk kegiatan reproduksi mereka.⁴⁵ Intinya adalah bahwa simpati dan solidaritas dalam semua kasus tersebut tidak harus didasarkan pada, atau menyebabkan, keyakinan untuk keselamatan kemanusiaan (atau terlebih-lebih

45 Seharusnya sudah jelas dari review penulis (Bernstein 2012a) atas tulisan Scoones dkk. (2010) mengenai Zimbabwe, distribusi lahan yang paling komprehensif di dunia sejak lama, menghasilkan ruang untuk kebangkitan dan perluasan dinamika *petty commodity production* dan akumulasi dari bawah (*accumulation from below*) (lihat juga Scoones dkk. 2012, dan Hanlon dkk. 2013) serta untuk pertanian ‘*survivalist*’ yang memberi kontribusi pada reproduksi kelas buruh (pedesaan).

keselamatan petani) melalui pertanian skala kecil yang memang dikaburkan oleh KP.[]

Akram-Lodhi, H. dan C. Kay, ed., 2009. *Peasants and globalization. Political economy, rural transformation and the agrarian question*. London: Routledge.

Altieri, M.A., 2008. Small farms as a planetary ecological asset: Five key reasons why we should support the revitalization of small farms in the Global South. <http://www.foodfirst.org/en/node/2115> [diakses pada tanggal 2 April 2013]

Altieri, M.A., 2010. *Scaling up agroecological approaches to food sovereignty in Latin America*. dalam: Wittman, H., A.A. Desmarais, N. Wiebe, ed., 2010. *Food sovereignty. Reconnecting food, nature and community*. Oakland CA: Food First., hal.120-133.

Araghi, F. 2003. Food regimes and the production of value: some methodological Issues. *Journal of Peasant Studies*, 30(2): 41-70.

Araghi, F. 2009. The invisible hand and the visible foot: peasants, dispossession and globalization. dalam Akram-Lodhi, H. dan C. Kay, ed., 2009. *Peasants and globalization. Political economy, rural transformation and the agrarian question*. London: Routledge., hal.111-147.

Aston, T.H. dan Philpin, C.H.E. ,ed., 1985. *The Brenner debate. Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.

Banaji, J., 2001. *Agrarian change in late antiquity: gold, labour and aristocratic dominance*. Oxford: Oxford University Press.

Banaji, J., 2010. *Theory as history. Essays on modes of production and exploitation*. Leiden: Brill.

Bello, W. 2009. *The food wars*. London: Verso.

Bello, W. dan M. Baviera, 2010. Capitalist agriculture, the food price crisis & peasant resistance. Dalam: Wittman, Desmarais and Wiebe, ed., hal.62-75.

Berman, M., 1983. *All that is solid melts into air. The experience of modernity*. London: Verso.

Referensi

- Bernstein, H., 1996/7. Agrarian questions then and now. *Journal of Peasant Studies*, 24(1/2), 22-59.
- Bernstein, H., 2009a. Agrarian questions from transition to globalization. dalam: Akram-Lodhi, H. dan C. Kay, ed., 2009. *Peasants and globalization. Political economy, rural transformation and the agrarian question*. London: Routledge., hal. 239-61.
- Bernstein, H., 2009b. V.I. Lenin dan A.V. Chayanov: looking back, looking forward. *Journal of Peasant Studies* 36(1), 55-81.
- Bernstein, H., 2010a. *Class dynamics of agrarian change*. Halifax NS: Fernwood.
- Bernstein, H., 2010b. Introduction: some questions concerning the productive forces. Special issue on Productive forces in capitalist agriculture: political economy and political ecology, ed. H. Bernstein dan P. Woodhouse, *Journal of Agrarian Change*, 10(1), 300-314.
- Bernstein, H., 2012a. Review of Scoones dkk, 2010. *Journal of Agrarian Change*, 12(1), 170-3.
- Bernstein, H., 2012b. *Agriculture/industry, rural/urban, peasants/workers: some reflections on poverty, persistence and change*. Paper for International Workshop on Poverty and Persistence of the Peasantry, El Colegio de México, 13-15 March.
- Bernstein, H., 2012c. *Sub-Saharan Africa and China: preliminary notes for comparison and contrast*. Paper for workshop on The Land Question: Capitalism, Socialism and the Market, Makerere Institute for Social Research, Kampala, 9-10 August.

- Bernstein, H., 2013a. Doing committed social research: what are the dangers? *China Journal of Social Work*, 6(1), 69-81.
- Bernstein, H., 2013b. *Primitive accumulation: what's in a term?* Presentation to Workers and Punks University May Day School, Ljubljana, April 26-1 May.
- Bernstein, H. dan P. Woodhouse, 2001. Telling environmental change like it is? Reflections on a study in sub-Saharan Africa. *Journal of Agrarian Change*, 1(2), 283-324.
- Bezner Kerr, R., 2010. *Unearthing the cultural and material struggles over seed in Malawi*. dalam: Wittman, H., A. A. Desmarais, N. Wiebe, ed., 2010. *Food sovereignty. Reconnecting food, nature and community*. Oakland CA: Food First., hal. 134-151.
- Boltvinik, J., 2012. *Poverty and persistence of the peasantry*. Background paper for International Workshop on Poverty and Persistence of the Peasantry, El Colegio de México, 13-15 March.
- Borras, S. M. Jr, M. Edelman dan C. Kay, ed, 2008a. Transnational agrarian movements confronting globalization. *Special issue of Journal of Agrarian Change*, 8(1-2).
- Borras, S. M. Jr, M. Edelman, dan C. Kay. 2008b. Transnational agrarian movements: origins and politics, campaigns and impact'. *Journal of Agrarian Change* 8(2-3), 169-204.
- Borras, S. M. Jr dan J. C. Franco, 2010. *Food sovereignty & redistributive land policies: exploring linkages, identifying challenges*. dalam: Wittman, H., A. A. Desmarais, N. Wiebe, ed., 2010. *Food sovereignty. Reconnecting food,*

- nature and community*. Oakland CA: Food First., hal. 106-19.
- Borras, S. M. Jr., R. Hall, B. White dan W. Wolford, ed, 2011. Forum on global land grabbing. *Special issue of Journal of Peasant Studies*, 38(2).
- Boserup, E., 1965. *The conditions of agricultural growth: the economics of agrarian change under population pressure*. London: Allen & Unwin.
- Brass, T., ed., 1994. New farmers' movements in India. *Special issue of Journal of Peasant Studies*, 21(3/4).
- Breman, J., 1996. *Footloose labour. Working in India's informal economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brenner, R., 1976. *Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe. Past and Present*, 70, 30-74.
- Brenner, R., 2001. The Low Countries in the transition to capitalism. *Journal of Agrarian Change*, 1(2), 169-241.
- Brockington, D., 2009. *Celebrity and the environment: fame, wealth and power in conservation*. London: Zed Books.
- Burawoy, M., 2010. From Polanyi to Pollyanna: the false optimism of global labor studies. *Global Labour Journal*, 1(2): 301-313. <http://digitalcommons.mcmaster.ca/globallabour/vol1/iss2/7>. [Diakses pada tanggal 2 September 2012]
- Burawoy, M., 2011. On Uncompromising Pessimism: Response to my Critics. *Global Labour Journal*, 2(1): 73-77. <http://digitalcommons.mcmaster.ca/globallabour/vol2/iss1/8>. [Diakses pada tanggal 2 September 2012]

- Byres, T.J., 1996. *Capitalism from above and capitalism from below. An essay in comparative political economy*, London: Macmillan.
- Byres, T.J., 2006. Differentiation of the peasantry under feudalism and the transition to capitalism: in defence of Rodney Hilton. *Journal of Agrarian Change*, 6(1) 17-68.
- Chambers, R., 1983. *Rural development. Putting the last first*. London: Longman.
- Chambers, R., A. Pacey, dan L. A. Thrupp, ed., 1989. *Farmer first: farmer innovation and agricultural research*. London: Intermediate Technology Publications.
- Chauveau, J-P dan P. Richards, 2008. West African insurgencies in agrarian perspective: Côte d'Ivoire and Sierra Leone compared. *Journal of Agrarian Change*, 8(4), 515-52.
- Chayanov, A.V., 1966. *The theory of peasant economy*, ed. Daniel Thorner, Basile Kerblay dan R.E.F. Smith. Homewood, Illinois: Richard Irwin for the American Economic Association.
- Claassens, A., 2013. Recent changes in women's land rights and contested customary law in South Africa. *Special issue on Agrarian change, rural poverty and land reform in South Africa since 1994*, ed. B. Cousins, H. Bernstein, B. O'Laughlin and P. Peters, *Journal of Agrarian Change*, 13(1), 71-92.
- Clark, C. dan M. Haswell, 1964. *The economics of subsistence agriculture*. London: Macmillan.
- Cowen, M.P. dan R.W. Shenton, 1991. The origin and course of Fabian colonialism in Africa. *Journal of*

- Historical Sociology*, 4(2), 143-174.
- Cowen, M. P. dan R. W. Shenton, 1996. *Doctrines of development*. London: Routledge.
- Cronon, W., 1991. *Nature's metropolis. Chicago and the Great West*, New York: W.W. Norton.
- Davis, M., 2006. *Planet of slums*. London: Verso.
- Desmarais, A.-A., 2002. The *Vía Campesina*: consolidating an international peasant and farm movement. *Journal of Peasant Studies*, 29(2), 91-124.
- Desmarais, A.-A., 2007. *La Vía Campesina. Globalization and the power of peasants*. Halifax: Fernwood Publishing.
- Dixon, J. dan H. Campbell, ed, 2009. Symposium on food regime analysis. *Special issue of Agriculture and Human Values*, 26 (4).
- Duncan, C.A.M. 1996. *The centrality of agriculture. Between humanity and the rest of nature*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Edelman, M., 2002. *Peasants against globalization. Rural social movements in Costa Rica*, Stanford: Stanford University Press.
- Fairbairn, M. 2010. *Framing resistance: international food regimes & the roots of food sovereignty*. dalam: Wittman, H., A. A. Desmarais, N. Wiebe, ed., 2010. *Food sovereignty. Reconnecting food, nature and community*. Oakland CA: Food First., hal.15-32.
- Fairhead, J. dan M. Leach, 2006. *Misreading the African landscape. Society and ecology in a forest-savanna mosaic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foster, J.B., 2000. *Marx's ecology. Materialism and nature*.

- New York: Monthly Review Press.
- Friedmann, H., 1978a. Simple commodity production and wage labour on the American plains. *Journal of Peasant Studies*, 6(1), 71-100.
- Friedmann, H., 1978b. World market, state and family farm : social bases of household production in the era of wage labour, *Comparative Studies in Society and History*, 20 (4), 545-86.
- Friedmann, H., 1993. The political economy of food: a global crisis. *New Left Review* 197, 29-57.
- Friedmann, H., 2005. From colonialism to green capitalism: social movements and emergence of food regimes. dalam: F. H. Buttel and P. McMichael, eds., *New directions in the sociology of global development*. Amsterdam: Elsevier, hal. 227-64.
- Friedmann, H., 2006. Focusing on agriculture: a comment on Henry Bernstein's 'Is there an agrarian question in the 21st Century?'. *Canadian Journal of Development Studies*, 27(4), 461-5.
- Friedmann, H. dan P. McMichael. 1989. Agriculture and the state system: the rise and decline of national agricultures, 1870 to the present. *Sociologica Ruralis*, 29(2), 93-117.
- Grischow, J.D., 2008. Rural 'community', chiefs and social capital: the case of Southern Ghana. *Journal of Agrarian Change*, 8(1), 64-93.
- Hall, D. 2012. Rethinking primitive accumulation: theoretical tensions and rural Southeast Asian complexities. *Antipode*, 44(4), 1188-1208.
- Hall, D., P. Hirsch, dan T. Li, 2011. *Powers of exclusion*.

- Land dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: National University of Singapore Press.
- Hanlon, J., J. Manjengwa, dan T. Smart, 2013. *Zimbabwe takes back its land*. Sterling VA: Kumarian Press.
- Harriss-White, B., 2010. Capitalism and the common man: peasants and petty production in Africa and South Asia. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 1(2), 109–160.
- Harvey, D., 2003. *The new imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Heller, H., 2011. *The birth of capitalism. A twenty-first century perspective*. London: Pluto.
- Hill, P., 1963. *The migrant cocoa farmers of southern Ghana*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Holt-Giménez, E., 2006. *Campesino a campesino. Voices from Latin America's farmer to farmer movement for sustainable agriculture*. San Francisco: Food First Books.
- Holt-Giménez, E. dan A. Shattuck, 2010. *Agrofuels and food sovereignty: another agrarian transition*. dalam: Wittman, H., A. A. Desmarais, N. Wiebe, ed., 2010. *Food sovereignty. Reconnecting food, nature and community*. Oakland CA: Food First., hal.76–90.
- Huang, P. C. C., G. Yuan dan Y. Peng, 2012. 'Capitalization without proletarianization in China's agricultural development.' *Modern China*, 38(2), 139–173.
- IFAD, 2011. *Rural poverty report 2011. New realities, new challenges: new opportunities for tomorrow's generation*. Rome: IFAD.
- Isakson, R., 2009. No hay ganancia en la milpa: the agrarian question, food sovereignty, and the on-farm

- conservation of agrobiodiversity in the Guatemalan highlands. *Journal of Peasant Studies*, 36(4), 725–59.
- Kitching, G., 2001. *Seeking social justice through globalization. Escaping a nationalist perspective*. University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
- Kloppenborg, J.R. Jr, 2004. *First the seed. The political economy of plant biotechnology*, second edition. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
- Kloppenborg, J., 2010a. Impeding dispossession, enabling repossession: biological open source and the recovery of seed sovereignty. *Journal of Agrarian Change*, 10(3), 367–388.
- Kloppenborg, J., 2010b. *Seed sovereignty: the promise of open source biology*. dalam: Wittman, H., A. A. Desmarais, N. Wiebe, ed., 2010. *Food sovereignty. Reconnecting food, nature and community*. Oakland CA: Food First., hal.152–167.
- Lang, T. dan M. Heasman, 2004. *Food wars. The global battle for mouths, minds and markets*. London: Earthscan.
- Leach, M. dan R. Mearns, ed, 1996. *The lie of the land. Challenging received wisdom on the African environment*. Oxford: James Currey.
- Lenin, V. I., 1964. *Imperialism, The highest stage of capitalism. Collected Works Volume 22*, Moscow: Progress Publishers (first published 1916).
- Lerche, J., 2010. From 'rural labour' to 'classes of labour': class fragmentation, caste and class struggle at the bottom of the Indian labour hierarchy. dalam: B. Harriss-White dan J. Heyer, ed., *The comparative political economy of development: Africa and South Asia*

- compared*. London: Routledge, hal. 64–85.
- Lerche, J., 2013. The agrarian question in neoliberal India: agrarian transition bypassed? *Journal of Agrarian Change*
- Li Xiaoyun, 2012. *What can Africa learn from China's experience in agricultural development?* Unpublished paper, Beijing.
- Li Xiaoyun, Qi Gubo, Tang Lixia, Zhao Lixia, Jin Leshan, Guo Zhenfang dan Wu Jin, 2012. *Agricultural development in China and Africa. A comparative analysis*. London: Routledge.
- Lim, Li Ching, 2008. *Sustainable agriculture pushing back the desert*. <http://www.i-sis.org.uk/desertification.php>. [Diakses pada tanggal 2 November 2011]
- Luxemburg, R. 1951. *The accumulation of capital*. London: Routledge and Kegan Paul (first published 1913).
- Mamdani, M., 1987. Extreme but not exceptional: towards an analysis of the agrarian question in Uganda. *Journal of Peasant Studies*, 14(2), 191–225.
- Martinez-Alier, J. 2002. *The environmentalism of the poor*, Cheltenham: Edward Elgar.
- Marx, K., 1843/2009. *Introduction to A contribution to the critique of Hegel's philosophy of right*. <http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm> [Diakses pada tanggal 2 Februari 2010]
- Marx, K., 1976. *Capital Volume 1*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Masioloi, I. dan P. Nicholson, 2010. *Seeing like a peasant. Voices from La Via Campesina*. Dalam: Wittman,

- Desmarais dan Wiebe, ed., hal.33–44.
- McMichael, P., 1984. *Settlers and the agrarian question. Foundations of capitalism in colonial Australia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McMichael, P., 2006. Reframing development: global peasant movements and the new agrarian question. *Canadian Journal of Development Studies*, 27(4), 471–83.
- McMichael, P., 2009. A food regime genealogy. *Journal of Peasant Studies*, 36(1), 139–70.
- McMichael, P., 2010. *Food sovereignty in movement: addressing the triple crisis*. Dalam: Wittman, Desmarais dan Wiebe, ed., hal. 168–185.
- McMichael, P. dan I. Scoones, ed, 2010. Biofuels, land and agrarian change, *special issue of Journal of Peasant Studies* 37(4).
- Mitchell, T., 2002. *Rule of experts. Egypt, techno-politics, modernity*. Berkeley: University of California Press.
- Mollinga, P., 2010. The material conditions of a polarized discourse: clamours and silences in critical analysis of agricultural water use in India. *Journal of Agrarian Change*, 10 (3), 414–36.
- Moore, H. L. dan M. Vaughan, 1994. *Cutting down trees. Gender, nutrition and agricultural change in the Northern Province of Zambia, 1890-1990*. London: James Currey.
- Moore, J. W., 2010. The end of the road? Agricultural revolutions in the capitalist world-ecology, 1450–2010. *Journal of Agrarian Change*, 10(3), 389–413.
- Moore, J. W., 2011. Transcending the metabolic rift: a theory of crises in the capitalist world-ecology. *Journal of Peasant Studies* 38(1), 1–46.

- Mueller, B. E. T., 2011. The agrarian question in Tanzania: using new evidence to reconcile an old debate. *Review of African Political Economy*, 38/127: 23-42.
- Murphy, R., 2002. *How migrant labour is changing rural China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Murton, A., 1999. Population growth and poverty in Machakos District, Kenya. *Geographical Journal*, 165(1), 37-46.
- O'Connor, J., 1998. *Natural causes. essays in ecological Marxism*. New York: Guilford Press.
- O'Laughlin, B., 2009. *Gender justice, land and the agrarian question in Southern Africa*. dalam: Akram-Lodhi, H. dan C. Kay, ed., 2009. *Peasants and globalization. Political economy, rural transformation and the agrarian question*. London: Routledge., hal. 190-213.
- Oya, C. 2001. Large and middle-scale farmers in the groundnut sector in Senegal in the context of liberalization and structural adjustment. *Journal of Agrarian Change*, 1(4), 124-163.
- Oya, C., 2004. The empirical investigation of rural class formation: methodological issues in a study of large- and mid-scale farmers in Senegal. *Historical Materialism*, 12, 289-326.
- Oya, C., 2007. Stories of rural accumulation in Africa. Trajectories and transitions among rural capitalists in Senegal. *Journal of Agrarian Change*, 7(4), 453-493.
- Oya, C., 2010. Agro-pessimism, capitalism and agrarian change: trajectories and contradictions in Sub-Saharan Africa. dalam: V. Padayachee, ed., *The political economy of Africa*. London: Routledge, hal.85-109.

- Oya, C., 2012. Contract farming in sub-Saharan Africa: a survey of approaches, issues and debates. *Journal of Agrarian Change*, 12(1), 1-33.
- Patel, R., 2010. What does food sovereignty look like? Dalam: Wittman, Desmarais dan Wiebe, ed., hal.186-196.
- Peluso, N. L. dan C. Lund, ed., 2011. New frontiers of land control. Special issue of *Journal of Peasant Studies* 38(4).
- Peters, P.E., 2004. Inequality and social conflict over land in Africa. *Journal of Agrarian Change*, 4(3), 269-314.
- Post, C., 1995. The agrarian origins of US Capitalism: the transformation of the northern countryside before the Civil War. *Journal of Peasant Studies*, 22(3), 380-445.
- Post, C., 2003. Plantation slavery and economic development in the antebellum southern United States. *Journal of Agrarian Change*, 3(3), 289-332.
- Post, C., 2011, *The American road to capitalism: studies in class structure, economic development and political conflict, 1620-1877*. Leiden: Brill, 2010.
- Reij, C., 2006. *More success stories in Africa's drylands than often assumed*. Presentation to Forum sur la Souveraineté Alimentaire, Niamey, 7-10 November. http://www.roppa.info/IMG/pdf/More_success_stories_in_Africa_Reij_Chris.pdf [Diakses pada tanggal 9 November 2012]
- Reij, C., G. Tappan dan M. Smale, 2009. Agroenvironmental Transformation in the Sahel. Another Kind of "Green Revolution". *Discussion Paper 00914*. Washington:

- IFPRI.
- Rigg, J. 2006. Land, farming, livelihoods, and poverty: rethinking the links in the rural South. *World Development*, 34 (1), 180-202.
- Rocheleau, D., 1995. More on Machakos. *Environment*, 37(7), 3-5.
- Schiavoni, C. dan W. Camacaro, 2009. The Venezuelan effort to build a new food and agriculture system. *Monthly Review* 61 (3). <http://monthlyreview.org/2009/07/01/the-venezuelan-effort-to-build-a-new-food-and-agriculture-system> [Diakses pada tanggal 5 February 2013]
- Scoones, I., N. Marongwe, B. Mavedzenge, J. Mahenehene, F. Murimbarimba dan C. Sukume, 2010. *Zimbabwe's land reform. Myths and realities*. Harare: Weaver Press.
- Scoones, I., N. Marongwe, B. Mavedzenge, J. Mahenehene, F. Murimbarimba dan C. Sukume, 2010. Livelihoods after land reform in Zimbabwe: understanding processes of rural differentiation. *Journal of Agrarian Change*, 12(4), 503-27.
- Scott, J. C., 1985. *Weapons of the weak. everyday forms of peasant resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Severino, J-M. dan O. Ray, 2011. *Africa's moment*. Cambridge: Polity Press.
- Tiffen, M. dan M. Mortimore, 1994. 'Malthus controverted: the role of capital and technology in growth and environmental recovery in Kenya'. *World Development*, 22(7), 997-1010.
- Tiffen, M., M. Mortimore dan F. Gichuki, 1994. *More people, less erosion. Environmental recovery in Kenya*.

- Chichester: John Wiley.
- van der Ploeg, J.D., 2008. *The new peasantries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of empire and globalization*. London: Earthscan.
- Weis, T. 2007. *The global food economy. The battle for the future of farming*. London: Zed Books.
- Weis, T., 2010. The accelerating biophysical contradictions of industrial capitalist agriculture. *Journal of Agrarian Change*, 10(3), 315-41.
- White, B., 2011. *Who will own the countryside? Dispossession, rural youth and the future of farming*. Valedictory Lecture, ISS, The Hague, 13 October. http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Speeches_Lectures/Ben_White_valedictory_web.pdf [Diakses pada tanggal 7 Januari 2012]
- Wiggins, S., 2000. Interpreting changes from the 1970s to the 1990s in African agriculture through village studies. *World Development*, 28(4), 631-62.
- Williams, G. 1976. Taking the part of peasants. Dalam: P. Gutkind dan I. Wallerstein, ed., *The political economy of contemporary Africa*. Beverly Hills CA: Sage, hal. 131-154.
- Wittman, H., 2010. Reconnecting agriculture & the environment: food sovereignty & the agrarian basis of ecological citizenship. dalam: Wittman, H., A. A. Desmarais, N. Wiebe, ed., 2010. *Food sovereignty. Reconnecting food, nature and community*. Oakland CA: Food First., hal. 91-105.
- Wittman, H., A. A. Desmarais, N. Wiebe, 2010. The origins and potential of food sovereignty. dalam: Wittman, H.,

- A. A. Desmarais, N. Wiebe, ed., 2010. *Food sovereignty. Reconnecting food, nature and community*. Oakland CA: Food First., hal. 1-14.
- Wittman, H., A. A. Desmarais, N. Wiebe, ed., 2010. *Food sovereignty. Reconnecting food, nature and community*. Oakland CA: Food First.
- Woodhouse, P., 2010. Beyond industrial agriculture? Some questions about farm size, productivity and sustainability. *Journal of Agrarian Change*, 10(3), 437-453.[]

Lampiran 2

Deklarasi Forum Kedaulatan Pangan, Nyeleni 2007



DECLARATION OF NYÉLÉNI

27 Februari 2007

Sélingué, Mali

Deklarasi Forum Kedaulatan Pangan, Nyeleni 2007

(Declaration of the Forum for Food Sovereignty, Nyéleni 2007)

Kami, lebih dari 500 perwakilan lebih dari 80 negara, organisasi petani/keluarga petani, nelayan, *indigenous people*, pekerja di pedesaan, kaum migrant, pastoralist, masyarakat hutan, kelompok perempuan, kaum muda, konsumen dan pemerhati lingkungan serta kelompok gerakan masyarakat perkotaan berkumpul di desa *Nyéleni* di Sélingué, Mali untuk memperkuat gerakan global kedaulatan pangan. Kami melakukan ini, dengan keringat sendiri sebagaimana kita hidup di gubuk yang dibangun sendiri dengan tradisi lokal dan makan makanan yang diproduksi dan disiapkan oleh masyarakat Sélingué. Kami memberi nama kolektif ini dengan nama "Nyéleni" sebagai penghargaan untuk dan inspirasi dari legenda petani perempuan Malian yang bertani dan memberi makan masyarakatnya dengan baik.

Sebagian besar dari kita adalah penghasil makanan dan siap, dapat dan ingin memberi kebutuhan pangan seluruh masyarakat dunia. Warisan kita sebagai penghasil makanan adalah penting bagi kehidupan manusia di masa datang. Dalam hal ini, khususnya kelompok perempuan dan *indigenous people* yang secara historis adalah pencipta pengetahuan tentang pangan dan pertanian. Tetapi, warisan ini dan kapasitas kita untuk membuat makanan sehat, baik dan berlimpah sedang terancam dan dirusak oleh neo-liberalisme dan kapitalisme. Kedaulatan Pangan memberi kita harapan dan kekuatan untuk melestarikan, memulihkan dan membangun pengetahuan dan kapasitas memproduksi pangan.

Kedaulatan Pangan adalah hak masyarakat atas makanan sehat dan sesuai dengan budayanya yang diproduksi melalui metode agro-ekologi dan berkelanjutan, dan hak mereka untuk memilih sendiri makanan mereka dan system pertanian mereka. Hal ini menempatkan aspirasi dan kebutuhan mereka yang memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi pangan di jantung sistem pangan dan kebijakan, daripada tuntutan pasar dan korporasi. Ini membela kepentingan dan kebutuhan generasi berikutnya. Kedaulatan Pangan menawarkan strategi untuk melawan dan membongkar rezim perdagangan korporasi dan rezim pangan saat ini, dan arah untuk persoalan pangan, pertanian, pastoral dan system perikanan ditentukan oleh produser lokal dan konsumen lokal. Kedaulatan Pangan memprioritaskan ekonomi lokal dan nasional dan pasar dan memberdayakan petani dan keluarga petani yang bekerja di pertanian, nelayan lokal, pastoralis yang mengandalkan ladang rumput dan produksi, distribusi dan konsumsi pangan berbasis keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi. Kedaulatan Pangan mempromosikan perdagangan yang transparan yang menjamin pendapatan yang adil untuk semua orang serta hak-hak konsumen untuk mengawasi pangan dan nutrisi mereka. Hal ini juga menjamin hak untuk menggunakan dan mengelola lahan, wilayahnya, air, bibit, ternak dan keberagamannya adalah berada di tangan mereka yang memproduksi pangan. Kedaulatan Pangan menyiratkan hubungan sosial baru yang bebas dari tekanan dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat, kelompok ras, kelas-kelas sosial dan ekonomi dan perbedaan generasi.

Di Nyéleni, melalui banyak perdebatan dan interaksi, kami memperdalam pemahaman kolektif kita tentang Kedaulatan Pangan dan belajar tentang realitas perjuangan kita masing-masing untuk mempertahankan otonomi dan mendapatkan kembali kekuatan kami. Kami sekarang mengerti lebih baik instrument yang kita butuhkan untuk membangun gerakan kita dan memajukan visi kita bersama.



Apa yang Kita Perjuangkan?

Sebuah dunia di mana ...

...semua orang, bangsa dan negara yang bisa menentukan makanan mereka dengan memproduksi sistem dan kebijakan yang menyediakan setiap orang pangan yang berkualitas, layak, terjangkau, sehat dan cocok secara budaya;

...ada pengakuan dan penghargaan terhadap peran perempuan dan hak-haknya dalam proses produksi pangan, dan keterwakilan perempuan di dalam semua lembaga pengambilan keputusan;

...semua orang di setiap negara kita dapat hidup bermartabat, mendapatkan upah yang baik dan mendapatkan kesempatan untuk tinggal di rumah mereka, jika mereka menghendakinya;

...di mana Kedaulatan Pangan dianggap sebagai basis hak asasi manusia, diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat, orang-orang dan lembaga negara dan internasional;

...kita mampu untuk memelihara dan memperbaiki lingkungan pedesaan, populasi ikan, *landscape* dan tradisi pangan berdasarkan pengelolaan lahan, tanah, air, laut, bibit, ternak dan semua keberagaman lainnya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

...kami menghargai, mengakui dan menghormati keberagaman pengetahuan tradisional, sistem pangan tradisional, bahasa dan budaya, dan cara kita mengatur dan mengekspresikan diri kita sendiri;

...terdapat program *agrarian reform* integral dan sejati yang menjamin petani-petani memiliki hak penuh atas tanah, mempertahankan dan memulihkan wilayah *indigenous people*, menjamin akses dan kontrol masyarakat nelayan atas wilayah tangkapannya dan ekosistemnya, menghargai akses dan kontrol masyarakat pastoral atas wilayah pastoralnya dan rute migrasinya, menjamin pekerjaan yang layak dengan upah yang layak dan hak-hak pekerja untuk semua, dan masa depan pemuda di desa; *agrarian reform* memperkuat ketergantungan antara produsen dan konsumen, menjamin kelangsungan hidup masyarakat, keadilan sosial dan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan menghargai otonomi dan pemerintahan lokal dengan hak-hak yang sejajar antara perempuan dan laki-laki;

...di mana *agrarian reform* menjamin hak atas wilayah dan menentukan sendiri untuk semua orang;

...kita membagi tanah dan wilayah kita secara damai dan adil di antara masyarakat, sebagai petani, *indigenous people*, nelayan tradisional, pastoralis atau lainnya;

...dalam kasus bencana alam dan kemanusiaan dan situasi pemulihan konflik, kedaulatan pangan bertindak sebagai bentuk 'jaminan' yang memperkuat upaya-upaya pemulihan lokal dan mengurangi dampak negatif... di mana kita mengingat bahwa masyarakat yang terkena dampak bencana tidak tertolong, dan di mana organisasi lokal yang kuat untuk menolong dirinya sendiri adalah kunci untuk pemulihan;

...kekuatan rakyat untuk membuat keputusan tentang material, alam dan warisan spiritual mereka dipertahankan;

...semua orang memiliki hak untuk mempertahankan wilayah mereka dari aksi-aksi korporasi transnasional;



Apa yang kita lawan?

Imperialisme, neo-liberalisme, neo-kolonialisme dan patriarki, dan semua sistem yang merugikan kehidupan, sumberdaya dan ekosistem, dan agen-agen yang mempromosikan hal-hal tersebut seperti institusi keuangan internasional, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kesepakatan perdagangan bebas, korporasi trans-nasional dan pemerintah yang berlawanan dengan masyarakatnya;

Kegiatan dumping produksi makanan dengan harga yang sangat rendah dalam ekonomi global; dominasi pangan kita dan sistem produksi pangan oleh korporasi yang menempatkan keuntungan terlebih dahulu dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, kesehatan dan lingkungan;

Teknologi dan praktek-praktek yang memotong masa depan kapasitas produksi pangan kita, menghancurkan lingkungan dan meletakkan kesehatan kita dalam bahaya. Ini semua termasuk transgenic tanaman dan hewan, teknologi terminator, budidaya industri dan praktek-praktek penangkapan ikan yang menghancurkan, praktek-praktek industri susu – yang disebut *White Revolution*, praktek-praktek klasik dan baru *Green Revolution*, dan *Green Desert* industri tanaman monokultur untuk bahan bakar alternative dan perkebunan lainnya;

Privatisasi dan komoditisasi pangan, pelayanan dasar dan pelayanan publik, pengetahuan, tanah, air, bibit, ternak dan warisan alamiah kita;

Model/proyek pembangunan dan industri ekstraktif yang menyingkirkan masyarakat dan menghancurkan lingkungan dan warisan alam kita;

Perang, konflik dan pendudukan, blokade ekonomi, kelaparan, pengusuran masyarakat dan penyitaan lahan mereka, dan semua kekuatan dan pemerintah yang menyebabkan dan mendukung hal-hal tersebut;

Program paska bencana dan pemulihan konflik yang menghancurkan lingkungan dan kapasitasnya;

Kriminalisasi orang-orang yang memperjuangkan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak kita; bantuan pangan yang menyamarkan kegiatan dumping, memperkenalkan GMO kepada sistem lingkungan dan pangan lokal dan membuat bentuk-bentuk kolonialisme baru; internasionalisasi dan globalisasi nilai-nilai paternalistik dan patriarki yang memarginalkan kelompok perempuan, dan keberagaman pertanian, keadilan, pastoral dan masyarakat nelayan di seluruh dunia;

Apa yang dapat dan kita lakukan?

Sebagaimana kita kerjakan dengan masyarakat lokal di Sélingué untuk membuat pertemuan di Nyéléni, kami bertekad untuk membangun gerakan kolektif kita untuk kedaulatan pangan dengan beraliansi, mendukung perjuangan satu sama lain dan memperluas solidaritas kita, kekuatan dan kreativitas untuk masyarakat di seluruh dunia yang berkomitmen untuk Kedaulatan Pangan. Setiap perjuangan, di setiap bagian di dunia untuk Kedaulatan Pangan, adalah perjuangan kita.

Kita menerima banyak aksi-aksi kolektif untuk bersama-sama berbagi visi tentang Kedaulatan Pangan dengan seluruh masyarakat di dunia, yang dielaborasi dalam sebuah dokumen sintesis. Kita akan menerapkan aksi-aksi ini di daerah masing-masing dengan gerakan kita sendiri dan secara bersama-sama dalam solidaritas dengan gerakan lainnya. Kita akan membagi visi kita bersama dan agenda aksi kita untuk Kedaulatan Pangan dengan yang lainnya yang tidak dapat bersama-sama dengan kita di sini di Nyéléni, sehingga semangat Nyéléni meresap keseluruh dunia dan menjadi kekuatan efektif untuk membuat Kedaulatan Pangan menjadi sebuah kenyataan untuk seluruh masyarakat di seluruh dunia.

Akhirnya, kami memberikan dukungan tak terhingga dan tak tergoyahkan untuk gerakan petani Mali dan ROPPA dalam tuntutananya bahwa Kedaulatan Pangan menjadi kenyataan di Mali dan seluruh Afrika.

Sekarang saatnya untuk Kedaulatan Pangan (*Now is the time for food sovereignty!*)

Lampiran 2

Tren Politik Kedaulatan Pangan

dicuplik dari: Holt-Gimenez, E. (2011). Food Movement Unite! Strategies to Transform Our Food Systems. Oakland: Food First Book. hlm. 320-321

	Rezim Korporasi Pangan	Reformis	Progresif	Gerakan Pangan
POLITIK	Neoliberal	Reformis	Progresif	Radikal
INSTITUSI PENGUSUNG	Korporasi Keuangan Internasional (Bank Dunia), IMF, WTO, USDA (Vilsak), USAID, Green Revolution Millennium Challenge, Global Harvest, Bill and Melinda Gates Foundation, Cargill, Monsanto, ADM, Tyson, Carefour, Tesco, Wal-Mart	Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Bank Dunia), USDA (Meerigan), USAID (Feed the Future), FAO, CGIAR, Isu Perdagangan Berkeadilan dan lembaga sosial dan program pembangunan (kebanyakan untuk program bank pangan dan bantuan pangan, etc.	Komite PBB untuk Ketahanan Pangan, COAG, We Are the Solution, ROPPA, PELUM, Groundswell, Campesino-a-campesino, Slow Food, Koalisi Komunitas Ketahanan Pangan, CIW, Crossroads center, lembaga kecil-kecil lainnya dan alternative perdagangan berkeadilan.	Via Campesina, EHNE, Friends of Earth, MST, CLOC, COAG, NFFC, Food and Water Watch, ROPPA, ESSAF, African FS Alliance, People Community Market, Food Chain Worker Alliance, ROC United, Xarxa, Platform Rural, Food Sovereignty Alliance, European Climate Justice Action, Institute for Social Ecology, Community to Community, International Planning Committee on Food Sovereignty, World March of Women.
ORIENTASI	Korporasi/Pasar Global	Pembangunan/Bantuan	Pemberdayaan	Pemberian hak/distribusi

POLITIK	Rezim Korporasi Pangan		Gerakan Pangan	
	Neoliberal	Reformis	Progresif	Radikal
MODEL	Over produksi; konsentrasi korporasi, tidak ada pengaturan pasar dan monopoli; monokultur (<i>including organics</i>), GMO, <i>Agribiel</i> , konsumsi dan industri pangan yang masif; tidak mempertimbangkan keluarga petani dan penjualan lokal	Sertifikasi 'niche market' (misalnya: organic, adil, lokal, keberlanjutan), menjaga subsidi pertanian di negara-negara utara, roundtable untuk agrofuel, kedelai, produk hutan, dst. Yang berkelanjutan, land-reform berbasis kepentingan pasar, mikro kredit.	Produksi pangan lokal berbasis lingkungan, investasi di kelompok petani yang kurang mampu, model bisnis alternatif dan paket keuntungan komunitas untuk proses produksi, proses dan penjualan, upah layak untuk pekerja di sektor pertanian, solidaritas ekonomi, akses terhadap lahan, mengatur pasar dan persediaan	Membongkar kekuatan monopoli industri pangan, keseimbangan, redistributive LR, hak masyarakat atas air dan bibit, sistem pangan berbasis regional, demokratisasi sistem pangan, kehidupan yang berkelanjutan, melindungi dari dumping/over produksi, mengembalikan pertanian skala kecil yang berbasis lingkungan untuk mendistribusikan kekayaan dan kesejahteraan bumi.

POLITIK	Rezim Korporasi Pangan		Gerakan Pangan	
	Neoliberal	Reformis	Progresif	Radikal
PENDEKATAN TERHADAP KRISIS PANGAN	Menambah produksi berbasis industri, tidak diaturnya monopoli korporasi, land grabs, penyebaran GMO, PPP liberalisasi pasar, usaha kecil, bantuan pangan internasional, program pertanian global dan Ketahanan Pangan	[= Neoliberal] ditambah dengan: menambah produksi petani kecil dan menengah dan bantuan pangan lokal, mikro kredit, lebih banyak bantuan pertanian, tetapi terkait dengan GMO dan tanaman "bio-fortified"/ <i>climate resistant</i> ".	Hak atas Pangan, jaring pengaman yang lebih baik, konsep produksi yang berkelanjutan, sumber pangan lokal, pembangunan pertanian berbasis konsep agro-ekologi. <i>Committee on World Food Security (CFS)</i> .	HAM atas pangan, sumber pangan lokal, produksi yang berkelanjutan, sesuai dengan budaya setempat, pengawasan yang demokratis. Fokus pada negosiasi UN/FAO.
DOKUMEN KUNCI	World Bank 2009 Development Report	World Bank 2009 Development Report	IAASTD	Deklarasi Nyeleni; Peoples' Comprehensive Framework for Action to Eradicate Hunger; ICARRD

Indeks

A

Aburizal Bakrie 18
Accumulation by dispossession 47
Afnawi Nuh 9
Afrika Selatan 52, 70
Agraria 39, 44, 46, 48, 51, 52, 55, 59, 62, 66, 67, 69, 73, 77, 86, 88, 91, 92, 93
Agribisnis 41, 44, 45, 52, 55, 65, 77, 87, 93
Agriculture vii, xii, 2, 7, 30, 33, 37, 38, 40, 43, 78, 79, 97, 100, 102
Agriculture Organization vii, xii, 7
Agroekologi 55, 58, 70, 72, 75, 77, 80, 84, 87, 92
AIDS 70
Amerika Serikat 38, 44, 51, 52
Amerika Utara 38, 52
AM Saefudin 18

Annette Aurélie 38
Asia 16, 27, 31, 33, 48, 73, 93, 102, 104
Asia-Pasific 16
Austria 83

B

Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia 9
Beerlandt 3, 5, 28
Bezner Kerr 68, 70, 97
Bina Desa iv, v, xi, xv, xix, 28
BioMed Central 3
Biopiracy 41
Bolivia 22
Borras 46, 55, 70, 90
Boserup 71, 73
BPN vii, 15
BPRPI 9
BPS 15, 19, 20
Brazil 22, 42
BULOG vii, 17, 18

Burkina Faso 71, 74
C
 Camacaro 87
Capital 58, 72, 75, 78, 87, 92, 93
Capital others 72, 75
 CGIAR 74, 89
 Chayanov 60, 76, 96, 100
 China 41, 42, 50, 54, 55, 61, 66, 76, 97, 103, 104, 106, 127
 Chinampa 82
Colonial settler 52
Corporate environmental food regime 53
 Cowen 67, 100
D
 Danau Sélingué 11
 David Harvey 47
Deforestation 71
 Departemen Pertanian 15, 29
 Derek Hall 47
Desertification 71
 Desmarais 6, 29, 38, 45, 58, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 107, 110
 Diversifikasi 63, 77
 Duncan 57, 101
 DuPont 60
E
 Edelman 55, 90

Ekologi politik 38, 39, 59
 Ekonomi politik 39, 49, 50, 60, 65, 71, 73, 92, 93
 Ekuador 86
Enclosure 45, 48, 55
 Epistemologis 2, 25
 Eric Wolf 54
 Eropa 41, 48, 52, 53, 58, 83, 93
F
 Fairhead 70, 73
 FAO 42, 89
 Farming 78
 Farshad Arighi 83
 Friends of the Earth 11
 FSPI vii, 7, 13, 16, 17, 30, 32, 33, 34
G
Genetically modified organisms 41
 Ghana 42, 70, 102
 Gichuli 71
 Giuliano Martiniello 61
 Globalisasi 37, 39, 43, 44, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 62, 88
 GMO 41
 Guatemala 75
H
 Hak Kekayaan Intelektual 41
 Hannah Wittman 38

Harriet Friedmann 50
 Harriss-White 66, 102, 104
 Henri Saragih 9
Herb polyculture 75
 Hesse 15, 16, 30
 HKTI vii, 18, 19, 34, 35
 Holt-Giménez 48, 49, 50
 Hong Kong 17, 32
I
 IFAD 83, 89
 IFPRI 74
 IMF vii, xviii, 7, 16, 19, 115
 India 41, 48, 63, 66
 Input 37, 40, 43, 63, 76, 78, 79, 80, 92
 Isakson 68, 74, 76
 Itelvina Masioli 68
J
 Jack Kloppenburg 60, 84
 James C. Scott 54
 Jan Douwe van der Ploeg 63
 Jawa xviii, 15, 28, 127
 Jennifer Franco 70
 Jerman 74
Journal of Peasant Studies x, 1, 28, 31, 32, 38, 88, 95, 96, 100, 105, 107,
 Julio Boltvinik 83
K
 Kanada 52
 Kapital 46, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 72, 75, 77, 78, 79, 87
 Kapitalisme 38, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 78, 80, 86, 88, 92
 Kappeler 87
 Kedaulatan Pangan iv, v, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
 Kegiatan pertanian 40, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 78, 79
 Kenya 71
 Ketahanan pangan 80, 82, 87
 Kloppenburg 44, 60, 84, 85, 88
 Koalisi Rakyat Menggugat 17
 komodifikasi subsisten 62
 Komoditas 40, 42, 44, 46, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 75, 76, 82, 85, 88, 93
 KPA 9, 17, 28, 33
 KRKP vii, 12, 13, 17
 Kuba 54
L
Land grabbing 45, 55, 88

- Land reform* 94, 100, 109
 LaVia Campesina 38
 Leach 70, 71, 73
 Legumes 75
 liberalisasi 45, 93, 117
- M**
 Machakos 71, 72, 73
 Mahmmud Mamdani 70
 Maize 74
 Malaysia 54
 Malthus 71, 72, 80
 Marx 47, 56, 68
 Marxis 50
 Meksiko 54, 82
 Miguel Altieri 62
 Milpa 74, 75
 Monokultur 41, 60, 63
 Mortimore 71, 72
- N**
 Neoliberalisme 40
 Nettie Wiebe 38
 Nicholson 68, 80, 83, 105
 Niger 71
 Nigeria 71, 74
- P**
 Patel 48, 61, 62, 89, 90
 PBB 89
Peasant 37, 38, 54, 88
 Pedesaan 38, 40, 42, 46, 49, 53, 54, 58, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 76, 81, 82, 83, 87, 90, 94
- Pencaplokan tanah 45, 55, 88, 93
 Pertanian 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94
 Petani 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
 Philip McMichael
 McMichael 51
 Produksi 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 52, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 87
 Produktivitas 52, 55, 61, 71, 72, 73, 82
- R**
 Reij 71, 74
 Rejim Pangan Internasional 50, 51, 52, 53, 56, 78
 Reproduksi 42, 45, 64, 65, 66, 69, 73, 76, 78, 79, 80, 83, 86, 92, 94

- Revolusi industri 47, 49, 52, 55
 Robert Brenner 48, 55
 Robert Chambers 75, 77
 Rusia 54
 Ryan Isakson's 74
- S**
 Saturnino Borrás 70
 Schiavoni 87
 Senegal 71, 73
 Shattuck 44, 48, 49, 77, 89
 Siklus Malthusian 56
 Sosialisme 86
Sovereign Wealth Funds 45
 Soviet 50, 59
 Squash 75
 Sub sahara 70
 Sub-Sahara Afrika 67
 Subsisten 46, 62, 75, 76
- T**
 Teknologi 40, 41, 43, 44, 58, 60, 71, 84, 85, 89
 Tenaga kerja 37, 43, 48, 52, 55, 56, 61, 62, 65, 66, 68, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92
 Tiffen 71, 72, 73
- U**
 Usaha pertanian 37, 38, 43, 47, 49, 51, 56, 59, 65, 78, 79, 82, 87, 88, 89

- V**
 Venezuela 87
 Vietnam 42, 43, 54
- W**
Weapon of the Weak 54
 Wittman 38, 39, 43, 45, 48, 56, 58, 77, 78, 80, 81, 86, 88, 89
 Woodhouse 71, 82
 WTO 40, 41, 46

Tentang Penulis

HENRY BERNSTEIN, Emeritus Professor bidang Studi Pembangunan di the University of London, di the School of Oriental and African Studies. Bersama dengan Terence J Byres, menjadi editor untuk Journal of Peasant Studies (1985–2000), Journal of Agrarian Change (2001), dan pada 2008, menjadi Emeritus Editor untuk jurnal yang sama. Bukunya *Class Dynamics of Agrarian Change* (2010) telah diterjemahkan kedalam banyak bahasa. Saat ini beliau adalah Adjunct Professor COHD untuk China Agricultural University, Beijing.

DIANTO BACHRIADI, Doktor Sosiologi Politik dari Flinders University, Adelaide of South Australia, Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria (1996–2001), Ketua Badan Pelaksana Pergerakan-People Centered Advocacy Institute (2003–2004), dan sejak 2012 menjadi peneliti utama di Agrarian Resources Center (ARC). Bersama Gunawan Wiradi menulis buku *Enam Dekade Ketimpangan: persoalan penguasaan tanah di Indonesia* yang diterbitkan pada tahun 2012. Saat ini beliau merupakan salah seorang anggota (Komisioner) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pengajar luar biasa di jurusan Sosiologi Fisip Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunungjati, Bandung, Jawa Barat.